

**ANALISIS PERBANDINGAN TINGKAT PENGUNGKAPAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)
BERDASARKAN *ISLAMIC SOCIAL REPORTING (ISR) INDEX*
PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA
TAHUN 2016-2018**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1



Oleh :

NOFIYATUL KHOIRIYAH

NIM 1505036036

**S1 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Khoirul Anwar, M.Ag

NIP. 19690420 199603 1 002

Singgih Muheramtohad, S.Sos.I, M.Ei

NIP. 19821031 201503 1 003

Lamp : 4 (empat) eks
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri Nofiyatul Khoiriyah

Kepada Yth
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan sebelumnya, bersama ini saya kirim naskah saudara:

Nama : Nofiyatul Khoiriyah
Nomor Induk : 1505036036
Judul : Analisis Perbandingan Tingkat Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Berdasarkan Islamic Social Reporting (ISR) Index Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2016-2018

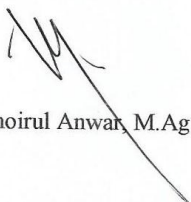
Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamualaikum Wr. Wb


Semarang, 17 Oktober 2019

Pembimbing I



Khoirul Anwar, M.Ag

Pembimbing II



Singgih Muheramtohad, S.Sos.I, M.Ei



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Prof.Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp. 024-7608454 Semarang 50185

PENGESAHAN

Naskah Skripsi berikut ini:

Judul : Analisis Perbandingan Tingkat Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Berdasarkan Islamic Social Reporting (ISR) Index pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2016-2018

Penulis : Nofiyatul Khoiriyah
NIM : 1505036036
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah diujikan dalam sidang *munaqasyah* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo dan dinyatakan LULUS dengan predikate Cumlaude pada tanggal:

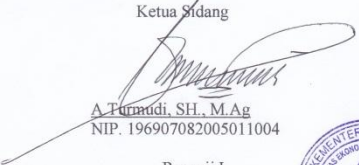
21 Oktober 2019

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 tahun akademik 2019/2020.

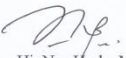
Semarang, 22 Oktober 2019

DEWAN PENGUJI

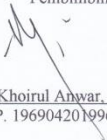
Ketua Sidang


A. Firmadi, SH., M.Ag
NIP. 196907082005011004


Penguji I


Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag
NIP. 196908301994032003

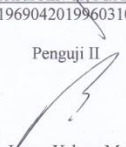
Pembimbing I


H. Khoirul Anwar, M.Ag
NIP. 196904201996031002

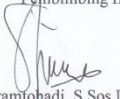
Sekretaris Sidang


H. Khoirul Anwar, M.Ag
NIP. 196904201996031002

Penguji II


Dr. H. Inam Yahya, M.Ag
NIP. 197004101995031001

Pembimbing II


Singih Muheramtohadji, S.Sos.I., M.E.i
NIP. 198210312015031003



MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

*“Sebaik Baik Manusia Adalah Yang Paling Bermanfaat Bagi Orang
Lain”*

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ

*“Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri
kalian sendiri”*
(QS. Al-Isra:7)

PERSEMBAHAN

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillah puji syukur bagi Allah SWT Dzat yang melimpahkan nikmat dan rahmatNya kepada makhluk semesta alam. Segala puji hanya bagi Allah SWT. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad saw, tuntunan kami di dunia dan pemberi syaa'at kelak di akhirat. Dengan rasa bahagia saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua Orangtuaku.. Ibu Masrifah dan Bapak Radi. Terimakasih atas segala cinta, kasih sayang dan dukungan yang engkau curahkan kepadaku. Semua itu tiada pernah bisa aku balas dengan apapun. Semoga Allah senantiasa memuliakan dan melimpahkan kebaikan kepada Engkau. Terimakasih atas segalanya....
2. Kakak-kakakku, Mbak Yun, Bang Mummy, Mas Arif, Mba Amel, saudara kembarku Nova, terimakasih atas dukungan kalian selama ini, semoga Allah senantiasa memberikan rahmatNya pada kalian semua..
3. Keluarga besarku yang selalu memberiku semangat dan dukungan untuk segala hal. Semoga kekeluargaan ini selalu rukun dan semakin erat.
4. Sahabatku Dewi, Lely, Rezky dan Dwi, dan keluarga besar PBASA, Keluarga Kos Lula tempat tinggal kedua di Semarang terkhusus Dyah, Uhtia, ka Mita, Dina dan adek2. Teman-teman KKN, Nafis, Jihan, Maria, Eva dan yang lain, Teman-Teman KMPP, terimakasih

telah menjadi teman yang baik dan membawa kenangan selama masa kuliah ini. Semoga kalian di mudahkan dalam urusan kalian semua.

5. Teman-teman magang di BRISyariah Pati, Laila, mbak Endang dan upa, mas mbak pegawai BRISyariah Pati yang telah memberikan pengalaman dan bimbingannya selama magang.
6. Teman yang selalu memberi semangat, Masguh dan Azhar yang memberikan suport dan bantuannya baik langsung maupun tidak langsung selama ini. Semoga kebaikan kembali kepada kalian.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan oleh penulis.

Semarang, 17 Oktober 2019

Deklarator,



Nofiyatul Khoiriyah

NIM. 1505036036

v

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB KE HURUF LATIN

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin kedalam huruf Latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut:

A. Konsonan

ء = ‘	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

اَ = a

اِ = i

اُ = u

C. Diftong

أي = ay

أو = aw

D. Syaddah (-)

Syaddah dilambangkan dengan konsonanganda, misalnya الطَّبّ al-thibb.

E. Kata Sandang

Kata sandang (...ال) ditulisdengan al- ... misalnya الصنعه = al-shina'ah.

Al- ditulishurufkecilkecualijikaterletakpadapermulaankalimat.

F. Ta' Marbutah (ة)

Setiap ta' marbutahditulisdengan "h" misalnya المعيشة الطبيعية = al-ma'isyah al-thabi'iyah.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari 12 Bank Umum Syariah di Indonesia berdasarkan *Islamic social Reporting* (ISR) indeks. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* Bank Umum Syariah di Indonesia yang masuk kriteria pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan tingkat pengungkapan CSR berdasarkan ISR indeks pada Bank Umum Syariah di Indonesia tergolong informatif dan terus mengalami peningkatan pengungkapan CSR dari tahun ke tahun. Bank BNI Syariah berturut-turut dari tahun ke tahun memperoleh indeks ISR tertinggi dibandingkan dengan bank-bank yang lain dengan perolehan mencapai 83,3% dengan predikat sangat informatif. Sedangkan Bank BTPN Syariah perolehan indeks ISR terendah sebesar 55,4% dengan predikat kurang informatif. Selain itu dari ke enam tema ISR, tema produk dan jasa dan tema tata kelola perusahaan yang paling banyak diungkapkan dibandingkan dengan tema lainnya. Sedangkan tema lingkungan yang paling rendah diungkapkan oleh Bank Umum Syariah.

Kata kunci : *Corporate Social Responsibility, Bank Umum Syariah , Indeks ISR*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS PERBANDINGAN TINGKAT PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)* BERDASARKAN *ISLAMIC SOCIAL REPORTING (ISR)* INDEX PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2016-2018”. Skripsi ini disusun guna memenuhi dan melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang jurusan perbankan syariah.

Penulis menyadari sepenuhnya, dalam menyelesaikan skripsi ini mendapatkan banyak bantuan baik moril maupun materil dari berbagai pihak. Tanpa bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik. Maka pada kesempatan ini dengan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. Muhammad Saifullah, M. Ag., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
3. Heny Yuningrum, S.E, M.Si, selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah dan Muyassarah, MSI, selaku Sekretaris Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah sabar membimbing,

menasehati, mengarahkan, dan mengurus segala keperluan akademik seluruh mahasiswa jurusan S1 perbankan syariah.

4. Dr. H. Musahadi, M.Ag., selaku dosen wali yang telah sabar mendengar keluh kesah, memberikan arahan dan masukan selama penulis menuntut ilmu di universitas.
5. Khoirul Anwar, M.Ag, selaku dosen pembimbing I dan Singgih Muheramtohadi, S.Sos.I, M.Ei selaku dosen pembimbing II yang telah sabar memberikan bimbingan, arahan dan motivasi selama penyusunan skripsi.
6. Segenap dosen pengampu mata kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan serta membekali penulis dengan berbagai pengalaman.
7. Seluruh karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah melayani dan membantu penulis untuk segala keperluan akademik selama perkuliahan.
8. Seluruh dosen dan karyawan di lingkungan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Semoga semua amal baik mereka di catat dan diberikan ganti yang terbaikoleh Allah SWT, Amin. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat dibutuhkan guna

menyempurnakan skripsi ini. Semoga apa yang terkandung di dalam penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Semarang, 17 Oktober 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vii
TRANSLITERASI HURUF ARAB KE HURUF LAIN	viii
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah	17
1.3 Tujuan Penelitian	18
1.4 Manfaat Penelitian	18
1.4.1 Manfaat Teoritis	18
1.4.2 Manfaat Praktis	19
1.5 Batasan Penelitian.....	19
1.6 Sistematika Penulisan	20
BAB II LANDASAN TEORI	21
2.1 Teori Legitimasi (<i>Legitimacy Theory</i>)	21
2.2 Teori Stakeholder (<i>Stakeholder Theory</i>)	22
2.3 Pengungkapan (<i>Disclosure</i>)	26

2.4 <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	32
2.5 <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	
Dalam Prespektif Islam	38
2.6 Perbankan Syariah.....	46
2.7 <i>Islamic Social Reporting (ISR)</i>	57
2.8 Penelitian Terdahulu	69
BAB III METODE PENELITIAN	73
3.1 Jenis Penelitian.....	73
3.2 Jenis Data Penelitian	74
3.3 Populasi dan sample	75
3.4 Teknik Analisis Data	77
BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN TINGKAT	
PENGUNGKAPAN CSR BANK UMUM SYARIAH	
BERDASARKAN ISR.....	88
4.1 Tema Pendanaan dan Investasi (Finance and Invevestment Theme)	89
4.2 Tema Produk dan Jasa (<i>Product and Services Theme</i>)	93
4.3 Tema Karyawan (<i>Employee Theme</i>)	99
4.4 Tema Sosial (<i>Society Theme</i>).....	106
4.5 Tema lingkungan(<i>Environment Theme</i>).....	111
4.6 Tema Tata Kelola Perusahaan	
(<i>Corporate Governance Theme</i>)	115
4.7 Perbandingan Indeks ISR Berdasarkan Tema ISR	119
4.8 Predikat Tingkat Pengungkapan CSR Berdasarkan	
Indeks ISR	120

BAB V PENUTUP	124
5.1 Kesimpulan.....	124
5.2 Saran.....	125
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Sampel Bank Umum Syariah yang sesuai kriteria	77
Tabel 3.2 Rincian item ISR	80
Tabel 3.3 Predikat tingkat pengungkapan CSRBank Umum Syariah Berdasarkan Indeks ISR	87
Tabel 4.1 Hasil Skoring Tema Pendanaan dan Investasi (<i>Finance and Investment Theme</i>) tahun 2016-2018	89
Tabel 4.2 Hasil Skoring Tema Produk Dan Jasa (<i>Product and Services Theme</i>) tahun 2016-2018	94
Tabel 4.3 Hasil Skoring Tema Karyawan (<i>Employee Theme</i>) tahun 2016-2018	99
Tabel 4.4 Hasil Skoring Tema sosial (<i>Society Theme</i>) tahun 2016-2018	106
Tabel 4.5 Hasil Skoring Tema (<i>Environment Theme</i>) tahun 2016-2018	112
Tabel 4.6 Hasil skoring Tema Tata Kelola Perusahaan (<i>Corporate Governance Theme</i>) tahun 2016-2018	116
Tabel 4.7 Predikat Tingkat Pengungkapan CSR Berdasarkan Indeks ISR	121

DAFTAR GRAFIK

- Grafik 4.1 Perbandingan Tingkat Pengungkapan Tema Pendanaan dan Investasi (*Finance and Investment Theme*) Tahun 2016-2018
- Grafik 4.2 Perbandingan Tingkat Pengungkapan Tema Produk Dan Jasa (*Product and Services Theme*) Tahun 2016-2018
- Grafik 4.3 Perbandingan Tingkat Pengungkapan Tema Karyawan (*Employee Theme*) Tahun 2016-2018
- Grafik 4.4 Perbandingan Tingkat Pengungkapan Tema sosial (*Society Theme*) Tahun 2016-2018
- Grafik 4.5 Perbandingan Tingkat Pengungkapan Tema (*Environment Theme*) Tahun 2016-2018
- Grafik 4.6 Perbandingan Tingkat Pengungkapan Tema Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance Theme*) Tahun 2016-2018
- Grafik 4.7 Perbandingan Indeks ISR dari ke enam tema ISR pada Tahun 2016- 2018
- Grafik 4.8 Perbandingan Tingkat Pengungkapan CSR berdasarkan indeks ISR Bank Umum Syariah tahun 2016-2018

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Konseptual Pelaksanaan CSR Berdasarkan Prinsip-Prinsip Islam

Gambar 2.2 *The shari'a Framework*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kompleksnya masalah sosial dan lingkungan akhir-akhir ini menjadi hal krusial yang perlu disadari oleh pelaku bisnis. dalam dekade terakhir, krisis sosial dan lingkungan semakin parah. kerusakan lingkungan, bencana alam dan meningkatnya kemiskinan dituding akibat dari pelaku bisnis atau perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Maka dari itu, perusahaan harus menyadari masalah yang timbul merupakan akibat dari hasil eksploitasi potensi-potensi ekonomi dan sumberdaya dari masyarakat dan lingkungan. dalam menyikapi isu-isu sosial dan lingkungan menjadi sangat penting bahwasanya perusahaan perlu mengambil langkah-langkah konkrit untuk mengatasi dan mencegahnya dengan pelaksanaan program *Corporate social Responsibility* (CSR).¹ CSR diharapkan sebagai suatu konsep yang mampu memberikan alternatif dalam pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk tanggungjawab sosialnya.

Tanggung jawab sosial atau *Coorporate Social Responsibility* (CSR) merupakan tanggung jawab perusahaan untuk pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kehidupan masyarakat dan lingkungan. Hakikat CSR dimaknai sebagai bentuk komitmen

¹Andreas Lako, *Dekonstruksi CSR & Reformasi Paradigma Bisnis dan Akuntansi*, Jakarta : Erlangga, 2011, h. 66

perusahaan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan *sustainable business*. dalam dunia bisnis merupakan sebuah tanggungjawab secara ekonomi, sosial dan ekologis mencegah dampak-dampak negatif yang timbul dari suatu aktivitas perusahaan kepada para pemangku kepentingan atau *stakeholder* dan upaya peningkatan kualitas masyarakat sekitar termasuk karyawan, pemasok dan pelanggan serta lingkungan.² Perusahaan tidak diharapkan mengedepankan tanggung jawab yang berorientasi pada kondisi keuangan atau *single bottom line* tetapi juga menyelaraskan tanggung jawab perusahaan pada *triple bottom lines*, yaitu *profit*, *people*, dan *planet*.³ Sebagai bentuk kepedulian perusahaan dengan menyisihkan sebagian keuntungannya (*profit*) bagi kepentingan pembangunan manusia (*People*) dan lingkungan (*Planet*) secara berkelanjutan. Dengan kata lain perusahaan memiliki hubungan tanggungjawab kepada Allah, kepada manusia, dan tanggungjawab kepada alam.⁴

Ditinjau dari perspektif syariah, sebenarnya konsep CSR sudah ada dalam ajaran Islam. Secara teoritis CSR merupakan inti dari etika bisnis yang memiliki prinsip-prinsip yang telah digariskan

²*ibid*, h. 39.

³Khusnul Fauziah & Prabowo Yudho J, *Analisis Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah Di Indonesia Berdasarkan Islamic Social Reporting Indeks*, Jurnal Dinamika Akuntansi Vol. 5, No. 1, Maret 2013, h. 13.

⁴Muhammad yasir yusuf, *Islamic Corporate Social Responcibility (I-CSR) pada lembaga keuangan syariah (LKS) teori dan praktik*, Depok :Kencana, edisi pertama, 2017, h. 52

dalam Al-Quran dan As-sunnah diantaranya prinsip Tauhid, khalifah, keadilan, ukhuwah, dan mewujudkan masalah.⁵ Sehingga harus dijadikan pedoman kehidupan dalam berbagai kegiatan termasuk dalam urusan bisnis. Sofyaniet *al.*, juga menyebutkan bahwa manusia adalah *khalifah* dimuka bumi yang memiliki kewajiban untuk menjaga keseimbangan alam. Oleh karena itu, tidak hanya menjalin hubungan vertikal kepada Allah semata (*Hablumminallah*), tetapi juga harus diikuti dengan hubungan yang baik secara horizontal dengan sesama makhluk-Nya (*Hablumminannas*).⁶ Dalam wujudnya manusia memiliki dua tugas utama yaitu menjadi hamba yang patuh kepada Allah SWT dan khalifah yang adil. Kedua tugas ini harus dijalankan beriringan dan memiliki hubungan yang tidak bisa dipisahkan.

CSR seringkali diartikan salah kaprah oleh pelaku bisnis atau perusahaan dan dianggap sebagai beban bagi perusahaan sehingga dapat mengganggu iklim usaha dan investasi dan mengurangi profit bagi pemegang kepentingan. bahkan menganggap pemerintahlah yang bertanggungjawab untuk mengatasi isu-isu sosial dan lingkungan karena pemerintah telah menerima pajak dari perusahaan. Namun fakta empiris membuktikan bahwa kepedulian perusahaan pada CSR mendatangkan keuntungan dan berkah

⁵Ibid., h. 58-72

⁶ Sofyaniet *al.*, *Islamic Social Reporting Index Sebagai Model pengukuran Kinerja Sosial Perbankan Syariah: Studi Komparasi Malaysia dan Indonesia*, Jurnal Dinamika Akuntansi Vol.4 No.1, Maret, 2012.

melimpah bagi perusahaan dan menambah citra perusahaan di masyarakat.

Beberapa studi empiris perusahaan publik yang peduli CSR menunjukkan bahwa CSR berdampak positif terhadap nilai perusahaan dan kinerja keuangan. Studi Hanafi menunjukkan *Corporate social responsibility* terbukti secara empiris berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang menunjukkan semakin luas dan semakin tingginya tingkat pengungkapan CSR maka semakin tinggi pula nilai perusahaan secara keseluruhan dilihat oleh pasar.⁷ Sejalan dengan itu, hasil penelitian Aryati juga mendapatkan hasil positif CSR berpengaruh terhadap kinerja keuangan baik yang diukur dengan ROA ataupun dengan ROE.⁸ Dengan melihat itu seharusnya tidak perlu lagi ragu untuk melaksanakan CSR dan melakukan pengungkapan secara periodik. Pengungkapan yang semakin luas akan memberikan informasi yang akurat kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan dan menimbulkan kepercayaan kepada *stakeholder* dan *shareholder* sehingga memiliki dampak positif dalam jangka panjang.⁹

⁷ Muh Hosen Bawafi, dan Adi Prasetyo, *Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas sebagai Variabel Pemoderasi*, Jurnal Review Akuntansi dan Keuangan, 2015, h.728.

⁸ Nita Dwi Aryati, *Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016)*, Naskah publikasi, 2017, h. 12.

⁹ Nur Fitriyah *et.al*, *Kinerja Keuangan Dalam Kerangka Maqashid Syariah: Pengaruhnya Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Islamic Social*

Dalam beberapa tahun terakhir, Perusahaan mulai bergeser dari paradigma konservatif tersebut dan melakukan reformasi dalam praktik pelaksanaan CSR. Banyak perusahaan yang melakukan publikasi kinerja CSR melalui media massa dan elektronik agar mendapatkan apresiasi dan perhatian publik.¹⁰ Meskipun banyak kalangan menyikapi bahwa motif dasar dilakukannya CSR adalah strategi membentuk opini publik. Persepsi dibentuk untuk meredakan resistensi masyarakat, membangun citra dan reputasi, serta agar diakui sebagai *the good corporate citizenship* oleh pemerintah, masyarakat dan *stakeholder* dengan memanfaatkan momentum euforia CSR yang sedang berkembang untuk mewujudkan tujuan atau kepentingan perusahaan (*Self Interest motives*).¹¹ Namun, banyak perusahaan yang menggunakan audit eksternal guna memastikan akuntabilitas laporan tahunan yang memuat kontribusi perusahaan dalam tanggung jawab sosialnya dan sejalan dengan etika bisnis.

CSR sebelumnya merupakan etika bisnis yang tidak tertulis Indonesia. Namun kini telah menjadi aturan hukum yang mempunyai kekuatan legal formal dengan hadirnya Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan adanya Undang-Undang tersebut pada awalnya pengungkapan CSR

Reporting Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia), Jurnal Riset Aksioma Vol. 15, No. 2, 2016, h. 74.

¹⁰Andreas Lako, *Dekonstruksi...* h.70

¹¹*Ibid*, *Dekonstruksi...* h.72

dilakukan secara sukarela (*Voluntary Disclosure*) menjadi menjadi suatu kewajiban (*Mandatory Disclosure*).¹²

Kesadaran tentang pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan mendorong entitas bisnis untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosialnya dengan pelaporan CSR. Banyak perusahaan di berbagai negara termasuk di Indonesia yang melaporkan praktik CSR tersebut, Sejalan dengan penelitian Dewi, *et. al.* tren penelitian pengungkapan di Indonesia selama 14 tahun terakhir dari tahun 2004-2017 penelitian mengenai pengungkapan informasi keuangan di Indonesia mulai berkembang dan mengalami fluktuasi tiap tahunnya baik dari sisi pengungkapan wajib maupun pengungkapan sukarela.¹³Tak terkecuali industri perbankan nasional. Walaupun praktik pengungkapan CSR lebih didominasi oleh perusahaan manufaktur, Perbankan syariah tentu tidak luput dari pelaksanaan CSR ini. Meskipun dalam aktivitasnya tidak berkaitan dengan eksploitasi dalam seperti perusahaan manufaktur. Perbankan syariah memiliki peran yang sangat strategis dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan, karena bank syariah berorientasi bukan memaksimalkan profit semata tapi manfaat yang mengedepankan moralitas dan etika. Meskipun secara hakiki perbankan syariah tidak bisa terlepas dari orientasi bisnis, namun dalam pengembangannya penegakan ajaran islam dalam bermuamalah merupakan tujuan

¹²UUD No.40 Tahun 2007

¹³ Dewi, et.al, *Perkembangan Penelitian di bidang Pengungkapan di Indonesia : Telaah Konseptual*, Jurnal Siasat Bisnis Vol.22 No 1, 2018, h.14

utama. Oleh sebab itu, perbankan syariah telah banyak melaporkan aspek pertanggungjawaban sosial didalam laporan tahunan meskipun relatif sederhana.¹⁴

Eksistensi Indonesia dalam kancah global tidak diragukan lagi, Menurut data indeks keuangan syariah dunia,memiliki kekuatan dan potensi besar keuangan syariah global, yang menempatkan Indonesia di kancah internasional yakni salah satu diantara 10 negara terbesar di bidang keuangan syariah, bersama Malaysia, Arab Saudi, Iran, UEA, Kuwait, Qatar, Bahrain, Turki dan Bangladesh dilihat dari publikasi *Global Islamic Finance Report*.¹⁵ Meskipun secara nasional tidak lebih dari 5% dari seluruh aset keuangan di pasar global, Dari sisi besarnya aset keuangan syariah, Indonesia menempati urutan ke-9 sebagai negara yang memiliki aset keuangan syariah terbesar di dunia dengan total aset keuangan syariah mencapai Rp889,28 triliun atau sekitar US\$66,2 miliar.

Selain pertumbuhan keuangan syariah, perkembangan signifikan juga terlihat pada industri perbankan syariah. BUS memberikan sumbangan terbesar pada peningkatan aset perbankan syariah sebesar Rp40,7 Triliun. Pertumbuhan BUS yang signifikan mulai terjadi dengan adanya konversi BPD Aceh menjadi Bank

¹⁴Nur Hidayati Setyani, *Implementasi kebijakan "Corporate Social Responcibility paba PT.Bank Muamalat Inonesia Kota Semarang*, laporan penelitian Individu, Semarang, 2012, h.5

¹⁵Lihat *Islamic Finance Country Index IFCI 2017*, h.2.

Aceh Syariah.¹⁶ Menurut data yang dipublikasikan dalam Statistik Perbankan Syariah bulan Oktober 2018 oleh Otoritas Jasa Keuangan, perbankan syariah di Indonesia sebanyak 14 Bank Umum Syariah, 20 Unit Usaha Syariah dan 105 Bank Pembiayaan Syariah yang tersebar di seluruh Indonesia dengan jaringan kantor berjumlah 2.493 di seluruh Indonesia. Perkembangan Perbankan syariah yang signifikan membuat tantangan yang harus dihadapi juga semakin berat. Perbankan syariah tidak hanya dituntut untuk meningkatkan profitabilitas atas aset yang dimiliki sehingga meningkatnya kinerja keuangan tetapi juga harus diikuti dengan tingkat kinerja sosial Perbankan Syariah itu sendiri dengan melaporkan aktivitasnya dalam bentuk pengungkapan CSR untuk meningkatkan kepercayaan dari *shareholder dan stakeholder* untuk menjaga akuntabilitasnya. Namun sangat disayangkan bank syariah di Indonesia memiliki kepedulian lingkungan dan sosial yang masih rendah terbukti dengan pernyataan Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowaroyo, masih lemah dalam memberikan pembiayaan sosial yaitu rasio pembiayaan sosial hanya sebesar 1,92 % dari seluruh jumlah pembiayaan yang disalurkan bank syariah.¹⁷

Melihat fakta diatas, perbankan syariah sebagai sebuah perusahaan umum tentunya perlu mengoptimalkan sistem

¹⁶Roadmap OJK , h.8.

¹⁷Hasan Mukhibad , *Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pengungkapan Islamic Sosial Reporting*, Jurnal Akuntansi Multiparadigma Vol.9 No. 2, 2018 h. 299

pengungkapan CSR yang sesuai dengan keunikan bisnisnya. Menurut Othman dan Thani¹⁸, perkembangan perekonomian syariah yang begitu cepat membuat perusahaan-perusahaan berprinsip syariah diekspektasikan untuk menyajikan suatu nilai religi dalam pengungkapan laporan tahunan dalam rangka memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan Muslim. Dengan demikian, dibutuhkan pedoman untuk mengukur sejauh mana perusahaan-perusahaan berprinsip syariah berhasil membuat laporan tahunan dengan menyajikan pemenuhan kewajiban perusahaan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Pengungkapan CSR masih mengacu pada indeks *Global Reporting initiative* (GRI) sebagai pengukuran pelaksanaan CSR. Indeks GRI ini umum digunakan untuk perusahaan konvensional. Tentu kurang tepat jika pengukuran pengungkapan CSR perbankan syariah masih mengacu pada indeks GRI karena pada dasarnya jenis informasi yang akan diungkapkan berbeda.¹⁹ Beberapa penelitian mengungkapkan hal demikian. penelitian Muhammadinah menemukan hasil pengukuran GRI untuk mengukur perbankan syariah kurang optimal yaitu pengungkapan tertinggi hanya sebesar 22% dari jumlah item yang diungkapkan. Hal tersebut karena adanya

¹⁸Rohana Othman, Azlan Md Thani, *Islamic Social Reporting Of Listed Companies In Malaysia*, International Business & Economics Research Journal – April 2010 Volume 9, Number 4, 2010, h. 135.

¹⁹Zanariyatim, *et.al.*, Pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Umum Syariah Berdasarkan Islamic Social Reporting Index (Indeks ISR)*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam Vol. 4, No. 1, 2016, h.87.

beberapa item yang memang tidak mungkin dipenuhi oleh industri perbankan syariah dan memberikan saran perlu adanya item-item pengungkapan laporan keuangan yang sesuai dengan kegiatan operasional industri perbankan syariah agar disetiap indikator dapat dievaluasi dengan baik.²⁰

Sependapat dengan Muhammadiyah, Gustian dan Faisal mengemukakan adanya pengaruh Penggunaan indeks yang sesuai dengan tingkat pengukuran pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Indeks yang cocok dengan tipe perusahaan memungkinkan hasil skoring yang lebih baik karena setiap karakteristik khas yang ada pada tipe perusahaan tersebut dapat diakomodir. Analisisnya tentang perbandingan luas pengungkapan tanggung jawab sosial perbankan konvensional dan perbankan syariah menggunakan indeks yang cocok untuk masing-masing tipe perbankan mendapatkan hasil penggunaan indeks ISR lebih baik dibandingkan penggunaan indeks GRI.²¹ Begitu juga dengan hasil penelitian Merina dan Verawaty membuktikan secara empiris bahwa pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan yang benar-benar beroperasi dengan konsep syariah seperti perbankan syariah ternyata

²⁰Muhammadinah, *Analisis Kelengkapan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Berdasarkan Indeks Global Reporting Initiative (GRI) Pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia*, I-Finance Vol. 2. No. 2, 2016, h.50.

²¹Vena Gustian dan Faisal, *Analisis Perbandingan Penggunaan GRI Indeks dan ISR Indeks Dalam Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Perbankan Indonesia Tahun 2010 – 2013*, Diponegoro Journal Of Accounting Vol.4, No. 4, 2015, h..7.

memang lebih memenuhi indeks ISR dibandingkan perusahaan konvensional.²²

Sudah seharusnya entitas syariah memiliki alat ukur sendiri yang memadai sesuai dengan perspektif syariah agar pengungkapan CSR yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Perbedaan konsep antara entitas konvensional dengan entitas syariah menjadikan alat ukur untuk pengungkapan CSR tersebut berbeda. Menanggapi hal tersebut, *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) mengeluarkan standar yang berkaitan dengan pengungkapan CSR alam perspektif syariah. Adapun pengungkapan CSR perspektif Islam menurut AAOIFI terdiri dari pengungkapan yang bersifat wajib (*mandatory*) dan pengungkapan yang bersifat suka rela (*voluntary*). Namun, hanya secara garis besar dan tidak dapat dijadikan sebuah standar karena tidak menyebutkan item-item CSR yang harus di ungkapkan suatu perusahaan berbasis syariah.²³ Hal tersebut yang mendasari peneliti mulim untuk mengembangkan lebih jauh tentang standar yang tepat untuk pengukuran CSR yang sesuai untuk entitas syariah.

Perkembangan alat ukur pengungkapan CSR secara syariah dimulai oleh Baydoun dan Willett pada tahun 2000 dengan *Islamic*

²²Citra Indah Merina Dan Verawaty , *Analisis Komparasi Indeks Islamic Social Reporting Perusahaan Perbankan Syariah dan Perusahaan Go Publik Yang Listing Di Jakarta Islamic Index*, Jurnal AKUISISI Vol 12 No. 2, 2016, h. 15

²³Amalia Nur Latifah, *Islamic Social Reporting Sebagai Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Perbankan Syariah*, 2016, h.9.

Corporate Reports (ICR), memberikan penjelasan mengenai perbandingan karakteristik pelaporan sistem akuntansi Barat dengan *Islamic Corporate Reports* (ICR) namun hanya beberapa item yang direkomendasikan. Kemudian dilanjutkan oleh Ros Haniffa tahun 2002 dituangkan dalam jurnalnya yang berjudul “*Social Reporting Disclosure : An Islamic Perspective*” mengagagas *Islamic Social Reporting* (ISR) yang hangat diperbincangkan dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Haniffa, ada keterbatasan pada kerangka pelaporan sosial yang dilakukan oleh lembaga konvensional. Keterbatasan tersebut mencakup aspek-aspek spiritual dan moral, sebab dalam prinsip syariah tidak hanya berfokus kepada aspek material saja seperti zakat, status kepatuhan syariah dan transaksi yang sudah terbebas dari unsur riba, serta aspek social seperti sodaqoh, waqof, qordul hasan, sampai dengan pengungkapan peribadahan di lingkungan perusahaan. Karenanya diperlukan sebuah kerangka pelaporan sosial yang berdasarkan prinsip syariah dalam mengembangkan *Islamic Social Reporting* untuk mencapai tujuan akuntabilitas dan transparansi. Dengan tercapainya akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan.²⁴

Pada awalnya Haniffa mencetuskan lima tema, yaitu keuangan dan investasi, produk, karyawan, masyarakat, dan lingkungan.²⁵ Haniffa kemudian mengembangkan metode

²⁴Ros Haniffa, *Social Reporting Disclosure : An Islamic Perspective*, *Indonesian Management & Accounting Research*, Vol 1. No.2, 2002, h. 129.

²⁵Rohana Othman, *ibid.*, h.

pengukuran pengungkapan CSR pada institusi keuangan syariah dengan ISR menggunakan metode analisis isi atau *content analysis*.²⁶ Selanjutnya dikembangkan oleh Othman dengan menambahkan tema tata kelola perusahaan dalam indeks pengukuran pengungkapan laporan keuangan institusi syariah.²⁷ dari penelitian penelitian tersebut terbentuklah format pengukuran pengungkapan tanggungjawab sosial indeks ISR menjadi 6 tema indikator yang terdiri dari item-item.

Islamic Social Reporting (ISR) indeks dibagi menjadi 6 tema yang terdiri dari pendanaan dan investasi, produk dan jasa, karyawan, sosial, lingkungan dan tata kelola perusahaan. Setiap tema terdiri dari item-item menjadi tolak ukur dalam pengukuran setiap tema tersebut kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para peneliti mengenai item-item CSR yang seharusnya diungkapkan oleh suatu entitas syariah untuk mendapatkan alat pengukuran tanggung jawab sosial yang lebih komprehensif.²⁸ *Islamic Social Reporting (ISR)* indeks diyakini dapat menjadi pijakan awal dalam standar

²⁶ Abul Hassan & Sofyan Syafri Harahap, *Exploring Corporate Social Responsibility Disclosure: The Case of Islamic Banks, International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 3 No. 3, 2010, h. 203.

²⁷ Rohana Othman, Azlan Md Thani & Erlane K Ghani, *Determinants of Islamic Social Reporting Among Top Shariah-Approved Companies in Bursa Malaysia, Research Journal of International Studies*, Issue 12, 2009.

²⁸ Soraya Fitria an Hartanti, *Islam dan Tanggung Jawab Sosial : Studi Perbandingan Pengungkapan Berdasarkan Global Reporting Initiative Indeks dan Islamic Social Reporting Indek*, Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto, 2010, h. 4.

pengungkapan CSR yang sesuai untuk entitas syariah. ISR diharapkan memberikan suatu alternatif kontribusi yang baru bagi pelaporan perusahaan secara islami yang tidak hanya berorientasi dunia tetapi juga orientasi akhirat.

Islamic social reporting merupakan standar pelaporan kinerja sosial perusahaan-perusahaan yang berbasis syariah. Secara khusus indeks ini adalah perluasan dari standar pelaporan kinerja sosial yang meliputi harapan masyarakat tidak hanya mengenai peran perusahaan dalam perekonomian, tetapi juga peran perusahaan dalam perspektif spiritual, selain itu indeks ini juga menekankan pada keadilan sosial terkait mengenai lingkungan, hak minoritas, dan karyawan.²⁹ Selain itu, *Islamic Social Reporting* (ISR) menjadi jawaban atas aktivitas tanggungjawab sosial perusahaan saat ini yang kurang menekankan nilai sosial dan lebih menekankan pada nilai materialistik untuk memaksimalkan profit dan mengedepankan kepentingan bisnisnya ketimbang nilai sosial dan ketuhanan, meskipun manusia memiliki hak penuh dalam menentukan pilihan dan tujuan bisnisnya namun alangkah baiknya tetap dalam koridor etika bisnis islam.

Beberapa tahun terakhir, penelitian tentang ISR begitu menarik perhatian para peneliti. Beberapa peneliti mencoba mengkaji lebih dalam tentang pengungkapan tanggungjawab sosial

²⁹Gustani, *Analisis Tingkat Pengungkapan Kinerja Sosial Bank Syariah Berdasarkan Islamic Social Reporting Index (Indeks ISR)*. Skripsi Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (SEBI), 2013,

dengan menggunakan pengukuran ISR indeks dan mendapatkan hasil yang beragam. Diantaranya penelitian Fauziyah dan Yudho³⁰, membandingkan pengungkapan tanggung jawab sosial 7 bank yang menjadi objek penelitian berdasarkan ISR indeks pada tahun 2011 mendapatkan hasil penelitian ini Bank Muamalat Indonesia (BMI) memiliki tingkat pengungkapan tertinggi sebesar 73% dan yang terendah adalah Panin Bank Syariah sebesar 41%.

Virgowati menggunakan sampel 3 bank syariah dengan tahun penelitian 2010-2012 dengan hasil penelitian Perbandingan tingkat kinerja sosial Bank Syariah di Indonesia diketahui bahwa kinerja tertinggi diduduki oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan nilai rata-rata index ISR sebesar 88,16% kemudian diikuti oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) dengan nilai rata-rata ISR sebesar 82,90 dan terakhir Bank Mega Syariah (BMS) dengan nilai rata-rata sebesar 77,64%.³¹Selanjutnya penelitian Brilyanti, menganalisis pengungkapan tanggung jawab sosial perbankan syariah di Indonesia dengan menggunakan Indeks *Islamic Social Reporting* dari tahun

³⁰ Khusnul Fauziyah dan Prabowo yudho, *Analisis Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah Di Indonesia Berdasarkan Islamic Social Reporting Indeks*, Jurnal Dinamika Akuntansi Vol. 5, No. 1, Maret 2013, h. 20.

³¹Virgowati, *Analisis Kinerja Sosial Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Dan Muamalat Indonesia)*. Artikel Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013.

2013-2015.³² Sampel perbankan syariah yang digunakan dalam penelitian ini adalah lima bank syariah dengan aset terbesar di Indonesia. Metode analisis data yang digunakan adalah *Content Analysis* pada Laporan Keuangan maupun Laporan *Good Corporate Governance*. Hasil analisis menunjukkan bahwa Bank Syariah Mandiri merupakan bank syariah yang relatif lebih lengkap dengan nilai rata-rata 73,64%; kemudian berturut-turut diikuti oleh BNI Syariah (65,12%); Bank Muamalat Indonesia (62,79%); Bank Panin Syariah (51,16%); dan BRI Syariah 41,86%. Bentuk kegiatan sosial yang dilakukan oleh masing-masing Bank Syariah lebih didominasi oleh kegiatan sosial.

Dilihat dari beberapa penelitian diatas, menunjukkan bahwa masing- masing indeks ISR yang di hasilkan setiap tahunnya berbeda- beda. Kemudian timbul pertanyaan apakah setiap tahunnya pengungkapan CSR berdasarkan ISR Bank syariah mengalami penurunan sehingga dapat diungguli bank syariah lain. Atau bank syariah lainnya mengalami peningkatan dalam pengungkapan CSR berdasarkan ISR sehingga terjadi pergiliran peringkat dalam pengungkapan CSR berdasarkan indeks ISR. Selain itu penelitian tersebut hanya beberapa Bank Umum Syariah di Indonesia yang dijadikan sampel dengan waktu penelitian yang relatif pendek sehingga penelitian yang dihasilkan kurang dapat digeneralisasikan

³²Farida Ayu Brilyanti, *Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2013 – 2015*, STIE Dewantara, 2016, h. 9.

untuk perbankan syariah secara umum.

Dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian seberapa jauh pengungkapan CSR pada bank syariah menggunakan indeks ISR yang dituangkan dalam judul “ Analisis Perbandingan Tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) berdasarkan *Islamic Social Reporting* (ISR) indeks pada Bank Umum Syariah pada tahun 2016-2018”

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat pengungkapan CSR berdasarkan indeks ISR pada Bank Umum Syariah tahun 2016-2018 tema pendanaan dan investasi?
2. Bagaimana tingkat pengungkapan CSR berdasarkan indeks ISR pada Bank Umum Syariah tahun 2016-2018 tema produk dan jasa?
3. Bagaimana tingkat pengungkapan CSR berdasarkan indeks ISR pada Bank Umum Syariah tahun 2016-2018 tema tenaga kerja?
4. Bagaimana tingkat pengungkapan CSR berdasarkan indeks ISR pada Bank Umum Syariah tahun 2016-2018 tema sosial?
5. Bagaimana tingkat pengungkapan CSR berdasarkan indeks ISR pada Bank Umum Syariah tahun 2016-2018 tema lingkungan?
6. Bagaimana tingkat pengungkapan CSR berdasarkan indeks ISR pada Bank Umum Syariah tahun 2016-2018 tema tata kelola perusahaan?
7. Bagaimana perbandingan tingkat pengungkapan CSR

berdasarkan indeks ISR pada Bank Umum Syariah tahun 2016-2018 dari ke enam tema?

8. Bagaimana predikat tingkat pengungkapan CSR berdasarkan indeks ISR pada Bank Umum Syariah tahun 2016-2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility*(CSR) Bank Umum Syariah di Indonesia berdasarkan *Islamic Social Reporting (ISR)* *index* yang terdiri dari enam tema yaitu: pendanaan dan investasi (*finance and investment theme*), produk dan jasa (*product and services theme*), tenaga kerja (*employees theme*), sosial (*society theme*), lingkungan (*enviroment theme*) dan tata kelola perusahaan (*corporate governance theme*) serta memberikan predikat berdasarkan tingkat pengungkapan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak terkait. Seperti lembaga pendidikan, ilmu pendidikan ataupun lembaga terkait. Adapun manfaat dari penelitian ini:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dalam pengembangan ilmu pengetahuan:

- a) Sebagai bahan pengembangan kajian dalam pendalaman isu *Corporate Social Responsibility* (CSR) Bank Umum Syariah.
- b) Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang

sejenis.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dalam dunia praktis atau lembaga terkait:

- a) Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi positif kepada para pelaku bisnis, khususnya perbankan syariah dalam menjalankan praktik pengungkapan CSR nya dengan mengacu kepada indeks ISR.
- b) Penelitian ini diharapkan dijadikan bahan evaluasi oleh Dewan Pengawas Syariah untuk mengawasi praktik kinerja perusahaan.
- c) Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh Bank Indonesia dalam membuat standar pelaporan CSR perbankan syariah di Indonesia.
- d) Dari hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pengungkapan CSR perbankan syariah sebagai tanggungjawab sosial untuk meningkatkan respon positif masyarakat.

1.5 Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada Bank Umum Syariah (BUS) yang telah mempublikasi *annual report*, laporan *Good Corporate Governance* (GCG) atau laporan keberlanjutan untuk periode tahun 2016-2018 pada *website* resmi masing-masing.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan teori memuat kajian teori yang relevan dengan masalah yang diteliti, dan penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian berisikan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini, yang berisi jenis penelitian, data dan pemilihan sampel, dan teknik analisis data,.

Bab IV Perbandingan tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* Bank Umum Syariah berdasarkan *Islamic Social Reporting (ISR) index* dan hasil analisis tingkat pengungkapan CSR Bank Umum Syariah berdasarkan indeks ISR.

Bab V Penutup berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang berguna bagi penelitian serupa di masa yang akan datang.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*)

Teori yang melandasi motivasi perusahaan melakukan pengungkapan CSR dalam perusahaan yaitu teori legitimasi yang membahas tentang hubungan perusahaan dan masyarakat secara keseluruhan.

Teori legitimasi merupakan faktor penting bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan. Peningkatan legitimasi berkaitan erat dengan kontribusi perusahaan mengenai etika bisnis, pengembangan kinerja karyawan, dampak terhadap lingkungan. Kepedulian perusahaan terhadap lingkungan ditunjukkan melalui environmental disclosure yang akan berdampak positif untuk jangka panjang perusahaan.³³ Legitimasi penting bagi perusahaan terkait batasan berupa norma-norma dan nilai-nilai sosial sehingga mendorong operasional perusahaan agar memperhatikan nilai-nilai sosial di lingkungan perusahaan.³⁴

³³Isnani Fashikhah *et. al.*, *Determinan Environmental Disclosures Perusahaan Manufaktur Di Indonesia Dan Malaysia*, Jurnal Akuntansi Indonesia, Vol. 7 No. 1 Januari 2018, h.35.

³⁴Puspha Sonia, *et.al* , *Pengaruh Pembiayaan, Kas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Islamic Social Reporting (ISR) Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening*, Jurnal Ekonomi Vol. 25, No. 1 Maret 2017. h.18

Teori legitimasi seringkali dianggap sebagai kontrak sosial antara perusahaan dengan masyarakat. Dimana perusahaan memiliki tanggungjawab sosial kepada masyarakat untuk memberikan kebermanfaatan dan kesejahteraan yang harus didukung dengan pengungkapan, publikasi dan melaporkan segala aktivitasnya didalam laporan tahunan perusahaan. Hal tersebut yang melatarbelakangi perusahaan melakukan pelaporan secara sukarela yang dilaporkan dalam bentuk pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk menjamin operasi perusahaan sudah sesuai dengan batas norma yang berlaku di masyarakat dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat.³⁵

Teori Legitimasi merupakan teori yang berhubungan erat dengan teori stakeholder. sehingga Legitimasi akan terus mengalami pergeseran seiring dengan perubahan lingkungan dan masyarakat dimana perusahaan berada.³⁶

2.2 Teori Stakeholder (*Stakeholder Theory*)

Istilah stakeholder diperkenalkan pertama kali oleh *Standford Research Institute* (SRI) di tahun 1963 yang berarti

³⁵Siti Sara Rostiani & Tuntun A. Sukanta, *Pengaruh Dewan Pengawas Syariah, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012-2016)*, Vol. 4 No. 2. September 2018, h. 1229

³⁶Lin Lindawati dan Marsella Eka Puspita, *Corporate Social Responsibility: Implikasi Stakeholder dan Legitimacy Gap Dalam Peningkatan Kinerja Perusahaan*, Jurnal Akuntansi Multiparadigma (JAMAL) Vol.6, No.1, Malang, April 2015, h.163.

pemangku kepentingan. Menurut Nor Hadi,³⁷ *Stakeholder* adalah semua pihak baik internal maupun eksternal yang memiliki hubungan baik bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan. Definisi *stakeholder* telah berubah selama empat dekade terakhir. Pada awalnya, pemegang saham dianggap sebagai satu-satunya stakeholder perusahaan. Orientasi perusahaan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan para pemilik dan kreditur saja tentu merupakan cara pandang lama dan sudah tidak relevan lagi.³⁸ Pandangan ini lahir dari argumen Milton Friedman (1962) yang mengatakan bahwa tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimalkan laba untuk kemakmuran pemiliknya.³⁹ Padahal, orientasi bisnis yang hanya mengutamakan laba mendorong perusahaan bertindak pragmatis dengan mengeksploitasi dalam tanpa memikirkan dampak yang akan ditimbulkan kepada masyarakat sekitar. dan pada akhirnya akan menjadi bumerang untuk perusahaan itu sendiri dalam jangka panjang.⁴⁰

Freeman memiliki pandangan yang berbeda dengan Friedman. Menurut Freeman *stakeholder* didefinisikan sebagai

³⁷Nor hadi, *Corporate Social Responsibility*, edisi pertama, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014 h. 93

³⁸Andreas Lako, *Dekonstruksi CSR & Reformasi Paradigma Bisnis & Akuntansi*, Erlangga: Jakarta, 2011, h.25.

³⁹Yunus Handoko, *Implementasi Social and Environmental Disclosure dalam Perspektif Teoritis*, Jurnal JIBEKA, Vol.8 No.2, 2014, hlm.74.

⁴⁰*Ibid*, *Dekonstruksi...*, h. 43.

sebuah organisasi, grup atau individu yang dapat dipengaruhi dan mempengaruhi tujuan organisasi.⁴¹ Jika menurut Friedman stakeholder hanya pemegang saham, Ia memperluas definisi stakeholder bukan hanya pihak-pihak yang bersimbiosis mutualisme dengan perusahaan tetapi memasukkan kelompok yang dianggap tidak menguntungkan seperti pihak-pihak yang bukan pemilik perusahaan, bukan pemimpin perusahaan dan bukan pula karyawan namun memiliki kepentingan dan dipengaruhi oleh keputusan serta tindakan yang dilakukan oleh perusahaan.⁴²

Stakeholder dibagi menjadi 2 yaitu *stakeholder* primer dan *stakeholder* sekunder.⁴³ Stakeholder primer merupakan pihak-pihak yang memiliki hubungan langsung dengan perusahaan dan dilibatkan secara berkelanjutan karena keberadaannya sangat krusial bagi keberadaan perusahaan dalam jangka waktu yang lama. *Stakeholder* primer terdiri dari pemegang saham, manager, pekerja, konsumen, distributor dan *stakeholder* publik seperti pemerintah dan penyedia fasilitas infrastruktur dalam mengatur aktivitas bisnis. Ketergantungan antara *stakeholder* primer dengan perusahaan menjadi sangat vital.

⁴¹ Freeman, R. E., *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Pitman Publishing, Boston. 1984.

⁴² Muhammad Luthfi, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dan Kinerja Perusahaan (literature review)*, Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen, Vol. 2, No. 2, Desember 2013, h. 124.

⁴³ Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Teori dan Praktik*, Edisi pertama, Depok : Kencana, 2017, h. 38.

Stakeholder sekunder merupakan pihak yang tidak memiliki kepentingan langsung dengan aktivitas perusahaan. Akan tetapi, keberadaannya patut dipertimbangkan karena dapat memberikan efek positif maupun negatif bagi aktivitas perusahaan. *Stakeholder* sekunder meliputi media elektronik ataupun surat kabar. Meskipun tidak berhubungan langsung, jika tidak diperhatikan memungkinkan akan memberikan efek yang signifikan bahkan menghancurkan perusahaan jika tidak dikelola dengan baik. Sebagaimana citra dan reputasi perusahaan sangat penting bagi penilaian masyarakat.

Teori *stakeholder* menjelaskan bahwa perusahaan harus memberikan perhatian khusus dan menghadirkan manfaat bagi stakeholdernya meliputi pemerintah, supplier, konsumen, dan masyarakat luas. dukungan stakeholder memberikan power untuk perusahaan agar usahanya semakin berkembang. Pengungkapan sosial merupakan bagian dari dialog antara perusahaan kepada *stakeholdernya*.⁴⁴

Menurut Thomas dan Andrew, dalam Nor Hadi,⁴⁵ teori stakeholder memiliki beberapa asumsi sebagai berikut:

⁴⁴Yunus Handoko, *Implementasi Social and Environmental Disclosure dalam Perspektif Teoritis*, Jurnal JIBEKA, Vol.8 No.2, 2014, h. 74.

⁴⁵Noor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014, h.94

1. Perusahaan memiliki hubungan dengan banyak kelompok *stakeholder* yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan perusahaan.
2. Teori ini ditekankan pada sifat alami hubungan dalam proses dan keluaran bagi perusahaan dan *stakeholdernya*.
3. Kepentingan seluruh legitimasi *stakeholder* memiliki nilai secara hakiki, dan tidak membentuk kepentingan yang didominasi satu sama lain.
4. Teori ini memfokuskan pada pengambilan keputusan manajerial. Teori stakeholder menjelaskan pengungkapan CSR perusahaan sebagai cara untuk berkomunikasi dengan *stakeholder*.

Implikasinya adalah perusahaan akan secara sukarela melaksanakan CSR, karena pelaksanaan CSR adalah merupakan bagian dari peran perusahaan ke *stakeholder*. Teori ini jika diterapkan akan mendorong perusahaan melaksanakan CSR.⁴⁶

2.3 Pengungkapan (*Disclosure*)

Pengungkapan (*disclosure*) memiliki arti menampakkan sesuatu, atau menguraikan, tidak menutupi dan tidak menyembunyikan. Jika dihubungkan dengan laporan keuangan maka *disclosure* berarti informasi yang seharusnya diungkapkan

⁴⁶ Farida Efriyanti et, al., *Analisis Perbandingan Pengungkapan Dan Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Terhadap PT.Bank Negara Indonesia* , Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol. 3, No. 2, September 2012, h. 272.

sesuai dengan peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) bahwa dalam laporan keuangan tidak boleh ada yang disembunyikan dan tidak ditutupi. Pengungkapan secara sederhana dapat diartikan sebagai pengeluaran informasi (*the release of information*).⁴⁷

Menurut Suwardjono,⁴⁸ Pengungkapan memiliki 2 arti secara konseptual dan secara teknis. Secara konseptual, pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan. Secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh statemen keuangan. Pengungkapan informasi berkaitan dengan hal-hal yang terdapat dalam laporan keuangan dan pengukurannya yang dapat disajikan oleh catatan laporan keuangan atau di muka laporan keuangan, oleh informasi tambahan, atau oleh cara-cara pelaporan keuangan.

Menurut Evans dalam Suwardjono mengartikan pengungkapan sebagai berikut:

“Disclosure means supplying information in the financial statements themselves, the notes to the statements, and the supplementary disclosure associated with the statements. It does not extend to public or private statements by made

⁴⁷ Muhammadiyah, *Analisis Kelengkapan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Berdasarkan Indeks Global Reporting Initiative (GRI) Pada Bank Umum Syariah (BUS) Di Indonesia*, I-finance Vol.2 No.2 Desember 2016, h.37-38.

⁴⁸ Suwardjono, *Teori Akuntansi, Perencanaan Pelaporan Keuangan*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama , 2011, h. 578.

management or information provided outside the financial statement.”

Evans membatasi definisi pengungkapan pada hal-hal penyediaan informasi dalam laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan dan penungkapan yang berkaitan dengan laporan keuangan.

Pengungkapan menuntut lebih dari sekedar pelaporan keuangan tetapi meliputi pula penyampaian informasi kuantitatif, maupun kualitatif. Pengungkapan seringkali berkaitan dengan dengan 4 hal yaitu pihak-pihak yang menggunakan informasi pengungkapan laporan , tujuan pengungkapan, informasi apa saja yang harus diungkapkan dan waktu pengungkapan. pengungkapan menuntut lebih dari sekedar pelaporan keuangan tetapi meliputi pula penyampaian informasi kuantitatif, maupun kualitatif. 4 hal tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. *Pertama*, investor dan kreditor merupakan pihak yang dituju oleh pelaporan keuangan, sehingga pengungkapan ditujukan terutama untuk mereka. Namuns, pengungkapan yang dilakukan perusahaan pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi para pemangku kepentingan, seperti investor, kreditor, pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak lain yang terkait. Beragam pihak yang dituju dan model pengambilan keputusan yang kurang dapat diidentifikasi, pengungkapan cenderung untuk meluas dan jarang menjadi sempit atau spesifik.

2. *Kedua*, secara umum, tujuan pengungkapan adalah menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Dalam implementasinya, investor dan kreditor bervariasi dalam hal kecanggihannya (*sophistication*). sehingga pengungkapan dapat diwajibkan untuk melindungi (*protective*), informatif (*informative*), dan melayani kebutuhan khusus (*differential*).
3. *Ketiga*, seberapa banyak informasi yang harus diungkapkan, disebut dengan tingkat pengungkapan (*levels of disclosure*). Secara umum, menurut Hendriksen dan Breda dan Evan dalam Raditya, ada tiga konsep pengungkapan antara lain:
 - a. *Adequate Disclosure* (Pengungkapan Cukup)

Pengungkapan cukup adalah pengungkapan minimum yang harus dipenuhi agar laporan tidak menyesatkan untuk kepentingan pengambilan keputusan.
 - b. *Fair Disclosure* (Pengungkapan Wajar)

Pengungkapan wajar adalah pengungkapan yang harus dicapai agar semua pihak mendapat informasi yang sama.
 - c. *Full Disclosure* (Pengungkapan Penuh)

Pengungkapan penuh adalah pengungkapan yang menuntut penyajian dan pengungkapan secara penuh atas seluruh informasi yang relevan dengan pengambilan keputusan. Pengungkapan penuh bertujuan agar laporan

keuangan menjadi efektif dan menyaratkan semua informasi disajikan dapat dipahami dan tepat waktu. Dengan demikian pengungkapan penuh akan memenuhi kepentingan stakeholder.

Konsep yang paling sering digunakan adalah *adequate disclosure* (pengungkapan cukup), yaitu pengungkapan minim yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku dimana pada tingkat ini investor dapat menginterpretasikan angka-angka dalam laporan keuangan. Konsep *fair disclosure* (pengungkapan wajar) mengandung sasaran etis dengan menyediakan informasi yang layak terhadap investor potensial. Sedangkan *full disclosure* (pengungkapan penuh) memiliki kesan penyajian laporan keuangan yang berlebihan sehingga banyak pihak berpendapat bahwa *full disclosure* merupakan konsep yang dapat merugikan perusahaan.⁴⁹

4. *Keempat*, waktu pelaksanaan pengungkapan sangat bergantung kepada standar yang diberlakukan di perusahaan dan regulasi yang berlaku. namun, pengungkapan wajib di laporkan setiap tahun dan dituangkan dalam laporan keuangan.

⁴⁹Ririn Irmadaryani, *Pengungkapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial(Corporate Social Responsibility Disclosure) sebagai Pengungkapan Sukarela Kebutuhan Informasi Stakeholder pada Official Website Perusahaan (Studi Pada Pt. Indosat Tbk)*, 2010.

Informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikelompokkan berdasarkan sifatnya :

1. Pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*)

Pengungkapan wajib adalah pengungkapan informasi yang diwajibkan dalam laporan tahunan perusahaan yang diwajibkan dan diatur oleh suatu peraturan pasar modal. Peraturan mengenai pengungkapan informasi dalam laporan keuangan di Indonesia dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM dan LK) melalui Surat Edaran Nomor SE-02/PM/2002 yang direvisi pada Surat Edaran Nomor SE-02/BL/2008 kemudian direvisi kembali pada Surat Edaran Nomor SE-03/BL/2011 tentang Pedoman dan Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik yang menjelaskan tentang penyediaan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan ekonomi.⁵⁰

2. Pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*)

Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan informasi melebihi yang diwajibkan karena dipandang relevan

⁵⁰ Ery Hidayanti dan Sunyoto, *Pentingnya Pengungkapan (Disclosure) Laporan Keuangan Dalam Meminimalisasi Asimetri Informasi (Kajian Literatur Dan Riview Beberapa Artikel Penelitian Terkait Pengungkapan)*, Jurnal WIGA Vol. 2 No. 2, September 2012, h. 24-25.

dengan kebutuhan pemakai laporan keuangan. pengungkapan yang dilakukan perusahaan di luar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas. Manajemen menyampaikan informasi yang dapat meningkatkan kredibilitasnya dan kesuksesan perusahaan meskipun informasi tersebut tidak diwajibkan. Beberapa penelitian akademik juga menunjukkan bahwa makin besar perusahaan makin banyak pengungkapan sukarela yang disampaikan.

Secara ringkas dapat diambil kesimpulan bahwa pengungkapan wajib disyaratkan oleh pihak tertentu seperti pengawas pasar modal sedangkan pengungkapan sukarela tidak disyaratkan oleh pihak manapun.

2.4 Corporate Social Responsibility(CSR)

Istilah *Corporate Social responsibility* (CSR) diperkenalkan pertama kali dalam tulisan *Social Responsibility of the Businessman* tahun 1953.CSR digagas Howard Rothmann Browen untuk mengeliminasi keresahan dunia bisnis.⁵¹ Meskipun Konsep CSR sudah lama diperbincangkan, konsep tersebut masih sulit didefinisikan dengan tepat. CSR didefinisikan luas dan

⁵¹Wargianti dan Budhisulistiyawati, “*Studi Tentang CSR (Corporate Social Responsibility) Di PT Madubaru Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*”, Jurnal Universitas Sebelas Maret Surakarta Privat Law Vol: 6 No: 1, 2018, h. 14.

beragam oleh para ahli dan peneliti meskipun memiliki esensi yang sama.⁵²

Menurut Bowen, CSR ialah suatu keputusan bisnis untuk memberikan nilai-nilai kebaikan kepada masyarakat. berdasarkan teori Elkington, CSR adalah sebuah konsep bagi sebuah organisasi atau perusahaan yang mempunyai kewajiban mempertimbangkan kepentingan pengguna, pekerja, pemegang saham, masyarakat, lingkungan sekitar dalam seluruh aspek operasionalnya. Kewajiban ini berlaku secara luas diluar kewajiban yang telah ditetapkan oleh undang-undang.⁵³

The world Bussines council for sustainable Development (WBCSD) yang merupakan lembaga internasional yang berasal dari 30 negara dunia lewat publikasinya “ *Making Good Bussiness Sense*” mendefinisikan CSR:

“Continuing comitment by bussiness to behave ethically and contributed to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local comunity and society at large”

Definisi tersebut menunjukkan bahwa CSR merupakan tindakan etis yang diarahkan untuk meningkatkan ekonomi,

⁵²Noor Hadi ,*Corporate Social Responsibility*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014, h.46

⁵³ Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Teori dan Praktik*, Edisi pertama, Depok : Kencana, 2017, h.28.

peningkatan kualitas karyawan dan keluarganya serta peningkatan hidup masyarakat luas.

Ghana dalam Hadi, juga mendefinisikan CSR sebagai berikut :

“CSR is about capacity building for sustainable livelihoods. It respect cultural differences and finds the business opportunities in building the skills of employees the community and the government”. Lebih lanjut dinyatakan,... *“corporate social responsibility is about business giving back to society”*.

Ia mencoba menjelaskan, bahwa sesungguhnya tanggungjawab sosial perusahaan memberikan kapasitas dalam membangun *corporate building* menuju terjaminnya *going concern* perusahaan. Termasuk *respect* terhadap adopsi kearifan lokal kedalam strategi bisnis perusahaan.⁵⁴

Menurut UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, yang dimaksud dengan tanggungjawab sosial perusahaan adalah tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan penanam modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Sedang UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pasal satu butir tiga menyebutkan tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta

⁵⁴*Ibid, Norhadi,.. h. 46*

dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa CSR adalah suatu bentuk komitmen dan tanggungjawab perusahaan terhadap semua pihak yang berkepentingan dalam bentuk rangkaian kegiatan aktif perusahaan ditengah-tengah masyarakat untuk pembangunan kualitas kearah yang lebih baik dalam berbagai dimensi kehidupan.

Menurut saidi dan abidin dalam Suharto yang dikutip oleh Gustani⁵⁵, ada tiga tahap atau paradigma yang berbeda yang mendorong perusahaan melakukan CSR.

1. Tahap pertama adalah *corporate charity*, yakni dorongan amal berdasarkan motivasi keagamaan.
2. Tahap yang kedua adalah *corporate philanthropy*, yakni dorongan kemanusiaan yang biasanya bersumber dari norma dan etika universal untuk menolong sesama dan memperjuangkan pemerataan sosial.
3. Tahap ketiga adalah *corporate citizenship*, yaitu motivasi kewargaan demi mewujudkan keadilan sosial berdasarkan prinsip keterlibatan sosial.

⁵⁵Gustani ,*Analisis Tingkat Pengungkapan Kinerja Sosial Bank Syariah Berdasarkan Islamic Social Reporting Index (Indeks ISR)* ,Skripsi, STEI SEBI, 2015, h.15.

Ada beberapa hal yang mendorong perlunya keterlibatan perusahaan dalam program CSR antara lain:⁵⁶

- a. Kebutuhan dan harapan masyarakat yang semakin berubah. Untuk menghadapi persaingan bisnis yang sangat ketat agar tetap bisa survive, maka perbankan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, melainkan harus peka terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat yang selalu berubah.
- b. Terbatasnya sumber daya alam. Dengan adanya sumber daya alam yang sangat terbatas, maka usaha perbankan syariah juga harus menggunakannya SDA seefisien mungkin.
- c. Menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik. CSR yang diimplementasikan bank syariah akan memberikan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan memberikan lingkungan sosial yang seimbang.
- d. Mengimbangi antara tanggung jawab dan kekuasaan. Bisnis sangat mempengaruhi lingkungan, konsumen, kondisi masyarakat, kehidupan moral dan budaya masyarakat. Maka, kekuasaan yang sangat besar ini harus diimbangi dengan program tanggung jawab sosial agar kekuasaan yang tak terbatas bisa dikendalikan.

⁵⁶ Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, Yogyakarta: Kanisius, 1998, Hlm. 129-132

- e. Keuntungan jangka panjang. Keterlibatan sosial merupakan nilai yang sangat positif bagi perkembangan dan kelangsungan jangka panjang. Karena bank syariah yang bersangkutan akan mendapatkan citra positif dimata masyarakat. Tidak bisa disangkal lagi, bahwa bisnis akan tetap bertahan jika kepentingan semua pihak dapat diperhatikan dan terpenuhi.

Pelaksanaan CSR akan berdampak positif bagi perusahaan tersebut. Menurut Susanto dalam Gustani,⁵⁷ CSR memiliki beberapa manfaat bagi perusahaan sebagai berikut :

1. CSR akan mengurangi resiko dan tuduhan terhadap perlakuan tidak pantas yang diterima oleh perusahaan. perusahaan yang konsisten melaksanakan CSR akan mendapatkan dukungan luas dari komunitas yang merasakan manfaat dari aktivitas yang dijalankan.
2. CSR dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu perusahaan meminimalkan dampak buruk yang diakibatkan suatu krisis. Demikian pula ketika perusahaan diterpa kabar miring bahkan ketika perusahaan melakukan kesalahan, masyarakat lebih mudah memahami dan memaafkan.
3. Keterlibatan dan kebanggaan karyawan. Karyawan akan merasa bangga bekerja pada perusahaan yang memiliki reputasi baik, yang secara konsisten melakukan upaya untuk

⁵⁷ *Ibid, Gustani,..* h. 15.

meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

4. CSR akan memperbaiki dan mempererat hubungan antara perusahaan dengan para *stakeholdernya*.
5. CSR akan meningkatkan penjualan produk. Dalam riset *Roper Search Worldwide* mengungkapkan bahwa konsumen akan lebih menyukai produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang konsisten menjalankan CSR.

2.5 Corporate Social Responsibility(CSR) dalam perspektif Islam

Memahami konsep *Corporate Social Responsibility* dari sudut pandang Islam sangat penting. Konsep CSR dalam perspektif islam didasarkan pada tanggungjawab kepada Allah, kepada manusia, dan tanggungjawab kepada alam. Hubungan ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pelaksanaannya pun memiliki nilai falsafah yang digali dari Al-Quran dan As-sunnah yang kemudian menjadi pedoman dalam berbagai aktivitas kehidupan tidak terkecuali dalam pelaksanaan CSR pada perusahaan-perusahaan yang dibangun berdasarkan nilai-nilai islam. Konsep CSR dalam Islam bukanlah perkara asing. Bahkan konsep ini sudah ada sejak 14 abad silam. Pembahasan mengenai tanggungjawab sosial sering dibahas dalam Al-Quran dan As-sunnah.⁵⁸ Lembaga

⁵⁸Muhammad yasir yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) pada lembaga keuangan syariah (LKS) teori dan praktik*, Depok : Kencana, edisi pertama, 2017, h. 10-11

yang menjalankan bisnisnya berdasarkan syariah pada hakekatnya mendasarkan pada filosofi dasar Al Qur'an dan Sunah, sehingga menjadikan dasar bagi pelakunya dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sesamanya. Oleh karenanya ikatan hubungan antara institusi dengan lingkungannya dalam konsep syariah akan lebih kuat ketimbang dalam konsep konvensional.⁵⁹

Berdasarkan kajian terdahulu, para peneliti merumuskan prinsip-prinsip CSR Islam dengan berbagai pendekatan. Telaah prinsip-prinsip Islam tersebut terangkum dalam 5 prinsip-prinsip utama dalam pelaksanaan CSR Islam yang telah digariskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah :

a. Prinsip Tauhid

Prinsip Tauhid merupakan suatu keyakinan yang menegaskan bahwa hanya Allah SWT yang telah menciptakan dan mengatur alam semesta ini. Hal ini difirmankan oleh Allah dalam surat QS. Yusuf ayat 40 :

..... أَمَرَ إِلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّا
أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

“Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”.
(QS.Yusuf:40)

⁵⁹ Sofyani, et.al .*Islamic Social Reporting Index Sebagai Model pengukuran Kinerja Sosial Perbankan Syariah: Studi Komparasi Malaysia dan Indonesia*, Jurnal Dinamika Akuntansi Vol.4 No.1, Maret, 2012, h.37.

Dasar utama yang harus diyakini bahwa setiap aspek kehidupan, segala aktivitas ekonomi, politik dan sosial dan budaya harus menjadikan Allah SWT sebagai Tujuan utama.

Rasulullah juga bersabda dalam hadis Qudsi riwayat al-Tirmidzi yang artinya:

“Allah SWT berfirman : Wahai anak adam, kerjakan ibadah semata-mata untuk-Ku niscaya aku penuhi dadamu dengan kekayaan dan aku penuhi dadamu dengan kesibukan dan aku tidak menutup kemiskinanmu”.

Dari ayat dan Hadist diatas menjelaskan bahwa inti sari ajaran Tauhid adalah penyerahan diri dan mengabdikan kehidupan sepenuhnya kepada kehendak Allah SWT. Dalam konteks pelaku bisnis, harus senantiasa mengikuti aturan Allah yakni melakukan transaksi bisnis yang halal, beretika dan tidak merugikan orang lain.

b. Prinsip Khalifah

Istilah khalifah merujuk pada peranan manusia untuk memanfaatkan, mengembangkan, menginfakkan, dan menggunakan harta milik Allah SWT untuk kesejahteraan manusia. Prinsip ini ditegaskan dalam Al-Quran dalam QS. Al-Baqarah ayat 30 :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".

Sebagaimana dalam hadist Rasulullah bersabda dalam Hadis Riwayat Tirmidzi yang artinya:

“Sesungguhnya dunia itu adalah Hijau serta manis dan sesungguhnya Allah SWT menjadikan kamu sebagai Khalifah (orang yang mengurus) padanya. Lalu Allah SWT memandang bagaimana kamu beramal dengannya...” (HR. Tirmidzi : Hadis No.2286)

Prinsip ini erat kaitannya dengan prinsip tauhid dimana seluruh harta milik Allah jadi tidaklah berlebihan jika Allah mewajibkan manusia untuk membelanjakan hartanya dengan jalan kebaikan. Pelaksanaan prinsip khalifah ini dalam menjalankan perusahaan dituntut untuk memaksimalkan fungsi dan peran LKS guna meningkatkan dan

memberdayakan pertumbuhan ekonomi seluruh stakeholder. Dan memastikan keuntungan yang didapat adalah dari keuntungan yang dibenarkan oleh Islam.

c. Prinsip Keadilan

Pengertian keadilan berkisar antara makna keseimbangan atau tidak berat sebelah. Keadilan merupakan suatu konsep yang menciptakan keseimbangan, keharmonisan apabila ditegakkan.

Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

Rasulullah SAW bersabda yang artinya :

“Seorang buruh / karyawan berhak paling sedikit memperoleh makanan dan pakaian yang baik dengan ukuran yang layak dan tidak dibebani dengan pekerjaan yang diluar batas kemampuannya”.(HR. Malik t.th: 2:980).

Pemerataan pendapatan dan kekayaan dalam konsep keadilan ekonomi Islam menekankan setiap individu mendapat jaminan serta tingkat hidup yang terhormat

.pemerataan pendapatan bukan berarti memperoleh gaji yang sama tetapi setiap orang memiliki kemampuan dalam tingkat produksi yang berbeda-beda. Maka islam menciptakan rangka pemerataan pendapatan dan kekayaan dengan jalur zakat, sedekah, wakaf, infak, hadiah dan hibah. Ini semua instrumen yang digunakan dalam Islam untuk menekankan orang kaya untuk berlaku adil dari kekayaan yang dititipkan Allah SWT kepada mereka.

Pelaksanaan CSR secara Islam wajib dijiwai dengan nilai-nilai keadilan untuk mengurangi jurang ekonomi antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin serta sebagai prinsip utama untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi terhadap semua *stakeholder*.

d. Prinsip Ukhuwah

Ukhuwah diartikan sebagai persaudaraan. Arti kata ini memberi kesan bahwa persaudarann mesharuskan adanya perhatian semua pihak yang merasa bersaudara. Hal ini tercermin dalam ayat :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا
اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah SWT supaya kamu mendapatkan rahmat “ (QS. Al Hujurat :10)

Persaudaraan yang terjalin dibangun atas landasan iman dan akidah. Peinsip persaudaraan menekankan bahwa dalam pelaksanaan CSR sesama pihak berkepentingan saling membantu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan kelestarian tanpa merugikan satu dan lainnya.

e. Prinsip Masalah

Tujuan tertinggi dalam syariat adalah untuk menegakkan dan memelihara kemaslahatan serta menolak mafsadah. Hal ini sesuai dengan pengutusan Rasulullah ke muka bumi yaitu sebagai rahmat ke seluruh alam. Tercermin dalam firman Allah :

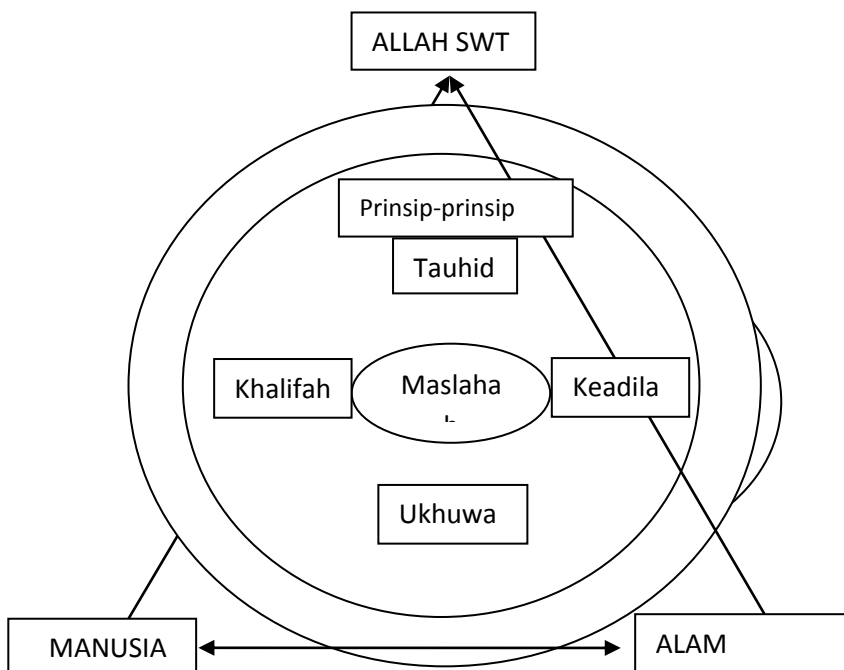
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tidak kami mengutusmu melainkan rahmat bagi sekalian alam.” (QS. Al-anbiya : 107)

Ada dua landasan dasar pemeliharaan kemaslahatan atau maqasid al syariah yang bisa dijadikan kebijakan oleh perusahaan untuk melaksanakan CSR . pertama melakukan CSR untuk memelihara hal-hal yang menjamin terciptanya kemaslahatan. Kedua, menolak dan menyingkirkan semua kemungkinan mafsadah yang terjadi atau akan terjadi dilingkungan perusahaan.

Hubungan antara tanggung jawab CSR dan prinsip-prinsip dasar Islam dapat disajikan dalam gambar berikut:

Gambar 2.1 konseptual pelaksanaan CSR Berdasarkan prinsip-prinsip Islam



Konsep CSR dalam perspektif Islam dilaksanakan dalam bentuk tiga tanggung jawab, pertama yaitu tanggung jawab kepada Allah SWT, kedua hubungan tanggungjawab kepada sesama manusia, ketiga, hubungan tanggungjawab terhadap alam sekitar. Ketiga bentuk pertanggungjawaban ini tidak boleh dipisahkan satu sama lainnya dalam pelaksanaan CSR. Untuk merealisasikan ketiga hubungan tersebut

memerlukan prinsip-prinsip dasar yang satu sama lainnya saling berkaitan yaitu prinsip tauhid, prinsip khalifah, prinsip keadilan, prinsip ukhuwah dan prinsip masalah. Jika kelima prinsip ini dijalankan dengan baik maka pelaksanaan CSR secara Islam akan dapat menyelesaikan dan meringankan masalah sosial baik dalam internal perusahaan atau didalam pemberdayaan masyarakat.

2.6 Perbankan Syariah

2.6.1 Pengertian Perbankan Syariah

Perbankan syariah merupakan lembaga intermediasi keuangan, yakni lembaga yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan.⁶⁰

Undang-Undang Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008 menyebutkan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.⁶¹ Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit

⁶⁰ Abdul Ghafur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2007 h.65.

⁶¹ UUD No.21 Tahun 2008

Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Unit Usaha Syariah (UUS), adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Berdasarkan hal tersebut, maka Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak diperkenankan menerbitkan rekening giro, ikut dalam kliring dan inkaso, dan aktivitas jasa di bidang lalu lintas pembayaran.⁶²

⁶² Khotibul Umam, *Trend pembentukan Bank Umum Syariah pasca undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 (konsep, regulasi dan implementasi)*, edisi pertama, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009, h.45.

2.6.2 Landasan Hukum Perbankan Syariah

2.6.2.1 Landasan Hukum Islam

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا
 يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ
 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah : 275)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَ
 الرِّبَا وَمُؤْكَلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

dari Jabir dia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melaknat pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya.” Dia berkata, “Mereka semua sama.” (HR. Muslim)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 الرِّبَا سَبْعُونَ حُوبًا أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ

“Dari Abu Hurairah ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Riba itu mempunyai tujuh puluh tingkatan, yang paling ringan adalah seperti seseorang yang berzina dengan ibunya.” (HR Ibn Majah, Bab Taghliid Fir riba, No. 2265)

2.6.2.2 Landasan hukum positif

Dikeluarkannya Paket Oktober (Pakto) 1988 oleh pemerintah yang memperkenankan berdirinya bank-bank baru menjadi awal pijakan masa depan bank syariah. Kemudian dikeluarkannya Undang-undang No.7 Tahun 1992 Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan pendirian bank syariah atau bank bagi hasil dalam pasal-pasal nya namun dalam pasal 6 menyebutkan bahwa memberikan batasan bahwa bank bagi hasil tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil (bunga) sebaliknya pula bank yang kegiatan usaha tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil. Secara tidak langsung memberikan pilihan kepada bank untuk memberikan imbalan dalam bentuk bunga atau bagi hasil.

Hadirnya UU No. 10 Tahun 1998 secara tegas menggunakan kata *bank syariah* dan mengatur secara jelas bahwa bank, baik bank umum dan BPR, dapat beroperasi dan melakukan pembiayaan berdasarkan pada prinsip syariah. Bank telah beroperasi secara ganda (*dual system bank*). Bank umum dimungkinkan untuk menjalankan sistem konvensional atau sistem syariah atau sistem konvensional dan cabang syariah. Hal tersebut memberi kesempatan untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, termasuk pemberian kesempatan kepada Bank Umum Konvensional untuk membuka kantor cabangnya yang khusus menyelenggarakan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah.

Undang-undang No.23 Tahun 2003 UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia telah menugaskan kepada BI untuk mempersiapkan perangkat aturan dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya yang mendukung kelancaran operasional bank berbasis Syariah serta penerapan dual *bank system*.

Pada tahun 2008, Dewan Perwakilan Rakyat dengan dukungan pemerintah, mengesahkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Aspek baru yang diatur dalam UU ini adalah terkait dengan tata kelola (*corporate governance*), prinsip kehati-hatian (*prudential principles*), manajemen resiko (*risk management*), penyelesaian sengketa, otoritas fatwa dan komite perbankan syariah serta pembinaan dan pengawasan perbankan syariah. Bank Indonesia tetap mempunyai peran dalam mengawasi dan mengatur perbankan syariah di Indonesia, namun saat ini pengaturan dan pengawasan perbankan, termasuk perbankan syariah di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan amanah UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dengan adanya UU khusus yang mengatur perbankan Syariah serta instrumen hukum lainnya, diharapkan eksistensi perbankan syariah semakin kokoh, para investor semakin tertarik untuk melakukan bisnis di bank syariah sehingga perbankan syariah di Indonesia semakin lebih baik lagi.

2.6.3 Fungsi Bank Syariah

Sesuai undang-undang No.21 Tahun 2008 pasal 4 disebutkan fungsi bank syariah:⁶³

1. Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
2. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
3. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).
4. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.6.4 Karakteristik Bank syariah

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika,

⁶³ UUD No 21 Tahun 2008 h. 7

mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam memproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia.⁶⁴

2.6.5 Kegiatan Usaha dan Produk Bank Umum Syariah

Kegiatan usaha Bank Umum Syariah telah diatur dalam Pasal 19 UUD No.21 tahun 2008 yaitu meliputi:⁶⁵

- a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

⁶⁴ Bank Indonesia,

<https://www.bi.go.id/id/perbankan/syariah/Contents/Default.aspx>

⁶⁵ Lihat UUD No.21 Tahun 2008 h. 11-12.

- c. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah, Akad musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- d. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, Akad salam, Akad istishna', atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- e. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad qardh atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- f. menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- g. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- h. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- i. membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah;

- j. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- k. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
- l. melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah;
- m. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
- n. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
- o. melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad wakalah;
- p. memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
- q. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pada ketentuan diatas dapat disimpulkan secara garis besar dapat dikelompokkan

menjadi tiga kategori kegiatan yang dilakukan bank syariah, yaitu kegiatan penghimpunan dana (*funding*), penyaluran dana (*lending*) dan bidang jasa (*service*) yang direalisasikan dalam produk-produk perbankan.

Produk penghimpunan dana berupa produk simpanan yang berbentuk Giro, Tabungan berdasarkan akad *wadi'ah* dan Investasi berupa deposito, Tabungan atau bentuk lainnya berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sementara produk penyaluran dana berupa pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*, serta pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, *salam* dan *istishna'*, pembiayaan penyewaan barang berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah mutahiya bitamlik* ataupun pembiayaan berdasarkan akad *qardh*.

Sedangkan produk perbankan dalam bidang jasa terdiri dari pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah*, usaha kartu debit, memindahkan uang, menerima pembayaran dan tagihan surat berharga, menyediakan tempat penitipan barang dan surat berharga, melakukan fungsi wali amanat berdasarkan akad *wakalah*, dan memberikan fasilitas bank garansi dan semua produk

tersebut berdasarkan akad yang sesuai dengan prinsip syariah.⁶⁶

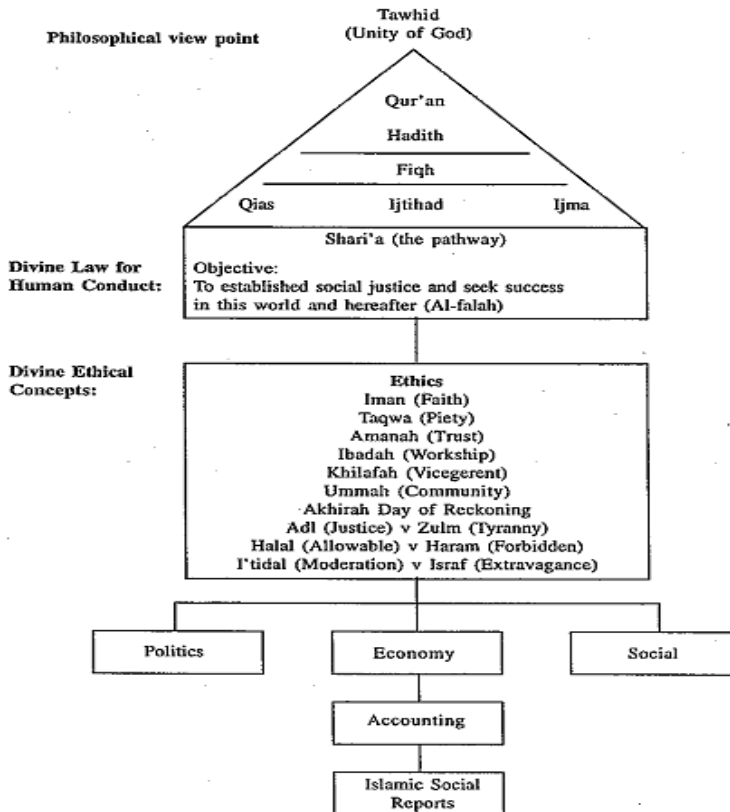
2.7 *Islamic Social Reporting (ISR)*

Sebelum membahas tentang *Islamic Social Reporting (ISR)* penting untuk memahami terlebih dahulu dasar-dasar syariah, dasar dalam pembangunan ISR. Kepercayaan Islam adalah Tauhid bahwa Allah adalah pemilik tertinggi dari segala sesuatu di bumi dan di alam semesta dan bahwa manusia juga bertanggung jawab kepada Allah . Sumber Alquran, Hadits, Fiqh dan sebagainya untuk mewujudkan keadilan dan manfaat bagi masyarakat di dunia ini dan di akhirat (*falah*) dengan menetapkan fondasi dasar dalam setiap aspek kehidupan seorang Muslim termasuk filsafat etis.

Secara umum, etika Islam didukung oleh sepuluh nilai yang mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan, manusia dan manusia serta manusia dan alam. Nilai-nilai dasar ini akan memengaruhi kebijakan pengungkapan dan pengambilan keputusan.⁶⁷ Lebih jelas diuraikan oleh Haniffa dalam sebuah kerangka dasar pembangun ISR.

⁶⁶Khotibul umam, *Tren pembentukan Bank umum syariah*,..h. 49.

⁶⁷Ros Haniffa, *Social Reporting Disclosure : An Islamic Perspective, Indonesian Management & Accounting Research* ,Vol 1. No.2, 2002 h.134

Gambar 2.2 *The shari'a Framework*

Haniffa juga menyebutkan Tujuan ISR yaitu :

1. Sebagai bentuk akuntabilitas kepada Allah SWT dan masyarakat dengan cara Menyediakan prduk yang halal dan baik, Memenuhi hak-hak Allah dan masyarakat, Mengejar keuntungan yang wajar sesuai dengan prinsip Islam ,Mencapai tujuan usaha bisnis, Menjadi karyawan dan masyarakat,

Memastikan kegiatan usaha yang berkelanjutan secara ekologis, Menjadikan pekerjaan sebagai bentuk ibadah.

2. Meningkatkan transparansi kegiatan bisnis dengan menyajikan informasi yang relevan dengan memperhatikan kebutuhan spiritual investor muslim atau kepatuhan syariah dalam pengambilan keputusan. dengan cara memberikan informasi mengenai semua kegiatan halal dan haram dilakukan, Memberikan informasi yang relevan mengenai pembiayaan dan kebijakan investasi, Memberikan informasi yang relevan mengenai kebijakan karyawan , Memberikan informasi yang relevan mengenai hubungan dengan masyarakat, Memberikan informasi yang relevan mengenai penggunaan sumber daya dan perlindungan lingkungan.

Makin meningkatnya pelaksanaan CSR dalam konteks islam, maka makin meningkat pula keinginan untuk membuat pelaporan sosial yang bersifat syariah. Hanya saja ketiadaan standar pelaporan CSR secara syariah menjadikan pelaporan CSR perusahaan syariah tidak seragam dan standar. Standar yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) belum dapat dijadikan sebagai suatu standar pengungkapan CSR karena tidak menyebutkan secara detail keseluruhan item-item terkait CSR yang harus diungkapkan

suatu perusahaan.⁶⁸ oleh sebab itu, *Islamic social reporting* adalah jawaban atas kebutuhan pengukuran tanggung jawab perusahaan yang berlandaskan syariat Islam.

Haniffa merasa perlu mengembangkan indeks ISR lebih lanjut sehingga lahirnya pelaporan CSR secara syariah yang menghasilkan lima tema pengungkapan Indeks ISR yaitu Tema Pendanaan dan Investasi, Tema Produk dan Jasa, Tema Karyawan, Tema Masyarakat, dan Tema Lingkungan Hidup. Kemudian dikembangkan oleh Othman *et al.* dengan menambahkan satu tema pengungkapan, yaitu tema Tata Kelola Perusahaan.

Dari setiap tema tersebut dikembangkan kembali menjadi sub-sub tema sebagai indikator pengungkapan tema tersebut. Berikut adalah penjelasan mengenai keenam tema yang dijadikan pengembangan dari indeks ISR untuk penelitian ini:

1. Tema Pendanaan dan Investasi (*Finance & Investment Theme*)

Item yang termasuk dalam indikator investasi dan keuangan adalah mengenai sumber dana untuk aktivitas investasi dan pembiayaan yang terbebas dari unsur riba, gharar, dan transaksi yang diharamkan oleh Islam, serta item

⁶⁸Soraya Fitria dan Dwi Hartanti, *Islam Dan Tanggung Jawab Sosial: Studi Perbandingan Pengungkapan Berdasarkan Global Reporting Indeks*, Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto, 2010, h. 10

mengenai kebijakan organisasi untuk menangani nasabah yang bermasalah.⁶⁹

- a. *Riba (interest-free)* *Riba* berasal dari bahasa Arab yang berarti tambahan (*Al-Ziyadah*), berkembang (*An-Nuwuw*), meningkat (*Al-Irtifa'*), dan membesar (*Al-'uluw*).
- b. *Gharar* (ketidakpastian) Terjadi ketika terdapat *incomplete information* antara kedua pihak yang bertransaksi dalam hal kuantitas, kualitas, harga, waktu penyerahan dan akad. Salah satu contoh dari transaksi yang mengandung *gharar* adalah transaksi *lease and purchase* (sewa-beli) karena adanya ketidakpastian dalam akad yang diikrarkan antara kedua pihak.
- c. Zakat adalah kewajiban bagi seluruh umat muslim atas harta benda yang dimiliki ketika telah mencapai nisab. Zakat tidaklah sama dengan donasi, sumbangan, dan *shadaqah*. Zakat memiliki aturan yang jelas mengenai harta yang dizakatkan, batasan harta yang terkena zakat, cara penghitungannya, dan siapa yang boleh menerima harta zakat sesuai apa yang telah diatur oleh Allah SWT.

⁶⁹ RinaTrisnawati, *Pengukuran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Perbankan Syariah Di Indonesia*, JAAI Vol 16 No.2 , Desember 2012, h.479.

- d. Kewajiban atas keterlambatan pembayaran piutang dan penghapusan piutang tak tertagih Penangguhan atau penghapusan utang harus dilakukan dengan adanya penyelidikan terlebih dahulu kepada pihak debitur terkait ketidak mampuannya dalam pembayaran piutang. Penangguhan atau penghapusan utang merupakan suatu bentuk sikap tolong-menolong yang dianjurkan di dalam Islam.
- e. *current value balance sheet* Pengungkapan selanjutnya merupakan penambahan dari Othman et al adalah neraca dengan nilai saat ini (*current value balance sheet*).
- f. *Value Added Statement*(nilai tambah) sebagai nilai yang tercipta dari hasil aktivitas perusahaan dan karyawan-karyawan, sedangkan *value added statement* merupakan pernyataan yang melaporkan perhitungan nilai tambah tersebut serta aplikasi di antara para pemangku kepentingan perusahaan. Istilah *value added statement* pada dewasa ini diartikan sebagai laporan pertambahan nilai. Di Indonesia, laporan pertambahan nilai belum berkembang seperti ini negara-negara maju. Oleh karena itu, dalam penelitian ini *value added statement* merujuk pada pernyataan nilai tambah yang ada di dalam laporan tahunan perusahaan.

2. Tema Produk dan Jasa (*Products and Service Theme*)

Tema ini berisi tentang Status kehalalan produk yang digunakan dan pelayanan atas keluhan konsumen. Dalam konteks perbankan syariah maka status kehalalan produk dan jasa adalah melalui opini yang disampaikan oleh DPS (Dewan Pengawas Syariah).

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada bank syariah. Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah. Dewan Pengawas Syariah Anggota DPS harus terdiri dari para pakar di bidang syariah muamalah dan pengetahuan umum bidang perbankan. Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN (Dewan syariah Nasional) dan bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

DPS juga memiliki fungsi sebagai mediator antara bank dan DSN dalam pengkomunikasian dalam pengembangan produk baru bank syariah. Oleh karena itu, setiap produk baru yang akan diluncurkan bank syariah harus mendapat persetujuan dari DPS yang diungkapkan

melalui laporan keuangan.⁷⁰ tujuannya agar para pemangku kepentingan mengetahui apakah barang atau jasa tersebut diperbolehkan (halal) atau dilarang (haram) dalam ajaran Islam sehingga kepercayaan terhadap kehalalan produk perbankan syariah dapat diketahui masyarakat. . Selain itu pelayanan atas keluhan nasabah juga menjadi prioritas bank syariah dalam rangka menjaga kepercayaan nasabah. Hal ini merupakan peraturan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 mengenai hak konsumen untuk didengar pendapat dan keluhannya.⁷¹

Item pengungkapan tambahan oleh fauziyah & Yudho adalah pengembangan produk. Disamping pentingnya kehalalan suatu produk, pengembangan produk juga diperlukan untuk menambah variasi pilihan produk bagi nasabah. Karena semakin ketat persaingan pasar perusahaan dituntut untuk melakukan inovasi produk dan melakukan pengembangan namun tetap dalam prinsip syariah.

Item pengungkapan selanjutnya adalah mengenai keluhan konsumen atau pelayanan pelanggan. Suatu perusahaan diharapkan tidak hanya berfokus pada produk

⁷⁰Gustani, *Analisis Tingkat Pengungkapan Kinerja Sosial Bank Syariah Berdasarkan Islamic Social Reporting Index (Indeks ISR)*, Skripsi, STEI SEBI, 2015, h.38.

⁷¹Dea Devita Sari, *Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Bank Syariah Di Indonesia Dan Malaysia Tahun 2014-2016*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2018, h.28.

yang dihasilkan (*product-oriented*) melainkan memberikan pelayanan prima kepada konsumen yang memuaskan (*consumer-oriented*) dengan menyediakan pusat layanan keluhan konsumen dan mengadakan survei kepuasan pelanggan agar terbentuk loyalitas dari pelanggan.

3. Tema Karyawan (*Employees Theme*)

Tema karyawan memberikan beberapa informasi yang berkaitan dengan karyawan. Karyawan tidak boleh luput dari perhatian perusahaan karena karyawan merupakan aset penting bagi perusahaan. Dengan diperhatikannya hak-hak karyawan tidak menutup kemungkinan akan meningkatkan kinerjanya terhadap perusahaan serta dapat mempercepat laju perkembangan perusahaan. Masyarakat juga ingin mengetahui apakah karyawan-karyawan perusahaan telah diperlakukan secara adil dan wajar melalui informasi-informasi yang diungkapkan.⁷²

Dalam sub tema karyawan diperhatikan jumlah jam kerja, hari libur, remunerasi, jumlah karyawan, dan ketrampilan yang dimiliki, pemberian pendidikan dan pelatihan karyawan, kesamaan peluang karir bagi seluruh karyawan baik pria maupun wanita, kesehatan dan

⁷²Citra Indah Merina Dan Verawaty, *Analisis Komparasi Indeks Islamic Social Reporting Perusahaan Perbankan Syariah Dan Perusahaan Go Publik Yang Listing Di Jakarta Islamic Index*, AKUISISI Vol 12 No. 2 November 2016, h.5.

keselamatan kerja karyawan, keterlibatan karyawan dalam beberapa kebijakan perusahaan, serta perhatian terhadap kesehatan dan keselamatan kerja bagi karyawan, tersedianya sarana prasarana ibadah yang memadai, serta lingkungan kerja yang kondusif.

4. Tema Sosial (*Society Theme*)

Item-item pengungkapan dalam tema sosial adalah bentuk aktivitas sosial yang dilakukan perusahaan. Berupa *sodaqah*/donasi, *wakaf*, *qard hassan*, sukarelawan dari pihak karyawan, pemberian bantuan dalam bidang pendidikan meliputi pendirian sekolah, bantuan dalam bentuk finansial maupun non finansial, pemberian beasiswa dan memberikan kesempatan magang atau praktek kerja lapangan.

Tidak luput juga pemberian bantuan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, kepedulian terhadap anak-anak yatim piatu, pembangunan atau renovasi masjid, pengembangan dalam kepemudaan, peningkatan kualitas hidup masyarakat kelas bawah, mengadakan segala macam kegiatan amal/bantuan/kegiatan sosial lain, serta mensponsori berbagai macam kegiatan seperti kesehatan, hiburan, olahraga, budaya, pendidikan dan agama dll.

Konsep dasar yang mendasari tema ini adalah *ummah*, amanah, dan *adl*. Konsep tersebut menekankan pada pentingnya saling berbagi dan meringankan beban orang lain

dengan hal-hal yang telah disebutkan pada item-item pengungkapan di atas. Perusahaan memberikan bantuan dan kontribusi kepada masyarakat dengan tujuan semata-mata untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membantu menyelesaikan permasalahan sosial di masyarakat.⁷³

5. Tema Lingkungan (*Environment Theme*)

Tema ini berisi tentang informasi yang berhubungan program yang dilakukan oleh perusahaan terhadap lingkungan di sekitarnya. Penekanan item yang berkaitan pengungkapan terhadap aktivitas lingkungan. Dalam penelitian ini, meskipun sampel yang digunakan adalah perusahaan perbankan, tidak lantas mengabaikan aspek lingkungan karena tidak berhubungan langsung dengan sumber daya alam. sub tema lingkungan memuat upaya pelestarian lingkungan meliputi kampanye *go green*, konservasi lingkungan, perlindungan terhadap flora dan fauna, polusi, perbaikan dan pembuatan sarana umum untuk menjaga kebersihan lingkungan, melakukan audit lingkungan dan membentuk kebijakan manajemen lingkungan.

6. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

Tema tata kelola perusahaan dalam indeks ISR merupakan penambahan dari Othman *et al.* meskipun

⁷³*Ibid.* h.5

Corporate Governace merupakan isu yang relatif baru dimana tema ini tidak bisa dipisahkan dari perusahaan guna memastikan pengawasan pada aspek syariah perusahaan. Dalam pelaksanaannya di Indonesia, prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) didunia perbankan telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.8/14/2006 mengenai Implementasi Tata Kelola Perusahaan oleh Bank Komersial termasuk bank berbasis syariah.⁷⁴

Good Corporate Governance adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).⁷⁵ Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip GCG sangat penting untuk diterapkan dalam operasional perusahaan terlebih perbankan syariah. Mengingat bank adalah institusi yang telah diatur sedemikian kompleksnya (*the most regulated industry in the world*).⁷⁶

⁷⁴ Sakinah Hani Wafiqoh, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan *Islamic Social Reporting* Pada Bank Syariah Di Indonesia (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2011-2016), Skripsi, Universitas Lampung, 2018, h.23.

⁷⁵ Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 pasal 1 angka 6

⁷⁶ Amir mahmud dan Rukmana, Bank Syariah : Teori, kebijakan dan studi empiris di Indonesia, Jakarta : Erlangga, 2010, h.81.

Beberapa subtema tata kelola perusahaan dari Othman *et al*, telah dikembangkan lebih lanjut oleh fauziyah dan yudho, beberapa diantaranya yaitu profil dan strategi perusahaan, struktur organisasi, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komesaris, remunerasi dan rincian nama dewan komesaris, pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi serta komite, Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah (DPS),Rincian nama DPS dan remunerasi DPS, Pelaksanaan prinsip syariah dalam penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa, struktur kepemilikan saham, perkara hukum dan penanganan benturan kepentingan, penerapan kepatuhan bank dengan penerapan fungsi audit internal maupun eksternal, transparansi, kebijakann anti KKN serta etika perusahaan.

2.8 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *Islamic Social Reporting* (ISR), penulis menemukan beberapa penelitian yang membahas tentang *Islamic Social Reporting* (ISR) menggunakan item-item yang sudah ada atau mengembangkan item-item indeks ISR, diantaranya:

Penelitian oleh Ahzar dan Trisnawati, dengan tahun penelitian 2009-2011 pada lima Bank Umum Syariah (Bank Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah,

BRI syariah, Bank Bukopin Syariah). Hasil analisis menunjukkan bahwa bank Mega Syariah dan BRI Syariah memperoleh skor tertinggi dalam pengungkapan tanggung jawab sosial, yaitu dengan mencapai prosentase masing-masing per tahun sebesar 50.68%. Sedangkan hasil terendah terdapat pada bank Bukopin Syariah dengan prosentase tiap tahunnya sebesar 45.21%. Hasil penelitian juga diperoleh bahwa bentuk kegiatan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh bank syariah di Indonesia berfokus pada kegiatan sosial.⁷⁷

Selanjutnya penelitian Fauziyah dan Yudho, membandingkan pengungkapan tanggung jawab sosial 7 bank yang menjadi objek penelitian berdasarkan ISR indeks pada tahun 2011 sumber datanya didapatkan dari laporan tahunan (*annual report*) yang dipublikasikan masing-masing bank pada *official website*-nya. Hasil penelitian ini menunjukkan Bank Muamalat Indonesia (BMI) memiliki tingkat pengungkapan tertinggi sebesar 73% dan yang terendah adalah Panin Bank Syariah sebesar 41%.⁷⁸Virgowati, menggunakan sampel 3 bank syariah dengan tahun penelitian 2010-2012 dengan hasil penelitian Perbandingan

⁷⁷Fahri Ali Ahzar dan Rina Trisnawati, *Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Bank Syariah Di Indonesia*, Proceeding Seminar Nasional, 2013, h. 482.

⁷⁸Khusnul Fauziyah dan Prabowo yudho, *Analisis Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah Di Indonesia Berdasarkan Islamic Social Reporting Indeks*, Jurnal Dinamika Akuntansi Vol.5, No. 1, Maret 2013, h. 20.

tingkat kinerja sosial Bank Syariah di Indonesia diketahui bahwa kinerja tertinggi diduduki oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan nilai rata-rata index ISR sebesar 88,16% kemudian diikuti oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) dengan nilai rata-rata ISR sebesar 82,90 dan terakhir Bank Mega Syariah (BMS) dengan nilai rata-rata sebesar 77,64%.⁷⁹

Penelitian Aggrahini, menggunakan 7 sampel Bank Umum Syariah pada tahun 2012. Berdasarkan hasil penelitian pengungkapan ke enam indikator berdasarkan Islamic Social Reporting Indeks (ISR) ke tujuh sampel bank umum syariah tidak semuanya mengungkapkannya. Namun dapat dilihat dari tahun ke tahun dapat didapatkan hasil Secara keseluruhan yang mengungkapkan tanggung jawab sosial berdasarkan ISR yaitu Bank Muamalat Indonesia memiliki persentase tinggi sebesar 73%, sedangkan yang memiliki persentase terendah adalah BRI Syariah sebesar 49%.⁸⁰

Selanjutnya penelitian Brilyanti, menganalisis pengungkapan tanggung jawab sosial perbankan syariah di Indonesia dengan menggunakan Indeks *Islamic Social*

⁷⁹Virgowati, *Analisis Kinerja Sosial Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Dan Muamalat Indonesia)*. Artikel Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013.

⁸⁰Anggrahini, *Analisis Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah Di Indonesia Berdasarkan Islamic Social Reporting Indeks*, Artikel Ilmiah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya, 2015.

Reporting yang dikembangkan oleh Haniffa Othman *et. al.*, serta Fitriana & Hartanti dengan tahun penelitian tahun 2013-2015. Sampel perbankan syariah yang digunakan dalam penelitian ini adalah lima bank syariah dengan aset terbesar di Indonesia. Metode analisis data yang digunakan adalah *Content Analysis* pada Laporan Keuangan maupun Laporan *Good Corporate Governance*. Hasil analisis menunjukkan bahwa Besarnya aset yang dimiliki oleh sampel bank syariah belum dapat memastikan besarnya nilai pengungkapan ISR. Bank Syariah Mandiri merupakan bank syariah yang relatif lebih lengkap dengan nilai rata-rata indeks 73,64%; kemudian diikuti oleh BNI Syariah (65,12%); Bank Muamalat Indonesia (62,79%); Bank Panin Syariah (51,16%); dan BRI Syariah 41,86%. Bentuk kegiatan sosial yang dilakukan oleh masing-masing Bank Syariah lebih didominasi oleh kegiatan sosial dari kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan alam.⁸¹

⁸¹ Farida Ayu Brilyanti, *Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2013 – 2015*, STIE Dewantara, 2016, h. 9.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian komparatif dengan pendekatan kualitatif. penelitian komparatif menurut Sugiyono adalah penelitian yang membandingkan keadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau dua waktu yang berbeda.⁸³

Menurut Nazir (2005: 58) penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Bersifat membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu.

Ciri-ciri Metode Komparatif :

- 1) Merupakan dua atau lebih objek yang berbeda
- 2) Masing-masing berdiri sendiri dan bersifat terpisah
- 3) Memiliki kesamaan pola atau cara kerja tertentu
- 4) Objek yang diperbandingkan jelas dan spesifik
- 5) Memakai standar dan ukuran perbandingan berbeda dari objek yang sama. (Muliawan, 2014:86).

⁸³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, cetakan ke-28, Bandung : Alfabeta, 2018, h.62

Ciri-ciri metode komparatif yang lain yaitu menentukan mana yang lebih baik atau mana yang sebaiknya dipilih, rumusan masalah dalam metode komparatif membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau sampel dan waktu yang berbeda, membuat generalisasi tingkat perbandingan berdasarkan cara pandang atau kerangka berfikir tertentu. Berdasarkan pengertian studi komparatif yang telah dikemukakan peneliti dapat memahami bahwa studi komparatif adalah suatu bentuk penelitian yang membandingkan antara variabel-variabel yang saling berhubungan dengan menentukan perbedaan-perbedaan atau persamaannya.

Adapun penerapan penelitian komparatif pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui perbandingan analisis setiap tema indeks ISR antar bank umum syariah pada periode penelitian.

3.2 Jenis Data Penelitian

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diteliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder berwujud data dokumentasi atau laporan yang telah tersedia.⁸⁴ Menurut Umar data sekunder merupakan data primer

⁸⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998, h.91

yang diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain.⁸⁵

Data sekunder dalam penelitian ini adalah Laporan Tahunan (*annual report*) Bank Umum Syariah (BUS) periode 2016-2018 yang telah dipublikasi di *website* resmi masing-masing BUS. Sedangkan Laporan tahunan yang dimaksud dalam penelitian ini mencakup laporan keuangan, laporan manajemen, dan laporan pelaksanaan GCG baik yang menjadi satu kesatuan dalam sebuah laporan ataupun dilaporkan terpisah melalui *website* masing-masing. Data penelitian periode 2016-2018 dipilih karena cukup menggambarkan kondisi terbaru tentang penelitian tersebut. Dengan begitu diharapkan hasil penelitian akan lebih relevan untuk memahami kondisi terkini pengungkapan CSR perbankan syariah di Indonesia. Sedangkan pemilihan laporan tahunan sebagai objek data yang dianalisis karena laporan tahunan merupakan sumber utama informasi perusahaan mengenai kinerja keuangan, kinerja manajemen, dan tanggungjawab sosialnya.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti dan ditarik kesimpulannya.⁸⁶ Sampel

⁸⁵ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada., 2007

⁸⁶ Sugiyono, *ibid*, h.80

adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.⁸⁷

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah (BUS) yang ada di Indonesia periode 2016-2018. Pemilihan sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan *Purposive Sampling*.

Purposive Sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dilakukan berdasarkan kriteria yang ditentukan.⁸⁸ Menurut Arikunto pengambilan sampel dengan metode ini cukup baik karena sesuai dengan pertimbangan peneliti sendiri sehingga dapat mewakili populasi.

Kriterianya sampel antara lain yaitu:⁸⁹

- a. Bank Umum Syariah yang beroperasi di Indonesia hingga tahun 2018.
- b. Bank Umum Syariah yang telah menerbitkan laporan tahunan (*Annual report*) pada periode penelitian yaitu pada tahun 2016 sampai dengan 2018 di *website* resmi masing-masing.
- c. Memiliki data lengkap terkait dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian.

⁸⁷*Ibid*, h.81

⁸⁸*Ibid*, h.85

⁸⁹Arikunto, S, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta:

Berdasarkan kriteria yang disebutkan diatas, maka jumlah sampel yang sesuai dengan kriteria sampel diatas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Sampel Bank Umum Syariah yang sesuai kriteria

No	Bank Umum Syariah	Alamat <i>Official Website</i>
1.	Bank Muamalat Indonesia	https://www.bankmuamalat.co.id/
2.	Bank Victoria Syariah	https://bankvictoriasyariah.co.id/
3.	Bank BRISyariah	https://www.brisyariah.co.id/
4.	Bank Jabar Banten Syariah	http://www.bjbsyariah.co.id/
5.	Bank BNI Syariah	https://www.bnisyariah.co.id/
6.	Bank Syariah Mandiri	https://www.mandirisyariah.co.id/
7.	Bank Mega Syariah	http://www.megasyariah.co.id/
8.	Bank Panin Dubai Syariah	https://www.paninbanksyariah.co.id/
9.	Bank Syariah Bukopin	https://www.syariahbukopin.co.id/
10.	BCA Syariah	https://www.bcasyariah.co.id/
11.	Bank BTPN Syariah	https://www.btpnsyariah.com/
12.	Maybank Syariah Indonesia	https://www.maybank.co.id/

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada metode yang digunakan oleh Haniffa yaitu *content*

analysis.content analysis (Analisis isi) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Pelopor analisis isi adalah Harold D. Lasswell, yang memelopori teknik symbol coding, yaitu mencatat lambang atau pesan secara sistematis, kemudian diberi interpretasi.⁹⁰

Content analysis adalah suatu teknik sistematik untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan, atau suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis isi perilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator yang dipilih. Menurut Budd,1967 dalam Subiakto, dengan metode *content analysis* memungkinkan peneliti untuk menganalisis berapa besar jumlah informasi yang disampaikan oleh objek penelitian dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi secara sistematis terkait sifat-sifatnya, seperti ada atau tidaknya kata-kata, konsep, karakter, tema, atau kalimat-kalimat.⁹¹

Metode *Content Analysis* memiliki kelebihan dan kekurangan.Kelebihan dari metode *contenst analysis* adalah tidak digunakannya manusia sebagai subjek penelitian.Menyebabkan penelitian relatif mudah, tidak ada reaksi dari populasi ataupun

⁹⁰ Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung:Remaja, 2001, h. 6.

⁹¹ Subiakto, H, *Analisis Isi Media Metode dan Pemanfaatannya. Dalam B. Bungin (Penyunt.), Metodologi Penelitian Kualitatif* , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

sampel yang diteliti karena tidak ada orang yang diwawancarai, diminta mengisi kuesioner, ataupun diminta datang di laboratorium. Metode ini juga relatif murah, karena tidak terbentur masalah perizinan penelitian. Sedangkan kekurangan dari metode ini adalah hanya dapat meneliti pesan yang tampak, sesuatu yang disembunyikan dalam pesan bisa luput dari metode ini (Subiakto, 2004).⁹² Kelemahan dari metode ini adalah subjektivitas peneliti dalam penilaian komponen indeks ISR dalam proses skoring. Namun, metode ini merupakan metode yang paling cocok untuk mengetahui tingkat pengungkapan tanggungjawab sosial (CSR) yang dilakukan oleh perusahaan.⁹³

Komponen item indeks ISR yang akan dianalisis mengacu pada Haniffa (2002), Othman *et. al.*, (2009), Haniffa dan Hudaib (2010), Fitria dan Hartanti (2010), Sofyani *et. al.*, (2012) Fauziah dan Yudho (2013), serta penelitian-penelitian sebelumnya yang menurut peneliti relevan diterapkan pada Bank Syariah. Indeks ISR dalam penelitian ini berisi 6 (enam) tema pengungkapan, yaitu Tema Pendanaan dan Investasi, Tema Produk dan Jasa, Tema Karyawan, Tema Sosial, Tema Lingkungan, dan Tema Tata Kelola Perusahaan. Dari setiap tema terdapat sub-tema pengungkapan

⁹² *Ibid*, h. 133-143.

⁹³ Raditya, A. N., *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) Pada Perusahaan Yang Masuk Daftar Efek Syariah (DES)*, Skripsi, Depok: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2012.

yang secara keseluruhan berjumlah 60 (enam puluh) item. Berikut disajikan dalam tabel rincian item indeks ISR :

Tabel 3.2 Rincian item ISR

No	ITEM YANG DIUNGKAPKAN	Skor	Referensi
A. PENDANAAN DAN INVESTASI			
1.	Aktivitas Riba a) indentifikasi aktifitas yang mengandung riba b) % kontribusi dari profit	1	Haniffa (2002) Othman <i>et al.</i> (2009) Fitria dan Hartanti (2010)
2.	Gharar a) Identifikasi aktivitas yang mengandung gharar b) Kontribusi % dari profit	1	Haniffa (2002) Othman <i>et al.</i> (2009) Fitria dan hartanti (2010) , Fauziah dan yudho (2013)
3	Zakat a) Metode yang digunakan b) Sumber zakat c) jumlah zakat d) Penerima zakat e) Opini Dewan Pengawas Syariah mengenai pengumpulan dan penyaluran zakat	1	Haniffa (2002), Othman dan Thani (2010), Fauziah dan Yudho (2013)
4	Kebijakan dalam mengatasi keterlambatan pembayaran oleh <i>insolvent clients</i> a) identifikasi kebijakan untuk menanggulangi <i>insolvent clients</i> b) Besarnya biaya	1	Othman dan Thani(2010) , Fitria dan Hartanti (2010) Fauziah dan Yudho (2013)

	tambahan yang dikenakan sebagai konsekuensi keterlambatan pembayaran c) Opini Dewan pengawas syariah terkait dengan izin mengenai biaya tambahan yang dikenakan sebagai konsekuensi keterlambatan pembayaran oleh <i>insolvent clients</i>		
5	<i>Current Value Balance Sheet</i>	1	Othman dan Thani (2010) Sofyani dkk (2012) Fauziah dan Yudho (2013)
6	<i>Value Added Statements</i>	1	Othman dan Thani (2010) Sofyani <i>et. al.</i> (2012) Fauziah dan Yudho (2013)
B	PRODUK DAN JASA		
7	Status halal atau syariah dalam produk	1	Haniffa (2002) , Othman <i>et.al.</i> (2009), Fauziah dan Yudho (2013)
8	Pengembangan produk	1	Fauziah dan Yudho (2013)
9	Peningkatan pelayanan	1	Fauziah dan Yudho (2013) Othman <i>et al</i> (2009) Fitria dan Hartanti (2010)
10	Keluhan pelanggan/ kejadian yang timbul karena ketidaktaatan terhadap peraturan yang berlaku a) Total keluhan konsumen b) penanganan keluhan tersebut	1	Haniffa dan Hudaib (2007) , Fitria dan hartanti (2010), Sofyani <i>et. al.</i> (2012) Fauziah & Yudho (2013)

	<ul style="list-style-type: none"> c) Denda baik uang maupun non uang terkait pelanggaran peraturan d) Survei atas kepuasan pelanggan 		
C	KARYAWAN		
11	Karakteristik pekerjaan <ul style="list-style-type: none"> a) Jumlah jam kerja b) hari libur c) Remunerasi d) Rasio gaji e) Jumlah karyawan, jenis dan ketrampilan 	1	Haniffa (2002) , Haniffa dan Hudaib (2007) Fitria dan Hartanti (2010) Othman <i>et, al.</i> (2009) , Fauziyah dan Yudho (2013)
12	Pendidikan dan pelatihan <ul style="list-style-type: none"> a) Program pendidikan dan pelatihan bagi karyawan b) Membangun program dan jenjang karir karyawan c) strategi retensi karyawan d) Prosentase karyawan yang menerima pengembangan karir 	1	Haniffa (2002) Fitria dan Hartanti (2010) Othman <i>et, al.</i> (2009) , Fauziyah dan Yudho (2013)
13	Kesempatan yang sama	1	Othman <i>et, al.</i> (2009), Fauziyah dan Yudho (2013)
14	Kesehatan dan keselamatan kerja	1	Haniffa (2002) Fitria dan Hartanti (2010) Fauziyah dan Yudho (2013)
15	Keterlibatan karyawan di perusahaan	1	Othman <i>et, al.</i> (2009),
16	Lingkungan kerja	1	Othman <i>et al</i> (2009) Fitria dan Hartanti (2010), Fauziyah dan Yudho (2013)

17	Tempat ibadah yang memadai	1	Othman <i>et al</i> (2009)
18	Waktu ibadah/kegiatan religius	1	Othman <i>et al</i> (2009)
19	Perekrutan khusus	1	Sofyani <i>et. al.</i> (2012), Fauziah & Yudho (2013)
20	Kesejahteraan karyawan	1	Haniffa Dan Hudaib (2007)
D	SOSIAL		
21	Shodaqoh/Donasi	1	Haniffa (2002) Othman <i>et al</i> (2009) , Fauziah & Yudho (2013)
22	Wakaf	1	Haniffa (2002) Othman <i>et al</i> (2009) , Fauziah & Yudho (2013)
23	Qardhul Hasan	1	Haniffa (2002) Othman <i>et al</i> (2009) , Fauziah & Yudho (2013)
24	Zakat atau sumbangan dari karyawan atau nasabah	1	Haniffa (2002) Fauziah & Yudho (2013)
25	Pendidikan a) Pendirian sekolah b) Bantuan pada sekolah dalam bentuk finansial atau non finansial c) Beasiswa d) Pemberdayaan kerja para lulusan sekolah/kuliah (magang atau praktik kerja lapangan)	1	Othman <i>et al</i> (2009) Fauziah & Yudho (2013)
26	Bantuan kesehatan	1	Othman <i>et al.</i> (2009) Fauziah dan Yudho (2013)
27	Pemberdayaan ekonomi	1	Othman <i>et al</i> (2009) Fauziah dan Yudho (2013)
28	Kepedulian terhadap anak yatim piatu	1	Othman <i>et al</i> (2009) Fauziah dan Yudho (2013)

29	Pembangunan atau renovasi masjid	1	Othman <i>et al</i> (2009) Fauziah dan Yudho (2013)
30	Kegiatan kepemudaan	1	Othman <i>et al</i> (2009) Fauziah dan Yudho (2013)
31	Kegiatan sosial lainnya (pemberian buku, mudik bareng, dan lain-lain)	1	Haniffa dan Hudaib (2007) ,Othman <i>et al</i> (2009) , Fauziah dan Yudho (2013)
32	Sponsor acara kesehatan, olahraga, edukasi, dan lain-lain	1	Othman <i>et al</i> (2009) Fauziah dan Yudho (2013)
E	LINGKUNGAN		
33	Kampanyego <i>green</i>	1	Haniffa (2002), Othman <i>et al</i> (2009), Fauziah dan Yudho (2013)
34	Konservasi lingkungan (mengurangi efek pemanasan global, pengelolaan limbah, pengelolaan air bersih)	1	Haniffa (2002) Fitria dan Hartanti (2010) Fauziah & Yudho (2013)
35	Perlindungan terhadap flora dan fauna yang liar an terancam punah	1	Fauziah & Yudho (2013)
36	Polusi	1	Othman <i>et al</i> (2009) Fauziah dan Yudho (2013)
37	Perbaikan dan pembuatan sarana umum	1	Fauziah & Yudho (2013)
38	Audit lingkungan	1	Othman <i>et al</i> (2009) Fauziah & Yudho (2013)
39	Kebijakan manajemen lingkungan	1	Othman <i>et al</i> (2009) Fauziah & Yudho (2013), Haniffa Dan Hudaib (2007)
F	TATA KELOLA PERUSAHAAN		
40	Profil dan strategi perusahaan	1	Othman <i>et al</i> (2009) Fauziah dan Yudho (2013)
41	Struktur Organisasi	1	Othman <i>et al</i> (2009) , Fitria dan Hartanti (2010)

			, Fauziah dan Yudho (2013)
42	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	1	Fauziah dan Yudho (2013)
43	Remunerasi dewan komesaris	1	Othman <i>et al</i> (2009)
44	Rincian nama dewan komesaris	1	Othman <i>et al</i> (2009)
45	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	1	Fauziah dan Yudho (2013)
46	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	1	Fauziah dan Yudho (2013)
47	Rincian nama dan profil DPS	1	Othman <i>et, al.</i> (2009)
48	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah	1	Othman <i>et, al.</i> (2009) Fauziah dan Yudho (2013)
49	Remunerasi DPS	1	Othman <i>et, al.</i> (2009)
50	Pelaksanaan prinsip syariah dalam penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	1	Othman <i>et, al.</i> (2009) Fauziah dan Yudho (2013)
51	Struktur kepemilikan saham	1	Othman <i>et, al.</i> (2009)
52	Perkara hukum	1	Othman <i>et, al.</i> (2009)
53	Penanganan benturan kepentingan	1	Fauziah dan Yudho (2013)
54	Penerapan fungsi kepatuhan Bank	1	Fauziah dan Yudho (2013)
55	Penerapan fungsi audit intern	1	Fauziah dan Yudho (2013)
56	Penerapan fungsi audit ekstern	1	Fauziah dan Yudho (2013)
57	Batas maksimum penyaluran dana	1	Fauziah dan Yudho (2013)
58	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan	1	Fauziah dan Yudho (2013)
59	Kebijakan anti korupsi, pencucian uang dan praktik	1	Othman <i>et, al.</i> (2009) Fauziah dan Yudho (2013)

	menyimpang lainnya		
60	Etika Perusahaan	1	Fauziah dan Yudho (2013)
TOTAL		60	

Sumber diolah oleh peneliti, 2019

Adapun langkah-langkah untuk menunjang analisis isi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Langkah pertama yaitu mengidentifikasi dan mengklasifikasikan berbagai informasi yang terdapat dalam laporan tahunan (*Annual Report*) laporan GCG ataupun laporan keberlanjutan Bank Umum Syariah di Indonesia sesuai dengan item-item ISR yang digunakan.
2. Melakukan penilaian (*scoring*) indeks ISR pada Bank Umum Syariah. *Scoring* dilakukan untuk mencari skor pengungkapan yang dinilai 1 jika terdapat item yang diungkapkan dan 0 jika terdapat item yang tidak diungkapkan dari item pengungkapan yang telah dijabarkan dalam tabel.
3. Selanjutnya akan dilakukan analisis konten terhadap tiap-tiap tema indeks ISR pada setiap Bank Umum Syariah untuk mengetahui tingkat pengungkapan CSR Bank Syariah. Selanjutnya dilakukan penilaian secara kumulatif indeks ISR pada Bank Umum Syariah (BUS) yang akan menentukan tingkat pengungkapan CSR Bank Umum Syariah (BUS).
4. Untuk memudahkan dalam mengetahui seberapa besar tingkat pengungkapan CSR di Bank Umum Syariah maka dilakukan rumus sebagai berikut:

Indeks ISR =

$$\frac{\text{item yang diungkapkan Bank Umum Syariah}}{\text{Jumlah item maksimal}} \times 100\%$$

5. Setelah melakukan penilaian (*scoring*) atas item-item indeks ISR, maka selanjutnya menentukan predikat tingkat pengungkapan CSR dari masing-masing BUS. Dalam penentuan predikat tingkat pengungkapan CSR BUS, akan digunakan pendekatan yang mengacu pada Munawaroh (2007) dalam Gustani (2013) dimana skor pengungkapan diklasifikasikan dalam 4 kategori: Sangat Informatif (81-100), Informatif (66-80), Kurang informatif (51-66) dan tidak informatif (0-50).

Tabel.3.3 Predikat tingkat pengungkapan CSR Bank Umum Syariah berdasarkan indeks ISR

Predikat	Indeks ISR
Sangat Informatif	81 % - 100 %
Informatif	66 % - 80 %
Kurang informatif	51 % - 65 %
Tidak informatif	0 % - 50 %

BAB IV
ANALISIS PERBANDINGAN TINGKAT PENGUNGKAPAN CSR
BANK UMUM SYARIAH BERDASARKAN ISR TAHUN 2016-
2018

Pada Bab ini dilakukan perhitungan indeks ISR dengan memberikan skoring pada laporan tahunan (*Annual Report*) 12 Bank Umum Syariah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Kemudian di analisis pada tiap indikator tema pengungkapan ISR yang terdiri dari 6 tema indikator yaitu Tema Pendanaan dan Investasi (*Finance and Investment Theme*), Tema Produk dan Jasa (*Product and Services Theme*), Tema Karyawan (*Employee Theme*), Tema sosial (*Society Theme*) , Tema Lingkungan (*Environment Theme*), dan Tema Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance Theme*). Dari setiap tema tersebut terdiri dari beberapa item ISR dengan total 60 item. Dengan rincian tema pendanaan dan investasi berjumlah 6 item ISR, tema produk dan jasa berjumlah 4 item ISR, tema karyawan berjumlah 10 item ISR, tema sosial berjumlah 12 item ISR, tema lingkungan 7 item ISR, dan tema tata kelola perusahaan berjumlah 21 item ISR. Selanjutnya Indeks ISR yang diperoleh akan dibandingkan antar Bank Umum Syariah pada tahun penelitian kemudian menentukan predikat tingkat pengungkapan CSR sesuai ketentuan yang sudah dijelaskan dalam Bab III yaitu perolehan Indeks ISR 81% s/d 100% Sangat Informatif, indeks ISR 66% s/d <81% Informatif , Indeks ISR 51% s/d <66% Kurang Informatif dan indeks ISR 0% s/d <51% Tidak Informatif .

4.1 Tema Pendanaan dan Investasi (*Finance and Investment Theme*)

Pada tema pendanaan dan investasi dilakukan dengan pemberian skoring pengungkapan terhadap 6 item ISR pada tema ini yaitu identifikasi aktivitas yang mengandung riba, identifikasi aktivitas yang mengandung *gharar*, zakat, Kebijakan dalam mengatasi keterlambatan pembayaran oleh *insolvent clients*, *current value balance sheet*, dan *value added statement*. Hasil skoring dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 4.1 Hasil skoring Tema Pendanaan dan Investasi (*Finance and Investment Theme*)

Item	BIM			BIS			BIS			BBS			BMS			BDM			BMS			BPDS			BB			BCAS			BTPMS			BMSI		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	1	0,6	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0	0	0	0,6	0,6	0,6	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
\bar{x}	2,1	2,1	2,1	1,1	1,1	1,1	2,1	1,1	1,1	3,5	1,1	1,9	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	1,1	1,6	1,6	0,8	1,5	1,5	2,1	2,1	2,1	0,5	0,5	1,5	0,5	0,5	0,5
%	35,0%	35,0%	35,0%	18,3%	18,3%	18,3%	35,0%	18,3%	18,3%	41,7%	18,3%	31,7%	35,0%	35,0%	35,0%	35,0%	35,0%	35,0%	35,0%	35,0%	35,0%	18,3%	26,7%	26,7%	13,3%	25,0%	25,0%	35,0%	35,0%	35,0%	8,3%	8,3%	25,0%	8,3%	8,3%	8,3%
\bar{x}	35,0%			18,3%			23,9%			30,0%			35,0%			35,0%			29,4%			22,2%			25,0%			35,0%			8,3%			13,9%		

Sumber : olah data sekunder,2019

Setiap item yang diberi skor 1 menunjukkan adanya pengungkapan dalam item tersebut dalam laporan tahunan Bank Umum Syariah.Sedangkan skor 0 menunjukkan tidak ditemukannya pengungkapan item tersebut dalam laporan tahunan

Bank Umum Syariah. Dapat dilihat dari tabel diatas pada tema pendanaan dan investasi bank umum syariah tertinggi hanya mengungkapkan 35% dari total 6 item ISR. Pada item identifikasi aktivitas riba, hampir seluruh Bank Umum Syariah mengungkapkan aktivitas riba seperti masih adanya pendapatan non halal dalam laporan tahunan namun tidak mengungkapkan berapa besar kontribusinya terhadap profit. Hal tersebut dikarenakan pendapatan non halal tidak dimasukkan kedalam laba namun digunakan sebagai sumber dana kebajikan. Hanya Bank Panin Dubai Syariah yang tidak terdapat pendapatan non halal.

Pengungkapan Item zakat 9 Bank Umum Syariah mengungkapkan dalam laporan sumber dan penyaluran dana zakat meskipun bank umum syariah tidak secara langsung menjalankan fungsi penyaluran dana zakat. Beberapa bank menyalurkan zakat kepada lembaga lain seperti BAZNAS, Dompot Dhuafa atau pengelolaan dilakukan oleh unit pengelola dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang dibentuk oleh bank seperti Baitulmaal Muamalat (BMM) oleh Bank Muamalat Indonesia, Yayasan Hasanah Titik (YHT) yang dimiliki oleh Bank BNI Syariah dengan kerja sama YHT dengan DD untuk dapat mengelola zakat dengan nama Mitra Pengelola Zakat (MPZ)⁹⁴. serta Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Mitra Umat (LAZNAS BSM Umat)

⁹⁴ Data Sekunder (Laporan Tahunan Bank BNI Syariah Tahun 2018) h.

sebagai mitra Bank Syariah Mandiri.⁹⁵Sedangkan 3 Bank umum Syariah belum mengungkapkan zakat dalam laporan tahunannya dikarenakan seperti Bank BTPN Syariah tidak mengeluarkan zakat baik dari internal maupun dari eksternal dari tahun ke tahun. Sedangkan Bank Syariah Bukopin dan Maybank Syariah Indonesia yang tidak membuat laporan sumber penggunaan dana zakat, infak dan sedekah karena tidak melakukan aktivitas pengelolaan dan menjalankan fungsi penyaluran dana tersebut. Meskipun secara umum mengungkapkan aktivitas zakat, namun Bank Umum Syariah tidak mengungkapkan metode yang dipakai dan hanya bank Jabar Banten Syariah pada tahun 2016 saja yang menyertakan opini Dewan Pengawas syariah mengenai pengumpulan dan penyaluran dana zakat.

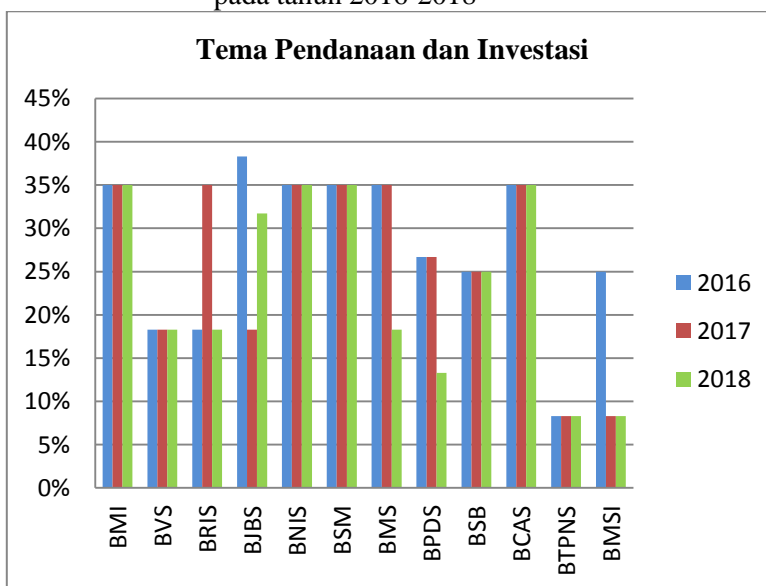
Item aktivitas *gharar*, kebijakan dalam mengatasi keterlambatan pembayaran oleh *insolvent clients*, dan *Current Value balance sheet* seluruh Bank Umum Syariah belum terlihat mengungkapkannya. Sedangkan item *Value Added Statement* rata-rata Bank umum syariah mengungkapkannya dalam bentuk pernyataan nilai tambah dalam laporan tahunan perusahaan dan item ini merupakan item yang banyak diungkapkan dalam tema ini. Meskipun ada beberapa bank yang hanya mengungkapkan di tahun tertentu seperti Bank BRI Syariah yang hanya mengungkapkan

⁹⁵ Data Sekunder (Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri Tahun 2018) h. 424

item ini pada tahun 2017, Maybank Syariah Indonesia pada tahun 2016, Bank Jabar Banten Syariah pada tahun 2016 dan 2018, dan Bank Panin Dubai Syariah pada tahun 2016 dan 2017 namun tidak mengungkapkannya pada tahun 2018. Hal inilah yang membuat nilai indeks ISR yang diperoleh mengalami penurunan. Hanya Bank Victoria Syariah dan Bank BTPN Syariah yang belum terlihat mengungkapkan item ini dari tahun ke tahun.

Perbandingan tingkat pengungkapan antar Bank Umum Syariah pada tema pendanaan dan investasi dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Grafik 4.1 Perbandingan tingkat pengungkapan Tema Pendanaan dan Investasi (*Finance and Investment Theme*) pada tahun 2016-2018



Sumber : hasil olah data sekunder, 2019

Hasil pengungkapan tema pendanaan dan investasi dapat dilihat dari grafik diatas, bank umum syariah dari tahun ke tahun tidak ada yang mengalami peningkatan pengungkapan dalam tema ini. Hanya Bank BRISyariah yang mengalami peningkatan pada tahun 2017 namun kembali mengalami penurunan pada tahun 2018. Bank Jabar Banten Syariah mengalami penurunan pada tahun 2017 kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2018 tetapi tidak lebih baik pengungkapannya daripada tahun 2016. Terdapat empat bank umum syariah yang mengalami penurunan pengungkapan yaitu, Bank Mega Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, dan Maybank Syariah Indonesia dengan penurunan signifikan pada tahun 2017. Sedangkan beberapa bank umum syariah terlihat tidak mengalami perubahan pengungkapan dari tahun ke tahun.

Tingkat pengungkapan tertinggi pada tema ini hanya mencapai 35% dari total 6 item ISR. Bank Muamalat Indonesia, Bank BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri dan Bank Central Asia Syariah yang memperoleh rata-rata tingkat pengungkapan dari tahun 2016-2018 sebesar 35%. Bank BTPN Syariah mendapatkan tingkat pengungkapan terendah yaitu sebesar 8,3% saja.

4.2 Tema Produk dan Jasa (*Product and Services Theme*)

Pada tema Produk dan Jasa dilakukan dengan pemberian skoring pengungkapan terhadap 4 item ISR pada tema ini yaitu status halal atau syariah dalam produk, pengembangan produk,

peningkatan pelayanan dan keluhan pelanggan/ kejadian yang timbul karena ketidaktaatan terhadap peraturan yang berlaku. Hasil skoring dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2 Hasil Skoring Tema Produk Dan Jasa
(*Product and Services Theme*) tahun 2016-2018

Item	BMI			BVS			BRS			EBS			BNS			BSM			BMS			BPS			BSB			BCAS			BTMS			BMSI		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018			
7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
10	0,75	0,75	0,5	0,5	0,75	0,75	0,25	0,75	0,25	0,25	0,75	0,75	1	1	0,75	0,75	1	0,5	1	0,75	0,5	0,75	0,75	0,75	0,75	0,5	0,5	0,5	0,75	0,75	0,75	0	0	0		
11	3,75	3,75	3,5	3,5	3,75	3,75	3,25	3,75	3,25	3,75	3,75	4	4	3,75	3,75	4	3,5	4	3,75	3,5	3,75	3,75	3,75	3,75	3,5	3,5	3,5	3,75	3,75	3,75	3	3	3			
%	93,8%	93,8%	87,5%	87,5%	93,8%	93,8%	81,2%	93,8%	81,2%	93,8%	93,8%	100,0%	100,0%	93,8%	93,8%	100,0%	87,5%	100,0%	93,8%	87,5%	93,8%	93,8%	93,8%	93,8%	87,5%	87,5%	87,5%	93,8%	93,8%	93,8%	75,0%	75,0%	75,0%			
̄	91,7%			89,6%			89,6%			85,4%			97,9%			95,8%			93,8%			91,7%			93,8%			87,5%			93,8%			75,0%		

Sumber: olah data sekunder, 2019

Setiap item yang diberi skor 1 menunjukkan adanya pengungkapan item tersebut dalam laporan tahunan Bank Umum Syariah. Sedangkan skor 0 menunjukkan tidak ditemukannya pengungkapan item tersebut dalam laporan tahunan Bank Umum Syariah. Dari Hasil Skoring diatas dapat dilihat semua bank mengungkapkan item status halal atau syariah dalam produk hal tersebut karena adanya Dewan Pengawas Syariah yang mengawasi setiap produk dan operasional Bank Umum Syariah agar sesuai dengan prinsip syariah. Pengembangan produk juga terus dilakukan oleh semua Bank Umum Syariah terlihat dari hasil skoring menunjukkan Bank Umum Syariah meningkatkan pengembangan

produk agar inovatif dan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Pengembangan produk berupa jasa ataupun teknologi yang dilakukan diantaranya dalam jasa perbankan berupa launchingnya produk BNI Griya Swakarya di tahun 2017,⁹⁶ pengembangan produk Hasanah *Payment* (produk PPOB) yang ditujukan untuk kebutuhan transaksional nasabah ritel Bank BNI Syariah.⁹⁷ BRISyariah juga telah mengembangkan beberapa produk jasa perbankan syariah, seperti Kartu ATM/Debit Gold dan Platinum, New BRISSMART (LAKUPANDAI) dan Giro Faedah Segmen Pemerintah.⁹⁸ Sedangkan pengembangan produk berupa Syariah *Digital Innovation* di mana terdapat fungsi pengembangan aplikasi digital baru, pemeliharaan dan pemantauan performa aplikasi dan juga kerja sama/kolaborasi dengan *startup* dan *fintech* diantaranya Aplikasi 3 aplikasi digital yaitu Wakaf Hasanah sebagai platform berwakaf bagi masyarakat, *Hasanah Lifestyle* sebagai aplikasi informasi gaya hidup Islami dan Hasanah Personal sebagai aplikasi informasi simulasi KPR, pembiayaan dan paket umrah. Bank BNI Syariah telah bekerja sama dengan 3 startup sesuai dengan 4 bidang diatas yaitu Waqara & ITQON untuk bidang *Halal Tourism*, dan Ustadzku untuk bidang

141 ⁹⁶ Data Sekunder (Laporan Tahunan Bank BNI Syariah Tahun 2017) h.

147 ⁹⁷ Data Sekunder (Laporan Tahunan Bank BNI Syariah Tahun 2017) h.

51 ⁹⁸ Data Sekunder (Laporan Tahunan Bank BRISyariah Tahun 2018) h.

Pendidikan.⁹⁹Serta pengembangan produk digital eksisting melalui integrasi dari iBank dan Mobile Banking BRIS Online oleh Bank BRISyariah.¹⁰⁰Tentu dalam pengembangan produk jasa maupun teknologi perbankan telah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas Syariah agar produk-produk tersebut tetap sesuai dengan syariah.

Selain pengembangan produk, peningkatan pelayanan juga terus ditingkatkan oleh semua Bank Umum Syariah mengingat di industri perbankan, persaingan memberikan pelayanan terbaik tidak hanya sebatas sesama bank syariah, tapi juga melibatkan bank konvensional yang tingkat pelayanannya sudah sangat baik. Peningkatan pelayanan berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan teknologi berupa fitur fasilitas layanan *mobile* dan aplikasi untuk kemudahan transaksi, perbaikan mesin ATM, peningkatan pelayanan pengaduan nasabah hingga peningkatan kompetensi untuk pegawai melalui sertifikasi *Teller* dan *Customer Service* dan pelatihan pelayanan prima.

Item terakhir dari tema ini adalah keluhan pelanggan/kejadian yang timbul karena ketidaktaatan terhadap peraturan yang berlaku beberapa bank. Hasil skoring menunjukkan hampir semua Bank Umum Syariah mengungkapkan sub item total

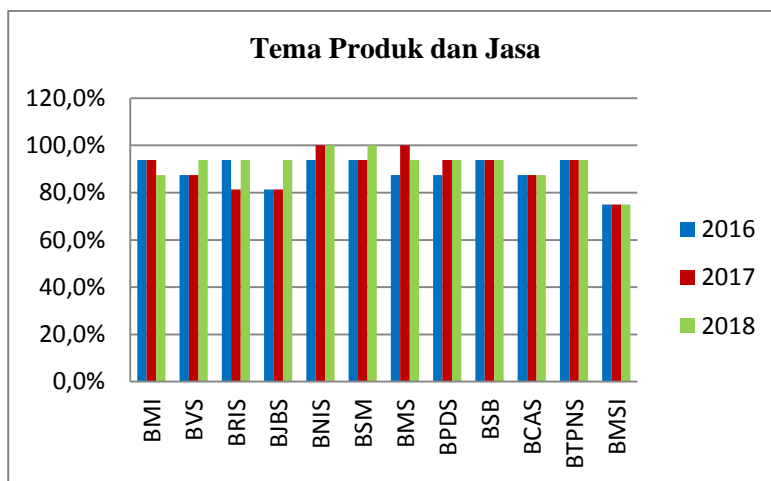
⁹⁹ Data Sekunder (Laporan Tahunan Bank BNI Syariah Tahun 2018) h.

¹⁰⁰ Data Sekunder (Laporan Tahunan Bank BRISyariah Tahun 2018) h.

keluhan konsumen dan penanganan keluhan tersebut, hanya Bank Victoria Syariah dan Maybank Syariah Indonesia yang tidak mengungkapkan sub item total keluhan konsumen dan penanganannya. Sub item denda baik uang maupun non uang terkait pelanggaran juga diungkapkan oleh Bank Umum Syariah. Bank Syariah Bukopin, Bank Central Asia Syariah dan Maybank syariah belum mengungkapkan sub item ini. Sub item selanjutnya yaitu survei atas kepuasan pelanggan. Beberapa Bank Umum Syariah telah melakukan survei atas kepuasan pelanggan diantaranya Bank Muamalat Indonesia, Bank BNI Syariah, dan Bank Bukopin Syariah berturut-turut mengungkapkan dari tahun ke tahun. Bank Victoria Syariah, Bank Syariah mandiri, dan Bank Panin Dubai Syariah hanya mengungkapkan pada tahun 2018, Bank BRISyariah di tahun 2016 dan 2018, Bank Mega syariah pada tahun 2017, sedangkan Bank Jabar Banten Syariah, Bank Central Asia Syariah dan Maybank syariah belum mengungkapkannya.

Perbandingan tingkat pengungkapan antar Bank Umum Syariah pada tema Produk dan Jasa dapat dilihat dalam grafik dibawah ini :

Grafik 4.2 Perbandingan tingkat pengungkapan tema Produk dan Jasa (*product and service theme*) tahun 2016-2018



Sumber: data sekunder diolah, 2019

Dapat dilihat dari grafik diatas, tingkat pengungkapan Bank Umum Syariah pada tema ini cukup baik sekitar 90% dari total 4 item ISR. Beberapa Bank Umum Syariah mencapai tingkat pengungkapan 100% yaitu Bank BNI Syariah rata-rata pengungkapan pada tema ini sebesar 100% berturut-turut pada tahun 2017 dan dapat mempertahankannya pada tahun 2018, Bank Syariah Mandiri pada tahun 2018 dan Bank Mega Syariah pada tahun 2017.

Bank BNI Syariah mendapatkan tingkat pengungkapan tertinggi dibandingkan bank lainnya pada tema ini yaitu sebesar 97%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas produk dan layanan untuk nasabah Bank BNI Syariah lebih baik daripada Bank lainnya meskipun bank lainnya juga mendapatkan indeks ISR yang

baik pada tema produk dan jasa.Perolehan terendah rata-rata pengungkapan pada tema ini sebesar 75% yaitu Maybank Syariah.

4.3 Tema Karyawan (*Employee Theme*)

Pada tema pendanaan dan investasi dilakukan dengan pemberian skoring pengungkapan terhadap 10 item ISR pada tema ini yaitu Karakteristik pekerjaan, Pendidikan dan pelatihan, kesempatan yang sama, kesehatan dan keselamatan kerja, keterlibatan karyawan di perusahaan, lingkungan kerja tempat ibadah yang memadai waktu ibadah/kegiatan religius, perekrutan khusus dan kesejahteraan karyawan. Hasil skoring dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3 Hasil Skoring pengungkapan Tema Karyawan
(*Employee Theme*) Tahun 2016-2018

Item	BMI			BIS			BIS			BIS			BIS			BIS			BIS			BIS		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
11	0,6	0,6	0,8	0,4	0,4	0,6	0,4	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
12	0,75	1	1	0,5	0,75	0,75	1	0,75	0,5	0,5	0,25	0,75	0,75	0,75	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,25	0,5	0,75	0,75	1
13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
19	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Σ	6,35	7,6	7,6	4,3	4,15	4,15	7,6	5,15	4,9	4,1	5,1	4,05	8,35	8,35	8,35	7,35	6,1	7,1	5,1	5,1	6,1	7,1	7,1	7,1
%	63,5%	76,0%	76,0%	43,0%	41,5%	41,5%	76,0%	51,5%	49,0%	41,0%	51,0%	40,5%	83,5%	83,5%	83,5%	73,5%	61,0%	71,0%	51,0%	51,0%	61,0%	71,0%	71,0%	71,0%
̄	71,8%			42,0%			50,8%				46,8%		83,5%			68,5%			54,3%			64,3%		61,0%

Sumber : Olah data sekunder, 2019

Setiap item yang diberi skor 1 menunjukkan adanya pengungkapan item tersebut dalam laporan tahunan Bank Umum Syariah. Sedangkan skor 0 menunjukkan tidak ditemukannya pengungkapan item tersebut dalam laporan tahunan Bank Umum Syariah. Berdasarkan hasil skoring diatas, item karakteristik pekerjaan yang terdiri dari 5 sub item rata-rata hanya mengungkapkan 3 sub item sehingga belum ada yang mencapai skor 1 dalam item karakteristik pekerjaan. Sub item yang seluruh bank umum syariah mengungkapkannya adalah remunerasi, rasio gaji dan jumlah karyawan, jenis dan ketrampilan. Sedangkan jumlah jam kerja dan hari libur belum ada yang mengungkapkan dalam laporan keuangan. Hanya bank victoria syariah yang menyertakan informasi jam kerja pada tahun 2016 sehingga skor yang dihasilkan mencapai 0,8 namun tidak diungkapkan lagi pada tahun selanjutnya.

Selanjutnya Item pendidikan dan pelatihan paling banyak diungkapkan oleh Bank Umum Syariah. Secara umum bank Umum syariah telah melaksanakan pendidikan dan pelatihan setiap tahunnya sebagai upaya untuk peningkatan kualitas karyawan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kapabilitas karyawan sesuai dengan kebutuhan dan rencana pengembangan perusahaan. Pada item pendidikan dan pelatihan yang terdiri dari 4 sub item berupa program pendidikan dan pelatihan bagi karyawan, membangun program dan jenjang karir karyawan, strategi retensi

karyawan dan prosentase karyawan yang menerima pengembangan karir. sub item program dan pelatihan bagi karyawan dan membangun program dan jenjang karir karyawan yang paling banyak dilaporkan oleh perusahaan. Sedangkan sub item strategi retensi karyawan dan prosentase karyawan yang menerima pengembangan karir jarang diungkapkan. Hal tersebut yang membuat bervariasinya hasil skor yang didapatkan. Perolehan penuh skor 1 pada item ini ditunjukkan oleh Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2016 dan 2017, Bank BRISyariah pada tahun 2016, dan Bank Central Asia Syariah pada tahun 2018.

Secara umum Bank Umum Syariah memberikan kesempatan yang sama kepada karyawan di setiap level untuk memperoleh peluang pengembangan karirnya yang dilakukan dengan obyektif tanpa membedakan gender. Terlihat dari hasil skoring pada item ini hampir semua Bank Syariah telah mengungkapkannya hanya Maybank Syariah yang belum terlihat mengungkapkannya dan ada 2 bank yang mulai mengungkapkan pada tahun 2017 yaitu Bank Mega Syariah dan Bank syariah Bukopin. Selanjutnya item kesehatan dan keselamatan kerja seluruh Bank Umum Syariah.namun ada 2 bank yang mulai mengungkapkan pada tahun 2017 yaitu Bank Jabar Banten Syariah dan Bank Victoria Syariah hanya mengungkapkan pada tahun 2016. Item ini sangat diperhatikan oleh perusahaan karena karyawan merupakan aset penting bagi perusahaan dengan

diperhatikannya kesehatan dan keselamatan karyawan akan menciptakan produktivitas kerja yang maksimal bagi perusahaan.

Item keterlibatan karyawan dalam perusahaan hanya ada 2 Bank Umum Syariah yang berturut-turut mengungkapkannya yaitu Bank Muamalat dan Bank BNI Syariah. Bank Muamalat Indonesia secara kontinu telah menerapkan Survei Keterlibatan Karyawan (*Employee Engagement Survey*) yang dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan dan keterikatan karyawan terhadap bank untuk mengetahui kesesuaian antara perilaku tiap karyawan dengan budaya Bank Muamalat. Sedangkan Bank BNI syariah menekankan keterlibatan karyawan dalam bentuk *event* internal BNI syariah untuk mendapatkan keterlibatan yang tinggi dari karyawan. Bank Mega Syariah mengungkapkan item keterlibatan karyawan hanya pada tahun 2016. Bank Umum Syariah lain belum terlihat mengungkapkan pada item ini.

Bank berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, aman, nyaman dan sehat, untuk mendukung karyawan mencapai potensi diri terbaik sehingga menurunkan angka *turnover* karyawan dalam perusahaan. Hal tersebut terlihat dari hasil skoring item lingkungan kerja bahwa pengungkapan pada item ini cukup baik meskipun Bank Victoria Syariah belum mengungkapkan item lingkungan kerja dalam laporan tahunannya. Meskipun item lingkungan kerja sudah diungkapkan dengan baik namun Bank Umum syariah tidak ada yang

mengungkapkan mengenai tempat ibadah yang memadai. Beberapa bank melaporkan kegiatan religius yang dilakukan yaitu berupa doa pagi dan pengajian. Bank Victoria Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, Bank Central ASIA Syariah, Bank BTPN Syariah dari tahun ke tahun tidak melaporkan item ini.

Item selanjutnya perekrutan khusus, sebagian besar Bank Umum Syariah mengungkapkan perekrutan karyawan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dengan melakukan proses rekrutmen secara regular maupun program rekrutmen khusus dengan Program perekrutan khusus dengan *Officer Development Program* (ODP) program ini merupakan program pendidikan selama beberapa bulan untuk mengembangkan potensi serta talenta calon-calon pegawai. untuk pemenuhan pegawai level tertentu diantaranya yang mengungkapkan perekrutan khusus yaitu Bank BNI syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Panin Dubai Syariah, dan Bank Central Asia Syariah secara konsisten mengungkapkannya dari tahun ke tahun. Bank-bank lain belum konsisten mengungkapkan item perekrutan khusus.

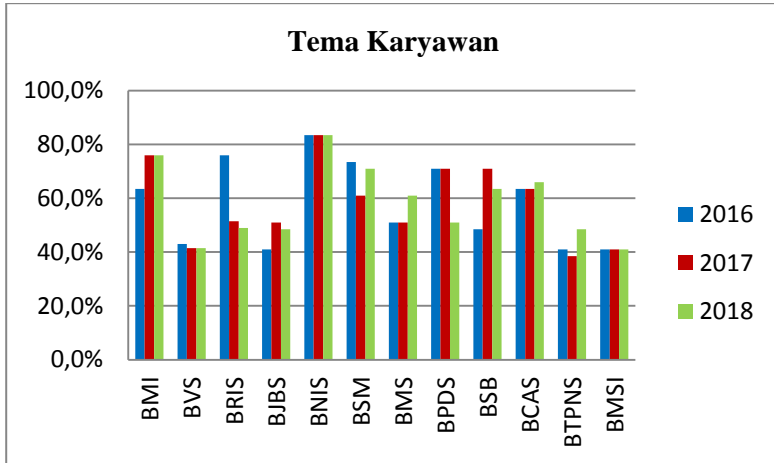
Bank Umum Syariah sangat memperhatikan kesejahteraan karyawan. Terlihat beberapa Bank Umum Syariah telah memiliki yayasan yayasan kesejahteraan pekerjakhusus untuk mengatur masalah karyawan. seperti perusahaan memahami bahwa kompensasi dan benefit yang diberikan kepada pegawai berpengaruh terhadap produktifitas kinerja serta tingkat perputaran

pegawai. Oleh karenanya, perusahaan senantiasa memperhatikan kesejahteraan pegawai dengan berusaha memfasilitasi kebutuhan pegawai dengan harapan terjalin hubungan saling membutuhkan sehingga terjadi keterikatan antara pegawai dan perusahaan yang saling bersinergi untuk mencapai tujuan yang sama. Program peningkatan kesejahteraan pegawai diberikan baik secara material maupun non-material, dimana program yang bersifat material merupakan program kesejahteraan yang berkaitan langsung dengan prestasi karyawan dan kompensasinya dapat diberikan dalam bentuk *reward*, kenaikan gaji, uang pensiun, tunjangan hari raya, tunjangan posisi, bonus, biaya pengobatan, pakaian dinas, uang cuti, dan uang kematian. non-material merupakan program kesejahteraan pegawai dimana Bank memberikan fasilitas dan pelayanan kepada seluruh pegawai tanpa diskriminasi.

Seluruh Bank Umum Syariah telah melaksanakan program-program untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan terbukti dengan hasil skoring yang menunjukkan hampir 100% mengungkapkan item ini. Hanya Bank BTPN Syariah yang baru mengungkapkan pada tahun 2018.

Perbandingan tingkat pengungkapan tema karyawan dari tahun ke tahun dapat dilihat dalam grafik dibawah ini :

Grafik 4.3 Perbandingan tingkat pengungkapan Tema Karyawan
(*Employee Theme*) tahun 2016-2018



Sumber: olah data Sekunder, 2019

Perolehan indeks ISR pada tema karyawan dapat dilihat dalam grafik tingkat pengungkapan pada tema ini Bank Umum Syariah cukup baik meskipun rata-rata pengungkapan sebesar sekitar 50% dari yang diharapkan. Beberapa Bank Umum Syariah mengalami peningkatan pengungkapan diantaranya Bank Muamalat Indonesia mengalami peningkatan pada tahun 2017 dan dipertahankan pada tahun 2018. Bank Central Asia Syariah dan Bank Mega Syariah terlihat mengalami peningkatan pada tahun 2018. Bank BTPN Syariah dan Bank Syariah Mandiri juga mengalami peningkatan pada tahun 2018 meskipun sempat mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2017. Bank BNI Syariah mendapatkan rata-rata tertinggi pada tema ini mencapai

Setiap item yang diberi skor 1 menunjukkan adanya pengungkapan item tersebut dalam laporan tahunan Bank Umum Syariah. Sedangkan skor 0 menunjukkan tidak ditemukannya pengungkapan item tersebut dalam laporan tahunan Bank Umum Syariah. Berdasarkan hasil skoring diatas, item sedekah/donasi hanya Bank BTPN Syariah yang belum terlihat mengungkapkan hal tersebut dikarenakan Bank BTPN Syariah tidak menyediakan dana untuk infak maupun sedekah. Untuk item wakaf, hanya Bank BNI Syariah dan Bank Mega Syariah yang mengungkapkan dari tahun ke tahun. beberapa bank juga mengungkapkan aktivitas wakafnya namun hanya satu tahun saja diantaranya Bank Panin Dubai Syariah pada tahun 2016. Bank Jabar Banten Syariah pada tahun 2017, Bank Syariah Mandiri dan Bank Syariah Bukopin pada tahun 2018. Selanjutnya item *qardul hasan* semua Bank Umum Syariah mengungkapkannya. Item zakat hampir semua Bank Umum Syariah mengeluarkan zakat terlihat dari hasil skoring hanya Bank Syariah Bukopin, Bank BTPN Syariah, dan Maybank Syariah yang tidak mengeluarkan zakat pada tahun tersebut dan Bank Central Asia Syariah mengungkapkan hanya di tahun 2017.

Selanjutnya item pendidikan secara umum Bank Umum Syariah memberikan kontribusinya untuk program pendidikan dengan memberikan bantuan pada sekolah baik secara finansial maupun non finansial, pemberian beasiswa dan memberikan pemberdayaan praktik magang meskipun skor item yang dihasilkan

berbeda-beda pada item ini namun bank telah menunjukkan kepeduliannya untuk membantu program pendidikan. Ada beberapa Bank Umum Syariah yang mulai mengungkapkan pada tahun 2017 yaitu Bank Victoria Syariah dan Maybank Syariah. Sedangkan Bank BTPN Syariah hanya mengungkapkan pada tahun 2018.

Bantuan kesehatan secara berturut-turut diberikan dari tahun ke tahun oleh 5 Bank Umum Syariah yaitu Bank BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Bank Syariah Bukopin dan Bank BTPN Syariah. Hanya Maybank Syariah yang belum memberikan bantuan kesehatan dari tahun ke tahun. Secara umum bantuan kesehatan diberikan bank dalam bentuk memberikan layanan dan bantuan pembayaran layanan kesehatan untuk masyarakat umum, donor darah atau bantuan kesehatan untuk korban bencana. Selain bantuan kesehatan, Bank juga berkontribusi dalam bidang ekonomi yaitu memberikan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat. Diantaranya program yang dilakukan oleh YHT (Yayasan Hasanah Titik) BNI Syariah telah melakukan program pemberdayaan seperti program Santri Hasanah yakni Pesantren penerima program pengembangan ekonomi pesantren, Kampung domba di Caringin, Pemberdayaan ekonomi komunitas ibu rumah tangga, Pemberdayaan ekonomi kelompok melalui duta hasanah BNI Syariah, Modal usaha untuk masyarakat dhuafa, dan Peningkatan keterampilan anak-anak

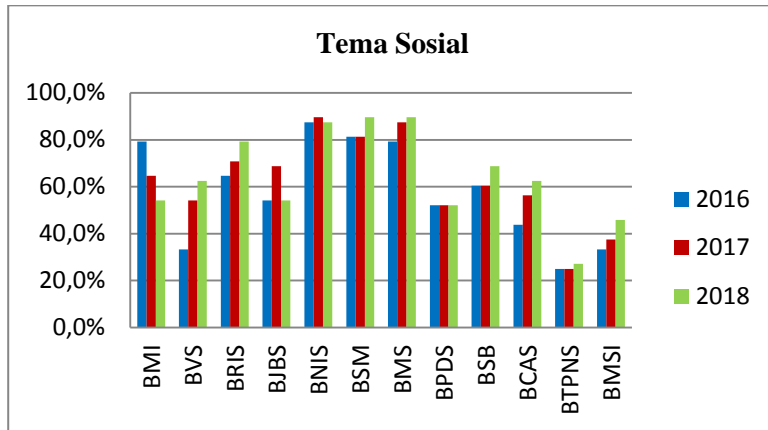
dhuafa di SMU Bogor.¹⁰¹ Meskipun begitu ada 3 Bank Umum Syariah belum menerapkan pemberdayaan ekonomi yaitu Bank Victoria Syariah, Bank Jabar Banten Syariah dan Bank Panin Dubai Syariah.

Bank Umum Syariah memiliki kepedulian terhadap anak yatim piatu sangat baik terlihat dari hasil skoring seluruh Bank Umum Syariah telah melaksanakannya. Hanya Bank BTPN Syariah yang belum terlihat mengungkapkan dari tahun ke tahun. Untuk item pembangunan atau renovasi masjid juga telah dilaksanakan Bank Umum Syariah beberapa bank yang belum terlihat mengungkapkan dari tahun ke tahun yaitu Bank Panin Dubai Syariah dan Bank BTPN Syariah. Selanjutnya item Kegiatan sosial lainnya telah dilaksanakan dengan baik oleh Bank Umum Syariah. Diantaranya pemberian buku, mudik bareng, penyembelihan hewan qurban dll. Hanya Bank BTPN Syariah yang belum melaksanakan kegiatan sosial. Yang terakhir item sponsor telah dilakukan oleh beberapa bank diantaranya Bank Muamalat Indonesia, Bank BRISyariah, Bank BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah.

Dari keseluruhan item pada tema ini hanya item kegiatan kepemudaan yang belum mendapatkan perhatian khusus oleh Bank Umum Syariah. Terlihat dari hasil skoring tidak ada satupun Bank

¹⁰¹ Data Sekunder (Laporan Tahunan Bank BNI Syariah tahun 2018), h.

Umum Syariah yang mengungkapkannya. Perbandingan tingkat pengungkapan tema sosial dapat dilihat pada grafik dibawah ini
 Grafik 4.4 Perbandingan tingkat pengungkapan tema sosial (*Society Theme*) tahun 2016-2018



Sumber : Olah data sekunder, 2019

Dilihat dari grafik diatas dapat dilihat pengungkapan Bank Umum Syariah pada tema Sosial dari total 12 item ISR beberapa bank cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Diantaranya Bank Umum Syariah yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yaitu Bank BRISyariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank Central Asia Syariah, Bank BTN Syariah dan MayBank Syariah. Meskipun beberapa bank mengalami peningkatan pengungkapan dari tahun ke tahun, namun indeks rata-rata yang dihasilkan dari beberapa bank tersebut belum mampu menjadi perolehan tingkat pengungkapan tertinggi.

Pada tema ini diungkapkan dengan baik oleh Bank BNI Syariah dan Bank Mega Syariah, kemudian disusul oleh Bank Syariah Mandiri dengan perolehan diatas 80%. Perolehan pengungkapan tertinggi pada tema sosial ini ditempati oleh Bank BNI Syariah dengan rata-rata indeks ISR 88,2% meskipun pengungkapannya sempat mengalami penurunan pada tahun 2018. Hal tersebut menunjukkan Bank BNI telah merealisasikan aktivitas sosialnya kepada masyarakat dengan baik dibandingkan dengan bank-bank lainnya. Bank BTPN Syariah memperoleh tingkat pengungkapan terendah pada tema ini yaitu sebesar 25% dari indeks ISR yang diharapkan karena Bank BTPN Syariah berturut-turut dari tahun ke tahun tidak mengungkapkan beberapa item dalam tema sosial ini.

4.5 Tema Lingkungan (*Environment Theme*)

Pada tema pendanaan dan investasi dilakukan dengan pemberian skoring pengungkapan terhadap 7 item ISR pada tema ini yaitu kampanye *go green*, konservasi lingkungan (mengurangi efek pemanasan global, pengelolaan limbah, pengelolaan air bersih), perlindungan terhadap flora dan fauna yang liar dan terancam punah, polusi, perbaikan dan pembuatan sarana umum, audit lingkungan dan kebijakan manajemen lingkungan. Hasil skoring dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.5 Hasil skoring Tema Lingkungan (*Environment Theme*)
tahun 2016-2018

Item	BNI			BIS			BIS			BIS			BSM			BMS			BPS			BSB			BCAS			STPM			BMSI			
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	
33	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	
35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	
37	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Σ	2	2	2	0	0	1	5	4	4	0	0	1	4	4	4	5	3	4	0	3	3	1	1	1	1	1	1	1	0	2	2	0	0	0
%	28,6%	28,6%	28,6%	0,0%	0,0%	14,3%	71,4%	57,1%	57,1%	0,0%	0,0%	14,3%	57,1%	57,1%	57,1%	42,9%	57,1%	0,0%	42,9%	42,9%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	0,0%	14,3%	14,3%	0,0%	28,6%	28,6%	0,0%	0,0%
∑	28,6%	28,6%	28,6%	0,0%	0,0%	4,8%	61,9%	57,1%	57,1%	0,0%	0,0%	4,8%	57,1%	57,1%	57,1%	42,9%	57,1%	0,0%	42,9%	42,9%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	0,0%	19,0%	19,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	

Sumber: Olah data Sekunder, 2019

Setiap item yang diberi skor 1 menunjukkan adanya pengungkapan item tersebut dalam laporan tahunan Bank Umum Syariah. Sedangkan skor 0 menunjukkan tidak ditemukannya pengungkapan item tersebut dalam laporan tahunan Bank Umum Syariah. Dilihat dari hasil skoring diatas, item kampanye *go green* hanya ada 4 Bank Umum Syariah yang mengungkapkannya yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah dari tahun ke tahun dan Bank Mega Syariah pada tahun 2017 dan 2018. Kampanye *go green* dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan diantaranya melakukan penanaman pohon atau pemberian bibit tanaman.

Item konservasi lingkungan juga mendapatkan perhatian terlihat dari hasil skoring menunjukkan sebagian besar Bank

Umum Syariah telah melakukan mengimplementasikan *green banking* sesuai dengan imbauan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan cara melakukan penghematan penggunaan kertas dan mendaur ulang limbah kertas menjadi produk atau sovenir seperti yang dilakukan oleh Bank BNI Syariah dalam program retas kertas oleh Yayasan Nara Kreatif.¹⁰²Selain itu bank juga melakukan penghematan energi listrik dalam operasionalnya. Sebagian besar Bank Umum Syariah telah mengungkapkan aktivitas konservasi lingkungan Bank yang belum terlihat melaksanakannya yaitu Bank Victoria Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, dan Maybank Syariah.

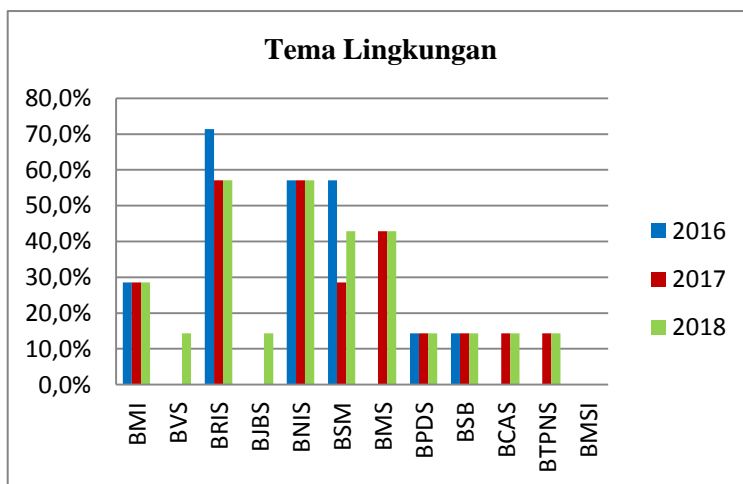
Item polusi, perbaikan dan pembuatan sarana umum, audit lingkungan dan kebijakan manajemen lingkungan masih kurang mendapatkan perhatian Bank Umum Syariah terlihat dari hasil skoring hanya sebagian Bank Umum Syariah yang mengungkapkannya diantaranya item perbaikan dan pembuatan sarana umum hanya Bank BNI Syariah dari tahun ke tahun mengungkapkan item tersebut. Bank Victoria Syariah dan Bank Jabar Banten Syariah hanya mengungkapkan pada tahun 2018, Bank BRISyariah ditahun 2016, dan Bank Syariah Mandiri pada tahun 2016 dan 2018. Item Audit lingkungan hanya diungkapkan oleh Bank BRISyariah, dan item kebijakan manajemen lingkungan

¹⁰² Data sekunder (Laporan Tahunan Bank BNI Syariah tahun 2018)

diungkapkan oleh Bank BRISyariah, Bank BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Mega Syariah. Sedangkan Bank-bank lainnya belum terlihat mengungkapkannya.

Pada tema ini, item polusi dan perlindungan terhadap flora dan fauna yang liar dan terancam punah belum ada Bank Umum Syariah yang mengungkapkannya. Perbandingan pengungkapan tema lingkungan dari tahun ke tahun dapat dilihat dalam grafik dibawah ini :

Grafik 4.5 perbandingan tingkat pengungkapan Tema Lingkungan
(*Environment Theme*) tahun 2016-2018



Sumber : Olah data sekunder, 2019

Dilihat dari grafik diatas, Bank Umum Syariah kurang memperhatikan aspek lingkungan. Hal tersebut dikarenakan operasional Bank Syariah tidak berdampak secara langsung bagi kelestarian lingkungan. Berbeda dengan perusahaan manufaktur

atau perusahaan yang operasionalnya berkaitan dengan alam dan lingkungan yang berdampak menimbulkan kerusakan lingkungan. Maka dari itu, tingkat pengungkapan atau indeks ISR yang dihasilkan juga rendah pada tema ini. Hanya berkisar 23% dari total indeks yang diharapkan.

Meskipun begitu, Bank BRI Syariah mengungkapkan tema lingkungan dengan baik pada tahun 2016 sebesar 71,4% dan kemudian mengalami penurunan drastis menjadi 57,1% pada tahun 2017 dan 2018. Meskipun mengalami penurunan drastis Bank BRI Syariah mampu memperoleh rata-rata tingkat pengungkapan sebesar 61,9% kemudian disusul oleh Bank BNI Syariah dengan perolehan rata-rata pengungkapan sebesar 57,1%. Beberapa Bank Umum Syariah baru mulai mengungkapkannya di tahun 2018 yaitu Bank Victoria Syariah dan Bank Jabar Banten Syariah. Maybank Syariah tidak terlihat mengungkapkan aktivitas lingkungan pada tema ini.

4.6 Tema Tata kelola perusahaan (*Corporate Governance Theme*)

Pada tema pendanaan dan investasi dilakukan dengan pemberian skoring pengungkapan terhadap 21 item ISR pada tema ini yaitu Profil dan strategi perusahaan, Struktur Organisasi, Rincian nama Dewan komesaris, Remunerasi Dewan komesaris, Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite, Rincian nama dan profil DPS,

Remunerasi, Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah, Pelaksanaan prinsip syariah dalam penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa, Struktur kepemilikan saham, Perkara hukum, Penanganan benturan kepentingan, Penerapan fungsi kepatuhan Bank, Penerapan fungsi audit intern , Penerapan fungsi audit ekstern , Batas maksimum penyaluran dana , Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan , Kebijakan anti korupsi, pencucian uang dan praktik menyimpang lainnya dan Etika Perusahaan. Berikut adalah tabel hasil skoring pengungkapan tema tata kelola perusahaan.

Tabel 4.6 Hasil skoring tema tata kelola perusahaan (*Corporate Governance Theme* tahun 2016-2018

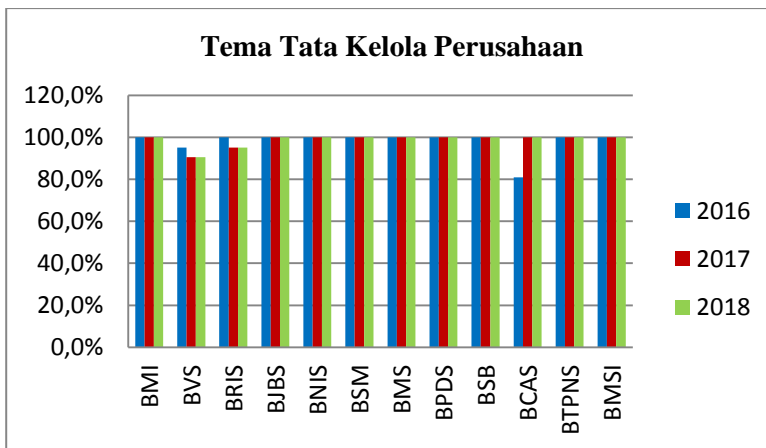
Item	BIM			BIS			BPS			BBS			BNS			BOM			BMS			BPOS			BGS			BCAS			BPKS			BMS					
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018			
40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
41	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
42	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
43	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
44	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
45	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
46	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
47	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
48	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
49	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
51	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
52	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1				
53	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1				
54	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
55	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
56	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
57	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1			
58	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
59	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Σ	21	21	21	20	19	19	21	20	20	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	17	21	21	21	21	21	21	21				
%	100,0%	100,0%	100,0%	95,2%	90,5%	90,5%	100,0%	95,2%	95,2%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	81,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%					
γ	100,0%			92,2%			96,0%			100,0%			100,0%			100,0%			100,0%			100,0%			100,0%			100,0%			93,7%			100,0%			100,0%		

Sumber: Olah data sekunder, 2019

Setiap item yang diberi skor 1 menunjukkan adanya pengungkapan item tersebut dalam laporan tahunan Bank Umum Syariah. Sedangkan skor 0 menunjukkan tidak ditemukannya pengungkapan item tersebut dalam laporan tahunan Bank Umum Syariah. Dapat dilihat dari hasil Skoring, tema tata kelola perusahaan paling banyak diungkapkan oleh Bank umum syariah. Hampir Seluruh item telah diungkapkan dalam laporan tahunan Bank Umum Syariah. Meskipun ada beberapa item yang belum diungkapkan diantaranya item remunerasi Dewan Pengawas Syariah Bank Victoria Syariah belum mengungkapkan dari tahun ke tahun dan Bank BRISyariah tidak mengungkapkan pada tahun 2017 dan 2018. Selanjutnya item perkara hukum tidak diungkapkan Bank Central Asia Syariah pada tahun 2016. Item penanganan benturan kepentingan tidak diungkapkan Bank Victoria Syariah pada tahun 2017 dan 2018 disusul Bank Bank Central Asia Syariah pada tahun 2016. Selanjutnya item item batas maksimum penyaluran dana dan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan tidak diungkapkan Bak Central Asia Syariah pada tahun 2016.

Secara umum item-item dalam tema ini diungkapkan sangat baik oleh Bank Umum Syariah sehingga perolehan skor ISR banyak yang mencapai 100% dalam pengungkapannya. Perbandingan rata-rata pengungkapan tema tata kelola perusahaan dapat dilihat dalam grafik dibawah ini :

Grafik 4.6 Perbandingan tingkat pengungkapan tema Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance Theme*) tahun 2016-2018



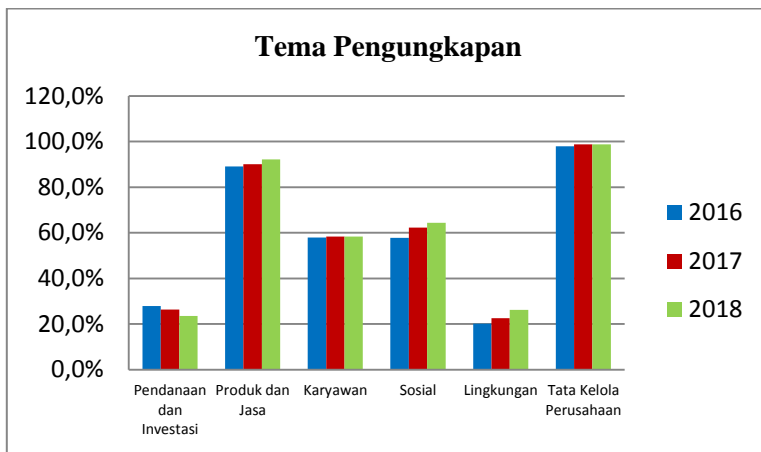
Sumber: olah data sekunder, 2019

Pada tema tata kelola perusahaan pengungkapannya sangat baik terlihat hampir seluruh Bank Umum Syariah mendapatkan nilai indeks pengungkapan 100% dari tahun ke tahun. meskipun beberapa bank ada yang mengalami penurunan yaitu Bank Victoria Syariah dan Bank BRISyariah mengalami penurunan pada tahun 2017 hal tersebut mengakibatkan rata-rata indeks ISR yang diperoleh sebesar 92,1% dan 96,8%. Bank BTPN Syariah mengalami peningkatan pada tahun 2017 sehingga pengungkapannya menjadi 100% pada tahun tersebut dan dapat mempertahankannya pada tahun berikutnya. Baiknya tingkat pengungkapan pada tema tata kelola perusahaan tidak terlepas dari adanya Peraturan Bank Indonesia PBI No.11/33/PBI/2009 Tentang

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* dengan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) yang kemudian diungkapkan dalam item-item ISR pada tema ini.

4.7 Perbandingan indeks ISR berdasarkan tema ISR tahun 2016-2018

Grafik 4.7 Perbandingan indeks ISR dari ke enam tema ISR pada tahun 2016-2018



Sumber: olah data sekunder, 2019

Berdasarkan tabel diatas, hasil pengungkapan CSR Bank Umum Syariah menunjukkan pengungkapan setiap tema dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan Bank Umum Syariah selalu melakukan perbaikan terus menerus dalam meningkatkan kualitas produk dan jasa, memperhatikan

kesejahteraan karyawan, meningkatkan aktivitas sosialnya, peduli terhadap lingkungan dan tata kelola perusahaan yang baik. Meskipun tema pendanaan dan investasi mengalami penurunan pengungkapan sebesar 1,6% pada tahun 2017 dan mengalami penurunan kembali sebesar 2,8% pada tahun 2018.

Tema tata kelola perusahaan paling banyak diungkapkan oleh Bank Umum Syariah dengan perolehan indeks ISR mencapai 98% pada tahun 2016 dan mengalami peningkatan 0,8% pada tahun 2017 dan dapat mempertahankannya pada tahun 2018 dengan tingkat pengungkapan tema ini mencapai 98,8%. Pengungkapan terendah yaitu tema lingkungan kurang mendapat perhatian Bank Umum Syariah sehingga indeks ISR yang dihasilkan hanya mencapai 26,2% dari total yang diharapkan. Hal ini berbeda dengan penelitian Brilyanti (2015) bahwa tema yang paling banyak diungkapkan Bank Umum Syariah adalah tema sosial.

4.8 Predikat Tingkat Pengungkapan CSR Berdasarkan Indeks ISR tahun 2016-2018

Pada bagian ini akan di sajikan perbandingan tingkat pengungkapan CSR antar Bank Umum Syariah berdasarkan indeks ISR dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 yang diperoleh dari rata-rata setiap tahunnya. kemudian akan dibandingkan antar Bank Umum Syariah dan diberikan predikat sesuai dengan ketentuan pada Bab III yaitu : Indeks ISR 81% s/d 100% Sangat Informatif,

indeks ISR 66% s/d <81% Informatif , Indeks ISR 51% s/d <66% Kurang Informatif dan indeks ISR 0% s/d <51% Tidak Informatif .

Berdasarkan Hasil skoring, indeks ISR yang diperoleh menghasilkan predikat tingkat pengungkapan CSR masing-masing Bank Umum Syariah dari tahun 2016 sampai dengan 2018. Sebagaimana predikat tingkat pengungkapan CSR berdasarkan ISR ditunjukkan pada tabel 4.7 dibawah ini :

Tabel 4.7 predikat tingkat pengungkapan CSR berdasarkan Indeks ISR

KODE	Bank Umum Syariah	Indeks ISR			Rata-rata	Predikat
		2016	2017	2018		
BMI	Bank Muamalat Indonesia	74,5%	73,7%	71,2%	73,1%	Informatif
BVS	Bank Victoria Syariah	54,8%	57,1%	60,8%	57,6%	Kurang informatif
BRIS	Bank BRISyariah	77%	71,7%	72,1%	73,6%	Informatif
BJBS	Bank Jabar Banten Syariah	61,9%	64,5%	65%	63,8%	Kurang informatif
BNIS	Bank BNI Syariah	82,8%	83,7%	83,3%	83,3%	Sangat Informatif
BSM	Bank Syariah Mandiri	79,9%	74,5%	79,9%	78,1%	Informatif
BMS	Bank Mega Syariah	68,7%	76,2%	76,2%	73,7%	Informatif
BPDS	Bank Panin Dubai Syariah	67,4%	67,8%	63,2%	66,1%	Informatif
BSB	Bank Syariah Bukopin	63,9%	69,3%	69,8%	67,7%	Informatif
BCAS	Bank Central Asia Syariah	57%	67,8%	69,5%	64,8%	Kurang informatif
BTPNS	Bank BTPN Syariah	53,9%	55,2%	57,3%	55,4%	Kurang informatif
BMSI	Maybank Syariah Indonesia	56%	55,2%	56,8%	56%	Kurang informatif

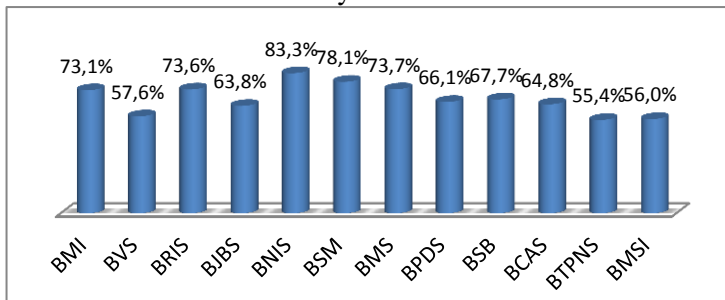
Sumber: Olah data sekunder, 2019

Hasil Indeks ISR yang diperoleh dari tahun ke tahun menunjukkan sebagian besar Bank Umum Syariah mengalami peningkatan dan cenderung stabil. Ada yang mengalami penurunan pengungkapan seperti Bank Muamalat Indonesia yang terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Disusul Bank BRI

syariah dan Bank Panin Dubai Syariah mengalami penurunan pada tahun 2017. Berdasarkan ketentuan predikat yang telah ditentukan, Hanya Bank BNI Syariah yang mendapatkan predikat sangat informatif dengan perolehan indeks ISR sebesar 83,3%. Bank Umum Syariah yang mendapatkan predikat informatif ada 6 bank yaitu Bank Syariah Mandiri dengan perolehan indeks ISR 78,1%, Bank Mega Syariah sebesar 73,7%, Bank BRISyariah sebesar 73,6%, Bank Muamalat Indonesia sebesar 73,1%, Bank Panin Dubai Syariah sebesar 66,1% , dan Bank Syariah Bukopin sebesar 67,7%.

Bank Umum syariah dengan predikat kurang informatif di tempati oleh 5 Bank Umum Syariah yaitu Bank Central Asia Syariah dengan indeks ISR sebesar 64,8%, Bank Jabar Banten syariah sebesar 63,8%, Bank Victoria Syariah sebesar 57,6%, Maybank Syariah sebesar 56% dan Bank BTPN Syariah mendapatkan perolehan terendah yaitu sebesar 55,4%. Berikut lebih jelasnya disajikan dalam bentuk diagram dibawah ini :

Grafik 4.8 perbandingan tingkat pengungkapan CSR berdasarkan indeks ISR Bank Umum Syariah tahun 2016-2018



Dari hasil perolehan rata-rata indeks ISR pada Bank Umum Syariah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 ini dapat ditentukan predikat tingkat pengungkapan CSR berdasarkan indeks ISR. Predikat sangat informatif di peroleh Bank BNI Syariah dengan perolehan sebesar 83,3%. Hal tersebut dikarenakan Bank BNI Syariah terlihat unggul hampir di semua pengungkapan tema ISR dan Terlihat pengungkapan CSR Bank BNI Syariah mengalami kenaikan indeks ISR dan selalu mendapatkan indeks ISR diatas 80%. Hal tersebut yang mengantarkan Bank BNI Syariah mendapatkan predikat tertinggi. Kemudian disusul oleh Bank Syariah mandiri dengan predikat informatif dengan perolehan indeks ISR 78,1%. Bank BTPN Syariah dengan perolehan indeks terendah sebesar 55,4% dengan predikat kurang informatif. Sedangkan tingkat pengungkapan rata-rata secara keseluruhan pengungkapan CSR berdasarkan ISR Bank Umum Syariah di Indonesia adalah Informatif. Sehingga dapat dikatakan Bank Umum Syariah telah melakukan prinsip-prinsip CSR yaitu Prinsip Tauhid yang mana telah mempertanggungjawabkan aktivitasnya kepada Allah. Sebagai Khalifah yang amanah dengan ikut serta menjaga alam dan lingkungan. Menjalin ukhuwah dengan memberikan bantuan dengan penyaluran CSR dan menjalankan prinsip keadilan bagi seluruh stakeholder yang berkepentingan dengan perusahaan untuk mencapai tujuan masalah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Bank Umum Syariah di Indonesia berdasarkan *Islamic social Reporting* (ISR) indeks. Berdasarkan hasil analisis perhitungan indeks ISR pada Bank Umum Syariah tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan tingkat pengungkapan CSR berdasarkan ISR indeks pada 12 Bank Umum Syariah di Indonesia tergolong informatif dan terus mengalami peningkatan pengungkapan CSR dari tahun ke tahun.

Hasil penelitian menunjukkan dari ke enam tema, tema yang paling banyak diungkapkan adalah tema produk dan jasa dan tema tata kelola perusahaan dibandingkan dengan tema lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Bank Umum Syariah memperhatikan kehalalan dan pengembangan suatu produk dan peningkatan pelayanan yang diberikan serta menunjukkan tata kelola perusahaan yang baik. Sedangkan tema lingkungan yang paling rendah diungkapkan oleh Bank Umum Syariah.

Dari 12 Bank Umum Syariah yang diteliti, Bank BNI Syariah berturut-turut dari tahun 2016 sampai dengan 2018 memperoleh rata-rata indeks ISR tertinggi dibandingkan dengan bank-bank yang lain dengan perolehan mencapai 83,3% dengan predikat sangat informatif. Sedangkan Bank BTPN Syariah perolehan indeks ISR terendah sebesar 55,4% dengan predikat kurang informatif.

5.2 Saran

1. Bagi regulator

Diharapkan Bank Indonesia agar membuat standar pelaporan tanggungjawab sosial untuk perbankan syariah. Mengingat model ISR masih merupakan wacana dan tahap pengembangan dari para peneliti-peneliti dan bukan model pengukuran CSR bank syariah yang dijadikan standar resmi saat ini. Sehingga disarankan pembuatan standar pelaporan tersebut dapat mengacu pada Indeks ISR.

2. Bagi bank syariah.

Dari hasil penelitian yang didapatkan diharapkan bank-bank yang masih belum maksimal mengungkapkan CSR nya untuk kedepannya dapat memperbaiki pelaporan tanggungjawab sosialnya.terutama Bank BTPN Syariah dan Bank Victoria Syariah. Untuk Bank BNI Syariah tetap

mempertahankan dan meningkatkan pengungkapan CSR nya. Sedangkan bagi Bank Umum Syariah lainnya agar meningkatkan tingkat pengungkapan CSR nya terutama pada tema-tema yang kurang mendapatkan perhatian Bank Umum Syariah melalui *annual report*, laporan GCG, laporan keberlanjutan maupun media lainnya sebagai bentuk upaya meningkatkan kepercayaan *stakeholder*.

3. Bagi peneliti selanjutnya.

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan terus mengembangkan item ISR sehingga benar-benar relevan untuk diamplikasikan pada bank syariah. Selain itu, menambah sampel dan jumlah periode serta menambah data dengan cara wawancara atau media elektronik lainnya sangat disarankan agar hasil penelitian lebih komprehensif dan menunjukkan keadaan sesungguhnya.

DAFTAR PUSTAKA

Ahzar, F.A dan Trisnawati, *Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Bank Syariah Di Indonesia*, Proceeding Seminar Nasional , 2013

Anggrahini, *Analisis Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah Di Indonesia Berdasarkan Islamic Social Reporting Indeks*” Artikel Ilmiah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya, 2015.

Anshori, Abdul G., *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2007.

Arifin dan Wardani, *Islamic corporate social responsibility disclosure, reputasi, dan kinerja keuangan: Studi pada bank syariah di Indonesia*, Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia Vol. 20 No.1 Juni, 2016.

Arikunto, S, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 201

Aryati, Nita D., *Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016)*, Naskah publikasi , 2017.

Azwar, Saifuddin ,*Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998, h.91

Bank

Indonesia,<https://www.bi.go.id/id/perbankan/syariah/Contents/Default.aspx> diakses pada tanggal 3 Agustus 2019

Bawafi,M.H dan Adi Prasetyo,*Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas sebagai Variabel Pemoderasi*, Jurnal Review Akuntansi dan Keuangan, 2015

Brilyanti, F.A., *Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2013 – 2015*, STIE Dewantara, 2016.

Darmawati ,”*Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Islam*”, Mazahib : Vol. XIII, No. 2, Desember 2014.

Data Sekunder Laporan Tahunan 2018 Publikasi BNI Syariah.

Data Sekunder Laporan Tahunan 2018 Publikasi BRISyariah.

Dewi, et.al, *Perkembangan Penelitian di bidang Pengungkapan di Indonesia : Telaah Konseptual*, Jurnal Siasat Bisnis Vol.22 No 1, 2018

Efriyanti et, al., *Analisis Perbandingan Pengungkapan Dan Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Terhadap PT.Bank Negara Indonesia* , Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol. 3, No. 2, September 2012

Fashikhah *et. al.*, *Determinan Environmental Disclosures Perusahaan Manufaktur Di Indonesia Dan Malaysia*, Jurnal Akuntansi Indonesia, Vol. 7 No. 1 Januari 2018.

Fauziah & Yudho , *Analisis Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial PerbankanSyariah Di Indonesia Berdasarkan Islamic Social Reporting Indeks*”, Jurnal Dinamika Akuntansi Vol. 5, No. 1, Maret 2013.

Fitria dan Hartanti, *Islam Dan Tanggung Jawab Sosial:Studi*

Perbandingan Pengungkapan Berdasarkan Global Reporting Indeks. simposium nasional akuntansi 13 Purwokerto, 2010.

Fitriasuri, *Praktek Pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Setelah Konvergensi IFRS Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia*, Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM Sosial, Ekonomi dan Humaniora, 2017.

Fitriyah , *et.al.*, *Kinerja Keuangan Dalam Kerangka Maqashid Syariah: Pengaruhnya Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Islamic Social Reporting Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia)*, Jurnal Riset Aksioma Vol. 15, No. 2, 2016.

Freeman, R. E., *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Pitman Publishing, Boston. 1984\

Gustani, *Analisis Tingkat Pengungkapan Kinerja Sosial Bank Syariah Berdasarkan Islamic Social Reporting Index (Indeks ISR)*.Skripsi Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (SEBI), 2013.

Gustian dan Faisal, *Analisis Perbandingan Penggunaan GRI Indeks dan ISR Indeks Dalam Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Perbankan Indonesia Tahun 2010 – 2013*, Diponegoro Journal Of Accounting Vol.4, No. 4, 2015.

Hadi, Nor, *Corporate Social Responsibility*, edisi pertama, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014

Handoko, Yunus, *Implementasi Social and Environmental*

Disclosure dalam Perspektif Teoritis, Jurnal JIBEKA, Vol.8 No.2, 2014

Haniffa, Ros ”*Sosial Reporting Disclosure an Islamic Perspective*”, Indonesian and Management Accounting Research, Vol 2 No. 1, 2002.

Hassan & Harahap, *Exploring Corporate Social Responsibility Disclosure: The Case of Islamic Banks*, *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 3 No. 3, 2010.

Hidayanti dan Sunyoto, *Pentingnya Pengungkapan (Disclosure) Laporan Keuangan Dalam Meminimalisasi Asimetri Informasi (Kajian Literatur Dan Riview Beberapa Artikel Penelitian Terkait Pengungkapan)*, Jurnal WIGA Vol. 2 No. 2, September 2012

Irmadariyani, Ririn ”*Pengungkapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial (Corporate Social Responsibility Disclosure) sebagai Pengungkapan Sukarela Kebutuhan Informasi Stakeholder pada Official Website Perusahaan (Studi Pada PT. Indosat Tbk)*”, 2010.

Islamic Finance Country Index IFCI 2017

Junaidi, *Analisis Pengungkapan CSR Perbankan Syariah Di Indonesia Berdasarkan Islamic Social Reporting Index*, Jurnal Akuntansi & Investasi STIE Muhammadiyah, 2014, h. 76.

Keraf, Sonny, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, Yogyakarta: Kanisius, 1998

Lako, Andreas , *Dekonstruksi CSR & Reformasi Paradigma Bisnis dan Akuntansi*, Jakarta : Erlangga, 2011.

Latifah, Amalia N., *Islamic Social Reporting Sebagai Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Perbankan Syariah* , 2016.

Lindawati dan Amalia Nur P., *Corporate Social Responsibility: Implikasi Stakeholder dan Legitimacy Gap Dalam Peningkatan Kinerja Perusahaan*, Jurnal Akuntansi Multiparadigma (JAMAL) Vol.6, No.1, Malang, April 2015

Luthfi , Muhammad , *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dan Kinerja Perusahaan (literature review)*, Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen, Vol. 2, No. 2, Desember 2013

Mahmud, Amir dan Rukmana, *Bank Syariah : Teori, kebijakan dan studi empiris di Indonesia*, Jakarta : Erlangga, 2010

Merina dan Verawaty , *Analisis Komparasi Indeks Islamic Social Reporting Perusahaan Perbankan Syariah dan Perusahaan Go Publik Yang Listing Di Jakarta Islamic Index*, Jurnal AKUISISI Vol 12 No. 2, 2016

Muhammadinah, *Analisis Kelengkapan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Berdasarkan Indeks Global Reporting Initiative (GRI) Pada Bank Umum Syariah (BUS) Di Indonesia*, I-finance Vol.2 No.2 Desember 2016

Mukhibad, Hasan, *Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pengungkapan Islamic Social Reporting*, Jurnal Akuntansi Multiparadigma Vol.9 No. 2, 2018

Othman dan Thani, *Islamic Social Reporting Of Listed Companies*

In Malaysia” International Business & Economics Research Journal, Volume 9, Number 4, April 2010.

Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006

Puspha Sonia, et.al ,*Pengaruh Pembiayaan, Kas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Islamic Social Reporting (ISR) Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening*, Jurnal Ekonomi Volume 25, Nomor 1 Maret 2017.

Raditya, Amilia Nurul, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) Pada Perusahaan Yang Masuk Daftar Efek Syariah (DES)*, Skripsi Universitas Indonesia, Depok, 2012.

Roadmap Otoritas Jasa Keuangan 2018

Rostiani & Sukanta, *Pengaruh Dewan Pengawas Syariah, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012-2016)* , Vol. 4 No. 2. September 2018

Sari, Dea D., *Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Bank Syariah Di Indonesia Dan Malaysia Tahun 2014-2016* , Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Surakarta ,2018

Setyani, Nur H., *Implementasi kebijakan “Corporate Social Responcibility paba PT.Bank Muamalat Inonesia Kota Semarang*, Semarang, 2012, h.5

Sofyani, et.al . *“Islamic Social Reporting IndexSebagai Model pengukuran Kinerja Sosial Perbankan Syariah: Studi Komparasi Malaysia dan Indonesia”*. Jurnal Dinamika Akuntansi Vol.4 No.1, Maret, 2012.

Sonia, et.al , *Pengaruh Pembiayaan, Kas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Islamic Social Reporting (ISR) Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening*, Jurnal Ekonomi Vol. 25, No. 1 Maret 2017

Subiakto, H, *Analisis Isi Media Metode dan Pemanfaatannya. Dalam B. Bungin (Penyunt.), Metodologi Penelitian Kualitatif* , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, cetakan ke-28, Bandung : Alfabeta, 2018, h.62

Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung:Remaja, 2001

Suwardjono, *Teori Akuntansi, Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama , 2011

Umam, Khotibul , *Trend pembentukan Bank Umum Syariah pasca undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 (konsep, regulasi dan implementasi)*, edisi pertama, Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2009

Umar, Husein , *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada., 2007

Undang- Undang Dasar No.21 Tahun 2008

Virgowati, *Analisis Kinerja Sosial Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Dan Muamalat Indonesia)*, Artikel Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013.

Wafiqoh , Sakinah, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi*

Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Bank Syariah Di Indonesia (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2011-2016) , Skripsi, Universitas Lampung, 2018.

Wargianti dan Budhisulistiyawati, *Studi Tentang CSR (Corporate Social Responsibility) Di PT. Madubaru Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Jurnal Universitas Sebelas Maret Surakarta Privat Law Vol: 6 No: 1, 2018.

Wargianti dan Budhisulistiyawati, *Studi Tentang CSR (Corporate Social Responsibility) Di Pt Madubaru Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Jurnal Universitas Sebelas Maret Surakarta Privat Law Vol: 6 No: 1, 2018,

Yusuf, Muhammad, *Islamic Corporate Social Responcibility (I-CSR) pada lembaga keuangan syariah (LKS) teori dan praktik*, Depok : Kencana, edisi pertama, 2017.

Zanariyatim, *et..al.*, *Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Umum Syariah Berdasarkan Islamic Social Reporting Index (Indeks ISR)*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam Vol. 4, No. 1, 2016

LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Nama Bank Umum Syariah Tahun 2016-2018

No.	KODE	Bank Umum Syariah
1	BMI	Bank Muamalat Indonesia
2	BVS	Bank Victoria Syariah
3	BRIS	Bank BRISyariah
4	BJBS	Bank Jabar Banten Syariah
5	BNIS	Bank BNI Syariah
6	BSM	Bank Syariah Mandiri
7	BMS	Bank Mega Syariah
8	BPDS	Bank Panin Dubai Syariah
9	BSB	Bank Syariah Bukopin
10	BCAS	Bank Central Asia Syariah
11	BTPNS	Bank BTPN Syariah
12	BMSI	Maybank Syariah Indonesia

Lampiran 2. Lampiran Tema dan Item ISR

No	ITEM YANG DIUNGKAPKAN
A. PENDANAAN DAN INVESTASI	
1.	Aktivitas Riba
	a) indentifikasi aktifitas yang mengandung riba
	b) % kontribusi dari profit
2.	Gharar
	a) Identifikasi aktivitas yang mengandung gharar
	b) Kontribusi % dari profit
3	Zakat
	a) Metode yang digunakan
	b) Sumber zakat
	c) jumlah zakat
	d) Penerima zakat
	e) Opini Dewan Pengawas Syariah mengenai pengumpulan dan penyaluran zakat
4	Kebijakan dalam mengatasi keterlambatan pembayaran oleh <i>insolvent clients</i>
	a) indentifikasi kebijakan untuk menanggulangi <i>insolvent clients</i>
	b) Besarnya biaya tambahan yang dikenakan sebagai konsekuensi keterlambatan pembayaran
	c) Opini Dewan pengawas syariah terkait dengan izin mengenai biaya tambahan yang dikenakan sebagai konsekuensi keterlambatan pembayaran oleh <i>insolvent clients</i>
5	<i>Current Value Balance Sheet</i>
6	<i>Value Added Statements</i>
B. PRODUK DAN JASA	
7	Status halal atau syariah dalam produk
8	Pengembangan produk
9	Peningkatan pelayanan
10	Keluhan pelanggan/ kejadian yang timbul karena ketidaktaatan

	terhadap peraturan yang berlaku
	a) Total keluhan konsumen
	b) Penanganan keluhan tersebut
	c) Denda baik uang maupun non uang terkait pelanggaran peraturan
	d) Survei atas kepuasan pelanggan
C	KARYAWAN
11	Karakteristik pekerjaan
	a) Jumlah jam kerja
	b) hari libur
	c) Remunerasi
	d) Rasio gaji
	e) Jumlah karyawan, jenis dan ketrampilan
12	Pendidikan dan pelatihan
	a) Program pendidikan dan pelatihan bagi karyawan
	b) Membangun program dan jenjang karir karyawan
	c) strategi retensi karyawan
	d) Prosentase karyawan yang menerima pengembangan karir
13	Kesempatan yang sama
14	Kesehatan dan keselamatan kerja
15	Keterlibatan karyawan di perusahaan
16	Lingkungan kerja
17	Tempat ibadah yang memadai
18	Waktu ibadah/ kegiatan religius
19	Perekrutan khusus
20	Kesejahteraan karyawan
D	SOSIAL
21	Shodaqoh/ Donasi
22	Wakaf
23	Qard hasan
24	Zakat atau sumbangan dari karyawan atau nasabah

25	Pendidikan
	a) Pendirian sekolah
	b) Bantuan pada sekolah dalam bentuk finansial atau non finansial
	c) Beasiswa
	d) Pemberdayaan kerja para lulusan sekolah/kuliah (magang atau praktik kerja lapangan)
26	Bantuan kesehatan
27	Pemberdayaan ekonomi
28	Kepedulian terhadap anak yatim piatu
29	Pembangunan atau renovasi masjid
30	Kegiatan kepemudaan
31	Kegiatan sosial lainnya (pemberian buku, mudik bareng, dan lain-lain)
32	Sponsor acara kesehatan, olahraga, edukasi, dan lain-lain
E	LINGKUNGAN
33	Kampanye <i>go green</i>
34	Konservasi lingkungan (mengurangi efek pemanasan global, pengelolaan limbah, pengelolaan air bersih)
35	Perlindungan terhadap flora dan fauna yang liar an terancam punah
36	Polusi
37	Perbaikan dan pembuatan sarana umum
38	Audit lingkungan
39	Kebijakan manajemen lingkungan
F	TATA KELOLA PERUSAHAAN
40	Profil dan strategi perusahaan
41	Struktur Organisasi
42	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
43	Remunerasi dewan komesaris
44	Rincian nama dewan komesaris
45	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi

46	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite
47	Rincian nama dan profil DPS
48	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah
49	Remunerasi DPS
50	Pelaksanaan prinsip syariah dalam penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa
51	Struktur kepemilikan saham
52	Perkara hukum
53	Penanganan benturan kepentingan
54	Penerapan fungsi kepatuhan Bank
55	Penerapan fungsi audit intern
56	Penerapan fungsi audit ekstern
57	Batas maksimum penyaluran dana
58	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan
59	Kebijakan anti korupsi, pencucian uang dan praktik menyimpang lainnya
60	Etika Perusahaan

Lampiran 4. Tingkat Pengungkapan pada setiap Tema ISR

1. Tema Pendanaan dan Investasi Tahun 2016-2018

KODE	Bank Umum Syariah	Pengungkapan			Rata-rata
		2016	2017	2018	
BMI	Bank Muamalat Indonesia	35,0%	35,0%	35,0%	35,0%
BVS	Bank Victoria Syariah	18,3%	18,3%	18,3%	18,3%
BRIS	Bank BRISyariah	18,3%	35,0%	18,3%	23,9%
BJBS	Bank Jabar Banten Syariah	38,3%	18,3%	31,7%	29,4%
BNIS	Bank BNI Syariah	35,0%	35,0%	35,0%	35,0%
BSM	Bank Syariah Mandiri	35,0%	35,0%	35,0%	35,0%
BMS	Bank Mega Syariah	35,0%	35,0%	18,3%	29,4%
BPDS	Bank Panin Dubai Syariah	26,7%	26,7%	13,3%	22,2%
BSB	Bank Syariah Bukopin	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%
BCAS	Bank Central Asia Syariah	35,0%	35,0%	35,0%	35,0%
BTPNS	Bank BTPN Syariah	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%
BMSI	Maybank Syariah Indonesia	25,0%	8,3%	8,3%	13,9%
		27,9%	26,2%	23,5%	25,9%

2. Tema Produk dan Jasa Tahun 2016-2018

KODE	Bank Umum Syariah	Pengungkapan			Rata-rata
		2016	2017	2018	
BMI	Bank Muamalat Indonesia	93,8%	93,8%	87,5%	91,7%
BVS	Bank Victoria Syariah	87,5%	87,5%	93,8%	89,6%
BRIS	Bank BRISyariah	93,8%	81,3%	93,8%	89,6%
BJBS	Bank Jabar Banten Syariah	81,3%	81,3%	93,8%	85,4%
BNIS	Bank BNI Syariah	93,8%	100,0%	100,0%	97,9%
BSM	Bank Syariah Mandiri	93,8%	93,8%	100,0%	95,8%
BMS	Bank Mega Syariah	87,5%	100,0%	93,8%	93,8%
BPDS	Bank Panin Dubai Syariah	87,5%	93,8%	93,8%	91,7%
BSB	Bank Syariah Bukopin	93,8%	93,8%	93,8%	93,8%
BCAS	Bank Central Asia Syariah	87,5%	87,5%	87,5%	87,5%
BTPNS	Bank BTPN Syariah	93,8%	93,8%	93,8%	93,8%
BMSI	Maybank Syariah Indonesia	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%
		89,1%	90,1%	92,2%	90,5%

3. Tema Karyawan tahun 2016-2018

KODE	Bank Umum Syariah	Pengungkapan			Rata-rata
		2016	2017	2018	
BMI	Bank Muamalat Indonesia	63,5%	76,0%	76,0%	71,8%
BVS	Bank Victoria Syariah	43,0%	41,5%	41,5%	42,0%
BRIS	Bank BRISyariah	76,0%	51,5%	49,0%	58,8%
BJBS	Bank Jabar Banten Syariah	41,0%	51,0%	48,5%	46,8%
BNIS	Bank BNI Syariah	83,5%	83,5%	83,5%	83,5%
BSM	Bank Syariah Mandiri	73,5%	61,0%	71,0%	68,5%
BMS	Bank Mega Syariah	51,0%	51,0%	61,0%	54,3%
BPDS	Bank Panin Dubai Syariah	71,0%	71,0%	51,0%	64,3%
BSB	Bank Syariah Bukopin	48,5%	71,0%	63,5%	61,0%
BCAS	Bank Central Asia Syariah	63,5%	63,5%	66,0%	64,3%
BTPNS	Bank BTPN Syariah	41,0%	38,5%	48,5%	42,7%
BMSI	Maybank Syariah Indonesia	41,0%	41,0%	41,0%	41,0%
		58,0%	58,4%	58,4%	58,3%

4. Tema Sosial Tahun 2016-2018

KODE	Bank Umum Syariah	Pengungkapan			Rata-rata
		2016	2017	2018	
BMI	Bank Muamalat Indonesia	79,2%	64,6%	54,2%	66,0%
BVS	Bank Victoria Syariah	33,3%	54,2%	62,5%	50,0%
BRIS	Bank BRISyariah	64,6%	70,8%	79,2%	71,5%
BJBS	Bank Jabar Banten Syariah	54,2%	68,8%	54,2%	59,0%
BNIS	Bank BNI Syariah	87,5%	89,6%	87,5%	88,2%
BSM	Bank Syariah Mandiri	81,3%	81,3%	89,6%	84,0%
BMS	Bank Mega Syariah	79,2%	87,5%	89,6%	85,4%
BPDS	Bank Panin Dubai Syariah	52,1%	52,1%	52,1%	52,1%
BSB	Bank Syariah Bukopin	60,4%	60,4%	68,8%	63,2%
BCAS	Bank Central Asia Syariah	43,8%	56,3%	62,5%	54,2%
BTPNS	Bank BTPN Syariah	25,0%	25,0%	27,1%	25,7%
BMSI	Maybank Syariah Indonesia	33,3%	37,5%	45,8%	38,9%
		57,8%	62,3%	64,4%	61,5%

5. Tema Lingkungan Tahun 2016-2018

KODE	Bank Umum Syariah	Pengungkapan			Rata-rata
		2016	2017	2018	
BMI	Bank Muamalat Indonesia	28,6%	28,6%	28,6%	28,6%
BVS	Bank Victoria Syariah	0,0%	0,0%	14,3%	4,8%
BRIS	Bank BRISyariah	71,4%	57,1%	57,1%	61,9%
BJBS	Bank Jabar Banten Syariah	0,0%	0,0%	14,3%	4,8%
BNIS	Bank BNI Syariah	57,1%	57,1%	57,1%	57,1%
BSM	Bank Syariah Mandiri	57,1%	28,6%	42,9%	42,9%
BMS	Bank Mega Syariah	0,0%	42,9%	42,9%	28,6%
BPDS	Bank Panin Dubai Syariah	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%
BSB	Bank Syariah Bukopin	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%
BCAS	Bank Central Asia Syariah	0,0%	14,3%	14,3%	9,5%
BTPNS	Bank BTPN Syariah	0,0%	14,3%	14,3%	9,5%
BMSI	Maybank Syariah Indonesia	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
		20,2%	22,6%	26,2%	23,0%

6. Tema Tata kelola perusahaan Tahun 2016-2018

KODE	Bank Umum Syariah	Pengungkapan			Rata-rata
		2016	2017	2018	
BMI	Bank Muamalat Indonesia	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
BVS	Bank Victoria Syariah	95,2%	90,5%	90,5%	92,1%
BRIS	Bank BRISyariah	100,0%	95,2%	95,2%	96,8%
BJBS	Bank Jabar Banten Syariah	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
BNIS	Bank BNI Syariah	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
BSM	Bank Syariah Mandiri	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
BMS	Bank Mega Syariah	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
BPDS	Bank Panin Dubai Syariah	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
BSB	Bank Syariah Bukopin	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
BCAS	Bank Central Asia Syariah	81,0%	100,0%	100,0%	93,7%
BTPNS	Bank BTPN Syariah	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
BMSI	Maybank Syariah Indonesia	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
		98,0%	98,8%	98,8%	98,6%

7. Perbandingan indeks ISR berdasarkan tema ISR tahun 2016-2018

No	Tema ISR	2016	2017	2018
1	Pendanaan dan Investasi	27,9%	26,3%	23,5%
2	Produk dan Jasa	89,1%	90,1%	92,2%
3	Karyawan	58,0%	58,4%	58,4%
4	Sosial	57,8%	62,3%	64,4%
5	Lingkungan	20,2%	22,6%	26,2%
6	Tata Kelola Perusahaan	98,0%	98,8%	98,8%

BIODATA MAHASISWA



Nama :Nofiyatul Khoiriyah
Tempat, Tgl Lahir :Pati, 30 November 1996
Jenis Kelamin :Perempuan
Agama :Islam
Alamat :DesaPundenrejo RT 02/05 Kecamatan Tayu
Kabupaten Pati
Handphone/WA :082225256699
Email :Nofykhoiry@gmail.com
Instagram :Nofy_Khoiry
Facebook :Nofy Khoiry

PENDIDIKAN

FORMAL:

- 2003- 2008 MI Manba'ul Huda Pundenrejo
- 2008 - 2011MTs. Manba'ul Huda Pundenrejo
- 2011 - 2014 Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 02 Pati

NON FORMAL:

- TPQ Nurul Huda Pundenrejo

PENGALAMAN ORGANISASI

- 2015/2016 :Anggota KMPP (Keluarga Mahasiswa dan Pelajar Pati)